



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kami menyadari bahwa dalam LPPD Kabupaten Belitung ini masih ada hal-hal yang belum teruraikan secara sempurna dari penyampaian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerja. Berkenaan dengan hal itu, kami akan terus melakukan peninjauan ulang terhadap LPPD Kabupaten Belitung ini dan melakukan upaya-upaya perbaikan agar lebih baik lagi

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat berguna bagi kita semua untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tanjungpandan, 29 Maret 2025
Bupati Belitung,

H. Dini Ariansyah Hidayat, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
INSPEKTORAT
JI. JEND. A. YANI NO. 08 TANJUNGPANDAN TELPON 21048

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Tanjungpandan, 21 Maret 2025
INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG



PARYANTA, S.Pd, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196701281989031003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	29
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	49
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	53
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	53
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53
2.1.2 Angka Kemiskinan	54
2.1.3 Angka Pengangguran	55
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	55
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	56
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	56
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	57
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasi	57
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Penunjang Urusan Pemerintahan	65
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	67
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	163
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	167
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	167
4.2 URUSAN KESEHATAN	170
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	182
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	185
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ...	189
4.6 URUSAN SOSIAL	197
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	213
BAB V PENUTUP	219
LAMPIRAN 1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT SRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024	
LAMPIRAN 2 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2024	
LAMPIRAN 3 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT AGAMA TAHUN 2024	
LAMPIRAN 4 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2024	
LAMPIRAN 5 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2024	
LAMPIRAN 6 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Belitung didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS. Luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², dengan luas wilayah daratan sebesar 2.293,69 km² atau 229.369 Ha dan sisanya berupa lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Membalong, dan yang terkecil Kecamatan Selat Nasik (kecamatan kepulauan). Luas wilayah dari lima kecamatan adalah sebagai berikut :

- Membalong : 909,550 Km²
- Tanjungpandan : 378,448 Km²
- Badau : 458,200 Km²
- Sijuk : 413,992 Km²
- Selat Nasik : 133,500 Km²

Kabupaten ini terdiri dari sekitar 163 buah pulau besar dan kecil di mana pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar lainnya adalah Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Tabel 1.1
Jumlah Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1.	Tanjungpandan	17
2.	Membalong	35
3.	Selat Nasik	38
4.	Sijuk	55
5.	Badau	18
Jumlah		163

Sumber : Bappeda Kab. Belitung

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2024 antara 0 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 25 hari setiap bulannya. Curah hujan



tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 347,4 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2024 bervariasi antara 26,1°C sampai 33,9°C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 77 persen sampai 91 persen, dan tekanan udara antara 1010,1 mb sampai dengan 1012,0 mb.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km² atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, yang mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung per Desember 2024 berjumlah 192.405 jiwa dengan 66.276 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung berkedudukan di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 109.863 jiwa (57,09%) dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tanjungpandan	55.545	54.318	109.863	37.591
2.	Membalong	14.096	13.315	27.411	9.864
3.	Selat Nasik	3.050	2.902	5.952	2.069
4.	Sujuk	17.072	16.293	33.365	11.286
5.	Badau	8.160	7.654	15.814	5.466
Jumlah		97.273	94.482	192.405	66.276

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2024 paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yaitu sebanyak 45.881 orang (23,84%). Sedangkan dari segi jenis pekerjaan, penduduk Kabupaten Belitung paling banyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 21.142 orang. Untuk peran serta perempuan dalam pekerjaan hanya sebagian kecil saja perempuan di Kabupaten Belitung memiliki pekerjaan dan mayoritas mengurus rumah tangga sebagaimana rincian Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian terlampir dalam laporan ini.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tdk/Blm Sekolah	18.847	17.902	36.749
Blm Tamat SD/Sederajat	15.883	14.806	30.689
Tamat SD/Sederajat	22.679	23.202	45.881
SLTP/Sederajat	13.902	13.124	27.026
SLTA/Sederajat	21.055	18.876	39.931
D-I/II	381	614	995
Akademi/D-III/Sarjana Muda	1.526	1.846	3.372
D-IV/Strata-I	3.486	4.008	7.494
Strata-II	162	101	263
Strata-III	2	3	5
Jumlah	97.923	94.482	192.405

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2025



d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 42 desa, yang terdiri dari :

Tabel 1.7
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Tanjungpandan	a. Kelurahan Kota b. Kelurahan Parit c. Kelurahan Kampong Damai d. Kelurahan Paal Satu e. Kelurahan Lesung Batang f. Kelurahan Pangkallalang g. Kelurahan Tanjungpendam h. Desa Buluh Tumbang i. Desa Perawas j. Desa Dukong k. Desa Juru Seberang l. Desa Air Saga m. Desa Air Merbau n. Desa Aik Pelempang Jaya o. Desa Aik Ketekok p. Desa Aik Rayak
2	Membalong	a. Desa Membalong b. Desa Perpat c. Desa Lassar d. Desa Simpang Rusa e. Desa Kembiri f. Desa Bantan g. Desa Tanjung Rusa h. Desa Mentigi i. Desa Pulau Seliu j. Desa Pulau Sumedang k. Desa Gunung Riting l. Desa Padang Kandis
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	a. Desa Badau b. Desa Air Batu Buding c. Desa Sungai Samak d. Desa Kacang Butor e. Desa Cerucuk f. Desa Pegantungan g. Desa Ibul
3	Selat Nasik	e. Desa Selat Nasik f. Desa Petaling g. Desa Suak Gual h. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	k. Desa Sijuk l. Desa Batu Itam m. Desa Terong n. Desa Air Seruk o. Desa Tanjung Binga p. Desa Air Selumar q. Desa Sungai Padang r. Desa Keciput s. Desa Pelepak Pute t. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	h. Desa Badau i. Desa Air Batu Buding j. Desa Sungai Samak k. Desa Kacang Butor l. Desa Cerucuk m. Desa Pegantungan n. Desa Ibul

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung



e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
3	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
8	Dinas Pariwisata	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
14	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
15	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
17	Dinas Perikanan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
27	Kecamatan Tanjungpandan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
28	Kecamatan Membalong	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
29	Kecamatan Sijuk	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
30	Kecamatan Badau	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019
31	Kecamatan Selat Nasik	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2024 sebanyak 2.863 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya	14	36	50	100
2	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Lainnya	4	7	13	24
3	Inspektorat Daerah	Fungsi Penunjang Pengawasan	6	30	4	40
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	22	1151	37	1210
5	Dinas Kesehatan	Kesehatan	29	622	97	748
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13	10	22	45
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	4	6	9	19
8	Dinas Pariwisata	Pariwisata	6	9	12	27
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	7	9	8	24
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	12	7	26
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi	7	6	7	20



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitang Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	- Penanaman Modal - Perindustrian	7	13	5	25
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	- Koperasi - Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan - Tenaga Kerja	11	14	8	33
14	Dinas Perhubungan	Perhubungan	12	7	17	36
15	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	11	9	14	34
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Pangan - Pertanian	9	45	14	68
17	Dinas Perikanan	Perikanan	9	8	15	32
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	- Perpustakaan - Kearsipan	6	11	6	23
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Statistik - Komunikasi dan Informatika - Persandian	5	11	13	29
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13	18	10	41
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Fungsi Penunjang Kepegawaian - Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	7	16	14	37
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	8	20	8	36
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	14	4	13	31
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	9	1	3	13
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	6	4	10	20
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4	0	17	21
27	Kecamatan Tanjungpandan	Fungsi Penunjang Kewilayahan	30	0	16	46
28	Kecamatan Membalong	Fungsi Penunjang Kewilayahan	9	0	8	17
29	Kecamatan Sijuk	Fungsi Penunjang Kewilayahan	7	0	9	16
30	Kecamatan Badau	Fungsi Penunjang Kewilayahan	7	0	5	12



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
31	Kecamatan Selat Nasik	Fungsi Penunjang Kewilayahan	8	0	2	10

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2023-2024, target pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp. 1.055.850.545.765,00 pada tahun 2023 dan menjadi Rp. 967.168.723.887,00 pada tahun 2024. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2023-2024, realisasi pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 cenderung melebihi target dengan persentase pada Tahun 2023 sebesar 103,93% sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 101,05% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2023	1.055.850.545.765,00	1.097.308.198.795,80	103,93
2024	967.168.723.887,00	977.370.141.296,33	101,05

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2024

Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Per Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024

No	Komponen Pendapatan	2024			2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	154.812.555.643,00	185.033.079.282,33	119,52	147.139.608.350,00	186.619.838.495,80	126,83
2	Dana Perimbangan	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53	897.489.400.967,00	902.793.193.507,00	100,59
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	11.221.536.448,00	7.895.166.793	70,36
Jumlah		967.168.723.887	977.370.141.296,33	101,05	1.055.850.545.765,00	1.097.308.198.795,80	103,93

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2024

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2023 dan 2024 bersumber dari dana perimbangan dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 82,27% dan Tahun 2024 sebesar 79,96%. Komponen kedua pada Tahun 2023 adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 17% sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 18,93%. Untuk Komponen ketiga pada Tahun 2023 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 0,71% sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,1%.



Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi belanja operasi mempunyai target anggaran sebesar Rp. 964.222.300.034,00 dan terealisasi Rp. 885.984.171.231,78 dengan persentase pencapaian target sebesar 91,89%. Sedangkan pada belanja modal memiliki target Rp. 74.989.800.190,00 dan terealisasi Rp. 67.145.369.203,62 atau 89,54%. Sementara itu, target belanja tak terduga sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00% sedangkan target belanja transfer sebesar Rp. 108.088.655.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.849.220.370,00 atau 99,78%. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja daerah pada tahun 2023 memiliki target Rp 1.149.800.755.924,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.060.978.760.805,40 atau 92,28%.

Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023-2024

No	Komponen Belanja	2024			2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	91,89	959.091.928.326	830.508.453.901,00	86,59
2	Belanja Modal	74.989.800.190	67.145.369.203,62	89,54	162.890.260.033	147.565.067.698	90,59
3	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.367.000.000	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	108.088.655.700,00	107.849.220.370,00	99,78	108.169.751.000,00	107.594.010.100,00	99,47
Jumlah		1.149.800.755.924,00	1.060.978.760.805,40	92,28	1.232.518.939.359,00	1.085.667.531.699,00	88,09

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2024

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Tabel 1.14
Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		571.372.586.056,00	531.578.253.003,72	59.116.875.647,00	54.790.323.862,62
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		228.526.689.829,00	215.666.200.141,00	14.249.051.944,00	13.687.143.278,00
	157254629,19		225.686.649.829,00	212.946.106.366,00	14.249.051.944,00	13.687.143.278,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	180.409.847.868,00	175.164.197.648,00	753.742.500,00	748.880.000,00
b.	Program	Pengelolaan Pendidikan	44.750.137.611,00	37.337.245.298,00	13.495.309.444,00	12.938.263.278,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
c.	Program	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	526.664.350,00	444.663.420,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 1 Tanjungpandan		196.560.000,00	196.154.488,00	0	0,00
d.	Program	Pengelolaan Pendidikan	196.560.000,00	196.154.488,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 2 Tanjungpandan		252.000.000,00	217.044.963,00	0	0,00
e.	Program	Pengelolaan Pendidikan	252.000.000,00	217.044.963,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 3 Tanjungpandan		254.940.000,00	252.031.896,00	0	0,00
f.	Program	Pengelolaan Pendidikan	254.940.000,00	252.031.896,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 4 Tanjungpandan		239.400.000,00	208.925.400,00	0	0,00
g.	Program	Pengelolaan Pendidikan	239.400.000,00	208.925.400,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 5 Tanjungpandan		207.060.000,00	201.856.204,00	0	0,00
h.	Program	Pengelolaan Pendidikan	207.060.000,00	201.856.204,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 6 Tanjungpandan		208.740.000,00	200.268.092,00	0	0,00
i.	Program	Pengelolaan Pendidikan	208.740.000,00	200.268.092,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 7 Tanjungpandan		207.900.000,00	205.648.543,00	0	0,00
j.	Program	Pengelolaan Pendidikan	207.900.000,00	205.648.543,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 1 Badau		104.160.000,00	97.445.650,00	0	0,00
k.	Program	Pengelolaan Pendidikan	104.160.000,00	97.445.650,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 2 Badau		107.520.000,00	107.129.899,00	0	0,00
l.	Program	Pengelolaan Pendidikan	107.520.000,00	107.129.899,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 3 Badau		75.600.000,00	72.493.327,00	0	0,00
m.	PROGRAM	Pengelolaan Pendidikan	75.600.000,00	72.493.327,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 1 Membalong		94.500.000,00	93.404.571,00	0	0,00
n.	Program	Pengelolaan Pendidikan	94.500.000,00	93.404.571,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 2 Membalong		139.440.000,00	131.099.500,00	0	0,00
o.	Program	Pengelolaan Pendidikan	139.440.000,00	131.099.500,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 3 Membalong		37.800.000,00	37.710.857,00	0	0,00
p.	Program	Pengelolaan Pendidikan	37.800.000,00	37.710.857,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 4 Membalong		21.840.000,00	19.734.761,00	0	0,00
q.	Program	Pengelolaan Pendidikan	21.840.000,00	19.734.761,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	UPT SMP Negeri 5 Membalong		82.320.000,00	79.622.000,00	0	0,00
r.	Program	Pengelolaan Pendidikan	82.320.000,00	79.622.000,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 1 Sijuk		160.440.000,00	159.275.007,00	0	0,00
s.	Program	Pengelolaan Pendidikan	160.440.000,00	159.275.007,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 2 Sijuk		193.200.000,00	188.934.737,00	0	0,00
t.	Program	Pengelolaan Pendidikan	193.200.000,00	188.934.737,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 3 Sijuk		111.300.000,00	108.488.610,00	0	0,00
u.	Program	Pengelolaan Pendidikan	111.300.000,00	108.488.610,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 4 Sijuk		43.260.000,00	43.190.000,00	0	0,00
v.	Program	Pengelolaan Pendidikan	43.260.000,00	43.190.000,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 1 Selat Nasik		78.960.000,00	76.886.329,00	0	0,00
w.	Program	Pengelolaan Pendidikan	78.960.000,00	76.886.329,00	0	0,00
	UPT SMP Negeri 2 Selat Nasik		23.100.000,00	22.748.941,00	0	0,00
x.	Program	Pengelolaan Pendidikan	23.100.000,00	22.748.941,00	0	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		267.107.246.665,00	245.527.840.753,72	18.148.434.984,00	17.300.182.875,43
	Dinas Kesehatan		103.451.403.991,00	95.722.477.503,72	5.878.689.000,00	5.654.195.089,43
a.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.721.363.820,00	48.631.836.609,00	338.344.000,00	310.350.000,00
b.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	48.816.957.171,00	45.507.299.394,72	5.540.345.000,00	5.343.845.089,43
c.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.143.342.000,00	920.259.509,00	0	0,00
d.	Program	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	396.331.000,00	384.421.200,00	0	0,00
e.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	373.410.000,00	278.660.791,00	0	0,00
	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono		134.971.634.825,00	124.230.681.571,00	11.795.429.284,00	11.204.462.786,00
f.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.505.031.025,00	113.772.373.048,00	9.364.970.000,00	9.216.577.000,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		Kabupaten/Kota				
g.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.466.603.800,00	10.458.308.523,00	2.430.459.284,00	1.987.885.786,00
	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.094.700.212,00	2.882.286.860,00	37.951.700,00	37.800.000,00
h.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.151.610.800,00	1.116.195.606,00	37.951.700,00	37.800.000,00
i.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.910.469.412,00	1.733.471.254,00	0	0,00
j.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	32.620.000,00	32.620.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.378.780.870,00	3.122.960.333,00	73.000.000,00	72.950.000,00
k.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.004.128.350,00	988.776.780,00	24.000.000,00	24.000.000,00
l.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.210.399.000,00	1.971.130.033,00	49.000.000,00	48.950.000,00
m.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	149.603.520,00	149.603.520,00	0	0,00
n.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14.650.000,00	13.450.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.143.800.580,00	2.746.068.669,00	42.000.000,00	34.500.000,00
o.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	816.348.560,00	771.330.440,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
p.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.171.280.900,00	1.844.443.119,00	42.000.000,00	34.500.000,00
q.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	143.571.120,00	117.782.610,00	0	0,00
r.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.600.000,00	12.512.500,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.256.784.491,00	2.928.748.066,00	22.500.000,00	20.550.000,00
s.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	707.004.680,00	699.878.900,00	22.500.000,00	20.550.000,00
t.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.423.752.491,00	2.102.975.766,00	0	0,00
u.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.787.320,00	121.653.400,00	0	0,00
v.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.240.000,00	4.240.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.856.196.174,00	2.500.152.996,00	33.300.000,00	33.150.000,00
w.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	500.280.250,00	454.735.860,00	33.300.000,00	33.150.000,00
x.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.301.463.284,00	1.991.361.036,00	0	0,00
y.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.102.640,00	46.751.100,00	0	0,00
z.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.350.000,00	7.305.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.671.121.476,00	2.451.111.137,00	74.500.000,00	73.375.000,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
aa.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	558.493.480,00	545.898.630,00	14.500.000,00	14.500.000,00
bb.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.020.755.356,00	1.813.490.527,00	60.000.000,00	58.875.000,00
cc.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.302.640,00	84.151.980,00	0	0,00
dd.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.570.000,00	7.570.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.894.977.970,00	3.426.996.898,00	93.800.000,00	78.800.000,00
ee.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	398.830.150,00	386.177.120,00	0	0,00
ff.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.366.924.300,00	2.911.746.918,00	93.800.000,00	78.800.000,00
gg.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.703.520,00	121.552.860,00	0	0,00
hh.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.520.000,00	7.520.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.914.822.920,00	3.399.134.204,00	68.265.000,00	62.000.000,00
ii.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	345.569.600,00	312.572.594,00	0	0,00
jj.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.435.916.000,00	2.956.212.800,00	68.265.000,00	62.000.000,00
kk.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	123.787.320,00	120.798.810,00	0	0,00
ll.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.550.000,00	9.550.000,00	0	0,00
	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.473.023.156,00	2.117.222.516,00	29.000.000,00	28.400.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
mm.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	664.662.040,00	520.622.490,00	29.000.000,00	28.400.000,00
nn.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.694.909.356,00	1.483.148.266,00	0	0,00
oo.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	74.801.760,00	74.801.760,00	0	0,00
pp.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	38.650.000,00	38.650.000,00	0	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		44.883.578.989,00	40.876.396.369,00	21.875.190.886,00	19.166.286.269,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		44.883.578.989,00	40.876.396.369,00	21.875.190.886,00	19.166.286.269,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.106.001.641,00	9.397.162.409,00	0	0,00
b.	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	77.685.600,00	74.790.000,00	2.132.757.286,00	2.000.938.700,00
c.	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.897.877.350,00	3.818.222.711,00	1.220.860.000,00	1.155.319.779,00
d.	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	251.260.000,00	251.208.800,00	800.000.000,00	799.051.000,00
e.	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0	0,00	694.710.000,00	693.614.500,00
f.	Program	Penataan Bangunan Gedung	9.132.555.000,00	8.671.920.300,00	4.341.930.000,00	4.312.821.000,00
g.	Program	Penyelenggaraan Jalan	18.583.004.998,00	17.920.747.183,00	12.446.138.600,00	9.965.746.290,00
H	Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	518.644.400,00	451.485.410,00	236.575.000,00	236.575.000,00
i.	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	316.550.000,00	290.859.556,00	2.220.000,00	2.220.000,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		3.161.972.453,00	3.016.111.225,00	3.906.475.000,00	3.793.756.811,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		3.161.972.453,00	3.016.111.225,00	3.906.475.000,00	3.793.756.811,00
a.	program	Pengembangan Perumahan	83.946.803,00	0,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
b.	program	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000,00	605.084.000,00	0	0,00
c.	program	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2.469.208.650,00	2.411.027.225,00	3.906.475.000,00	3.793.756.811,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		19.487.663.600,00	18.725.751.499,00	214.600.000,00	207.054.629,19
1)	Satuan Polisi Pamong Praja		12.773.293.100,00	12.571.113.022,00	52.000.000,00	49.800.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.182.009.100,00	8.017.683.922,00	0	0,00
b.	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.591.284.000,00	4.553.429.100,00	52.000.000,00	49.800.000,00
2)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.714.370.500,00	6.154.638.477,00	162.600.000,00	157.254.629,19
c.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.240.725.200,00	3.945.957.189,00	162.600.000,00	157.254.629,19
d.	Program	Penanggulangan Bencana	1.696.690.200,00	1.529.924.988,00	0	0,00
e.	Program	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	776.955.100,00	678.756.300,00	0	0,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		8.205.434.520,00	7.765.953.016,00	723.122.833,00	635.900.000,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		8.205.434.520,00	7.765.953.016,00	723.122.833,00	635.900.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.365.932.258,00	6.193.627.996,00	723.122.833,00	635.900.000,00
b.	Program	Pemberdayaan Sosial	348.934.400,00	321.623.110,00	0	0,00
c.	Program	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	41.256.200,00	16.955.668,00	0	0,00
d.	Program	Rehabilitasi Sosial	355.284.512,00	316.638.998,00	0	0,00
e.	Program	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	644.184.050,00	513.269.294,00	0	0,00
f.	Program	Penanganan Bencana	438.517.700,00	398.107.550,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
g.	Program	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	11.325.400,00	5.730.400,00	0	0,00
II.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		110.226.763.533,00	102.212.829.782,00	6.568.037.073,00	6.131.751.916,00
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		254.295.000,00	233.014.800,00	0	0,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja		254.295.000,00	233.014.800,00	0	0,00
a.	Program	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	193.110.000,00	187.860.800,00	0	0,00
b.	Program	Hubungan Industrial	61.185.000,00	45.154.000,00	0	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.386.294.700,00	1.119.403.859,00	0	0,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.386.294.700,00	1.119.403.859,00	0	0,00
a.	Program	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	439.498.900,00	435.651.334,00	0	0,00
b.	Program	Perlindungan Perempuan	394.720.850,00	195.433.106,00	0	0,00
c.	Program	Peningkatan Kualitas Keluarga	12.132.500,00	11.880.000,00	0	0,00
d.	Program	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	45.671.700,00	40.377.200,00	0	0,00
e.	Program	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	270.743.750,00	228.070.519,00	0	0,00
f.	Program	Perlindungan Khusus Anak	223.527.000,00	207.991.700,00	0	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		273.320.978,00	253.510.431,00	0	0,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		273.320.978,00	253.510.431,00	0	0,00
a.	Program	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	119.964.378,00	105.704.936,00	0	0,00
b.	Program	Penanganan Kerawanan Pangan	57.097.500,00	55.585.786,00	0	0,00
c.	Program	Pengawasan Keamanan Pangan	96.259.100,00	92.219.709,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		68.007.500,00	49.494.805,00	1.982.000.000,00	1.724.800.000,00
	Sekretariat Daerah		68.007.500,00	49.494.805,00	0	0,00
	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung		68.007.500,00	49.494.805,00	0	0,00
a.	Program	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	68.007.500,00	49.494.805,00	0	0,00
	Bagian Umum Setda Kab. Belitung		0	0,00	1.982.000.000,00	1.724.800.000,00
b.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	1.982.000.000,00	1.724.800.000,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		17.563.332.522,00	17.068.310.113,00	558.476.400,00	555.549.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup		17.563.332.522,00	17.068.310.113,00	558.476.400,00	555.549.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.921.163.672,00	6.592.354.379,00	222.477.500,00	221.800.000,00
b.	Program	Perencanaan Lingkungan Hidup	346.659.900,00	339.531.845,00	0	0,00
c.	Program	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.084.754.500,00	2.047.025.562,00	332.998.900,00	330.749.000,00
d.	Program	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	518.213.200,00	500.405.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00
e.	Program	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23.680.500,00	23.402.350,00	0	0,00
f.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	49.999.500,00	49.047.485,00	0	0,00
g.	Program	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	134.195.500,00	108.558.300,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
h.	Program	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.640.200,00	93.729.442,00	0	0,00
i.	Program	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.628.300,00	3.571.200,00	0	0,00
j.	Program	Pengelolaan Persampahan	7.380.397.250,00	7.310.683.850,00	0	0,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		6.132.384.500,00	5.880.828.501,00	523.924.500,00	391.495.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.132.384.500,00	5.880.828.501,00	523.924.500,00	391.495.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.734.098.150,00	5.516.881.345,00	523.924.500,00	391.495.000,00
b.	Program	Pendaftaran Penduduk	241.974.350,00	224.540.906,00	0	0,00
c.	Program	Pencatatan Sipil	78.375.000,00	62.287.200,00	0	0,00
d.	Program	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.977.000,00	10.739.050,00	0	0,00
e.	Program	Pengelolaan Profil Kependudukan	66.960.000,00	66.380.000,00	0	0,00
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8.093.491.555,00	7.490.347.121,00	151.560.000,00	149.900.000,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		8.093.491.555,00	7.490.347.121,00	151.560.000,00	149.900.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.228.272.105,00	5.671.278.905,00	151.560.000,00	149.900.000,00
b.	Program	Administrasi Pemerintahan Desa	953.617.600,00	935.796.229,00	0	0,00
c.	Program	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	911.601.850,00	883.271.987,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.966.015.550,00	3.542.371.315,00	0	0,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3.966.015.550,00	3.542.371.315,00	0	0,00
a.	Program	Pengendalian Penduduk	104.732.500,00	98.271.520,00	0	0,00
b.	Program	Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	985.567.050,00	922.629.503,00	0	0,00
c.	Program	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.875.716.000,00	2.521.470.292,00	0	0,00
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		23.048.951.450,00	21.742.674.033,00	1.910.681.150,00	1.899.809.675,00
	Dinas Perhubungan		23.048.951.450,00	21.742.674.033,00	1.910.681.150,00	1.899.809.675,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.957.666.450,00	7.990.449.686,00	178.000.000,00	174.915.825,00
b.	Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	12.503.892.400,00	12.298.748.792,00	1.732.681.150,00	1.724.893.850,00
c.	Program	Pengelolaan Pelayaran	1.587.392.600,00	1.453.475.555,00	0	0,00
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		10.673.120.328,00	9.476.047.502,00	521.698.890,00	512.683.741,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika		10.673.120.328,00	9.476.047.502,00	521.698.890,00	512.683.741,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.894.594.140,00	6.161.612.340,00	215.195.000,00	211.583.741,00
b.	Program	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.041.518.174,00	962.135.087,00	141.079.890,00	136.750.000,00
c.	Program	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.737.008.014,00	2.352.300.075,00	165.424.000,00	164.350.000,00
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		8.635.290.753,00	7.710.036.004,00	28.860.000,00	28.800.000,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja		8.635.290.753,00	7.710.036.004,00	28.860.000,00	28.800.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.556.561.783,00	6.899.961.960,00	0	0,00
b.	Program	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	311.620.770,00	152.631.050,00	0	0,00
c.	Program	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	403.708.600,00	333.775.350,00	28.860.000,00	28.800.000,00
d.	Program	Pengembangan Ukm	363.399.600,00	323.667.644,00	0	0,00
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		6.465.157.707,00	6.007.346.834,00	469.681.500,00	455.993.000,00
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian		6.465.157.707,00	6.007.346.834,00	469.681.500,00	455.993.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.841.096.875,00	5.409.496.663,00	469.681.500,00	455.993.000,00
b.	Program	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	41.369.050,00	38.947.472,00	0	0,00
c.	Program	Promosi Penanaman Modal	117.430.982,00	114.854.419,00	0	0,00
d.	Program	Pelayanan Penanaman Modal	116.771.100,00	112.855.930,00	0	0,00
e.	Program	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	348.489.700,00	331.192.350,00	0	0,00
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		12.099.448.229,00	11.142.830.226,00	303.204.633,00	295.421.500,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga		12.099.448.229,00	11.142.830.226,00	303.204.633,00	295.421.500,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.870.186.179,00	4.469.609.271,00	151.164.633,00	144.080.000,00
b.	Program	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	729.998.850,00	644.071.214,00	0	0,00
c.	Program	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.901.798.200,00	5.507.987.338,00	152.040.000,00	151.341.500,00
d.	Program	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	597.465.000,00	521.162.403,00	0	0,00
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		205.435.752,00	185.753.502,00	47.950.000,00	47.300.000,00
a.	Dinas Komunikasi dan Informatika		205.435.752,00	185.753.502,00	47.950.000,00	47.300.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
b.	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	205.435.752,00	185.753.502,00	47.950.000,00	47.300.000,00
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		226.224.414,00	196.935.939,00	0	0,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika		226.224.414,00	196.935.939,00	0	0,00
a.	PROGRAM	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	226.224.414,00	196.935.939,00	0	0,00
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		4.782.042.050,00	4.233.751.371,00	70.000.000,00	70.000.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		4.782.042.050,00	4.233.751.371,00	70.000.000,00	70.000.000,00
a.	Program	Pengembangan Kebudayaan	1.044.416.400,00	935.011.590,00	0	0,00
b.	Program	Pengembangan Kesenian Tradisional	104.893.950,00	84.836.538,00	0	0,00
c.	Program	Pembinaan Sejarah	385.553.600,00	272.874.000,00	0	0,00
d.	Program	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	383.220.000,00	238.727.572,00	0	0,00
e.	Program	Pengelolaan Permuseuman	2.863.958.100,00	2.702.301.671,00	70.000.000,00	70.000.000,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		6.208.088.345,00	5.747.547.337,00	0	0,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		6.208.088.345,00	5.747.547.337,00	0	0,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.874.243.445,00	5.427.002.995,00	0	0,00
b.	Program	Pembinaan Perpustakaan	333.844.900,00	320.544.342,00	0	0,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		145.862.200,00	132.626.089,00	0	0,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		145.862.200,00	132.626.089,00	0	0,00
a.	Program	Pengelolaan Arsip	145.862.200,00	132.626.089,00	0	0,00
III.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		48.778.002.000,00	42.620.900.330,75	977.785.360,00	929.336.500,00
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.980.273.350,00	11.633.890.309,00	77.675.000,00	72.580.000,00
	Dinas Perikanan		12.980.273.350,00	11.633.890.309,00	77.675.000,00	72.580.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.224.944.300,00	7.234.177.366,00	36.640.000,00	32.030.000,00
b.	Program	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.740.968.750,00	2.484.417.800,00	0	0,00
c.	Program	Pengelolaan Perikanan Budidaya	660.831.100,00	614.049.245,00	0	0,00
d.	Program	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	392.983.200,00	359.391.480,00	0	0,00
e.	Program	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	960.546.000,00	941.854.418,00	41.035.000,00	40.550.000,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		13.355.255.556,00	11.685.596.600,00	178.505.800,00	167.614.750,00
	Dinas Pariwisata		13.355.255.556,00	11.685.596.600,00	178.505.800,00	167.614.750,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.954.158.000,00	5.979.217.173,00	29.590.000,00	28.975.000,00
b.	Program	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.213.614.664,00	4.612.727.666,00	148.915.800,00	138.639.750,00
c.	Program	Pemasaran Pariwisata	753.286.242,00	684.168.261,00	0	0,00
d.	Program	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	434.196.650,00	409.483.500,00	0	0,00
e.	Program	Pemerintahan Bidang Pertanian	21.351.088.774,00	18.322.486.003,00	714.053.560,00	681.591.750,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		21.351.088.774,00	18.322.486.003,00	714.053.560,00	681.591.750,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		21.351.088.774,00	18.322.486.003,00	714.053.560,00	681.591.750,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.616.478.024,00	14.763.947.366,00	524.400.000,00	506.647.750,00
b.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.207.520.450,00	2.184.532.616,00	145.183.560,00	130.474.000,00
c.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	209.832.300,00	178.934.083,00	26.470.000,00	26.470.000,00
d.	Program	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	117.293.000,00	115.467.700,00	0	0,00
e.	Program	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.148.000,00	147.160.920,00	0	0,00
F.	Program	Perizinan Usaha Pertanian	760.600.000,00	658.188.674,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
g.	Program	Penyuluhan Pertanian	289.217.000,00	274.254.644,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		124.222.000,00	111.629.455,00	0	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup		124.222.000,00	111.629.455,00	0	0,00
a.	Program	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	124.222.000,00	111.629.455,00	0	0,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		516.452.950,00	437.614.444,75	7.551.000,00	7.550.000,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja		516.452.950,00	437.614.444,75	7.551.000,00	7.550.000,00
a.	Program	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	386.823.450,00	334.248.490,75	0	0,00
b.	Program	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	45.437.000,00	22.509.750,00	0	0,00
c.	Program	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	84.192.500,00	80.856.204,00	7.551.000,00	7.550.000,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		450.709.370,00	429.683.519,00	0	0,00
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian		450.709.370,00	429.683.519,00	0	0,00
a.	Program	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	450.709.370,00	429.683.519,00	0	0,00
IV.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		106.461.762.392,00	93.491.523.570,00	4.458.390.000,00	1.929.580.000,00
1.	Sekretariat Daerah		59.186.030.814,00	52.797.654.243,00	1.875.350.000,00	1.751.580.000,00
	Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung		335.656.550,00	259.243.906,00	0	0,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	335.656.550,00	259.243.906,00	0	0,00
	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Belitung		3.864.904.400,00	3.667.647.457,00	0	0,00
b.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.864.904.400,00	3.667.647.457,00	0	0,00
	Bagian Hukum Setda Kab. Belitung		862.493.100,00	736.587.576,00	0	0,00
c.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	862.493.100,00	736.587.576,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Belitung		1.477.582.076,00	1.189.517.154,00	0	0,00
d.	Program	Perekonomian Dan Pembangunan	1.477.582.076,00	1.189.517.154,00	0	0,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Belitung		16.129.361.450,00	14.836.193.932,00	0	0,00
e.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.129.361.450,00	14.836.193.932,00	0	0,00
f.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0	- 1.993.488,00	0	0,00
	Bagian Umum Setda Kab. Belitung		34.132.755.044,00	30.271.244.723,00	1.875.350.000,00	1.751.580.000,00
g.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.132.755.044,00	30.271.244.723,00	1.875.350.000,00	1.751.580.000,00
	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Belitung		382.524.900,00	235.345.072,00	0	0,00
h.	Program	Perekonomian Dan Pembangunan	382.524.900,00	235.345.072,00	0	0,00
	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Belitung		845.004.744,00	525.513.501,00	0	0,00
i.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.401.505,00	61.304.000,00	0	0,00
j.	Program	Perekonomian Dan Pembangunan	776.603.239,00	464.209.501,00	0	0,00
	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung		1.155.748.550,00	1.078.354.410,00	0	0,00
k.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.155.748.550,00	1.078.354.410,00	0	0,00
2.	Sekretariat DPRD		47.275.731.578,00	40.693.869.327,00	2.583.040.000,00	178.000.000,00
	Sekretariat DPRD		47.275.731.578,00	40.693.869.327,00	2.583.040.000,00	178.000.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.456.977.118,00	21.173.560.029,00	2.583.040.000,00	178.000.000,00
b.	Program	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	24.818.754.460,00	19.520.309.298,00	0	0,00
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		51.560.026.352,00	43.866.326.687,31	2.321.799.562,00	2.049.255.000,00
1.	PERENCANAAN		11.535.950.600,00	11.062.322.339,00	786.327.500,00	678.100.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		11.535.950.600,00	11.062.322.339,00	786.327.500,00	678.100.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.714.460.988,00	9.379.162.056,00	786.327.500,00	678.100.000,00
b.	Program	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.402.902.555,00	1.287.857.918,00	0	0,00
c.	Program	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	418.587.057,00	395.302.365,00	0	0,00
2.	KEUANGAN		27.123.290.429,00	21.098.999.172,00	871.137.062,00	765.595.000,00
1)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		13.224.789.662,00	10.525.202.917,00	522.269.162,00	428.250.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.215.756.237,00	7.956.127.153,00	522.269.162,00	428.250.000,00
b.	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.302.379.568,00	1.633.379.495,00	0	0,00
c.	Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.706.653.857,00	935.696.269,00	0	0,00
2)	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah		13.898.500.767,00	10.573.796.255,00	348.867.900,00	337.345.000,00
d.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.096.137.984,00	8.931.771.801,00	348.867.900,00	337.345.000,00
e.	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	288.074.090,00	183.661.494,00	0	0,00
f.	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.514.288.693,00	1.458.362.960,00	0	0,00
3.	KEPEGAWAIAN		10.865.910.123,00	9.903.392.612,31	664.335.000,00	605.560.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		10.865.910.123,00	9.903.392.612,31	664.335.000,00	605.560.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.965.076.403,00	7.523.605.282,31	664.335.000,00	605.560.000,00
b.	Program	Kepegawaian Daerah	2.900.833.720,00	2.379.787.330,00	0	0,00
4.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1.889.920.200,00	1.673.698.459,00	0	0,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.889.920.200,00	1.673.698.459,00	0	0,00
a.	Program	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.889.920.200,00	1.673.698.459,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		144.955.000,00	127.914.105,00	0	0,00
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		144.955.000,00	127.914.105,00	0	0,00
a.	Program	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	144.955.000,00	127.914.105,00	0	0,00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		12.014.251.890,00	11.542.257.102,00	472.613.990,00	408.959.000,00
	Inspektorat Daerah		12.014.251.890,00	11.542.257.102,00	472.613.990,00	408.959.000,00
	Inspektorat		12.014.251.890,00	11.542.257.102,00	472.613.990,00	408.959.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.305.701.140,00	11.041.745.300,00	472.613.990,00	408.959.000,00
b.	Program	Penyelenggaraan Pengawasan	380.424.450,00	226.115.408,00	0	0,00
c.	Program	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	328.126.300,00	274.396.394,00	0	0,00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN		31.811.671.351,00	29.797.370.221,00	612.548.558,00	491.762.925,00
	KECAMATAN		31.811.671.351,00	29.797.370.221,00	612.548.558,00	491.762.925,00
1)	Kecamatan Tanjungpandan		10.444.117.430,00	9.643.677.525,00	15.000.000,00	14.800.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.739.621.000,00	9.000.824.725,00	15.000.000,00	14.800.000,00
b.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	283.130.430,00	269.118.500,00	0	0,00
c.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	315.366.200,00	297.065.300,00	0	0,00
d.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.999.800,00	76.669.000,00	0	0,00
	Kelurahan Kota		985.606.750,00	955.976.302,00	101.800.000,00	29.420.000,00
e.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	484.125.150,00	465.352.802,00	101.800.000,00	29.420.000,00
f.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	123.375.000,00	123.375.000,00	0	0,00
g.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	310.606.900,00	302.401.100,00	0	0,00
h.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.499.700,00	64.847.400,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Kelurahan Parit		833.578.288,00	811.103.178,00	25.000.000,00	23.000.000,00
i.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	322.214.788,00	311.181.678,00	25.000.000,00	23.000.000,00
j.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	167.275.000,00	167.275.000,00	0	0,00
k.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	308.284.500,00	297.766.500,00	0	0,00
l.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.804.000,00	34.880.000,00	0	0,00
	Kelurahan Kampung Damai		892.406.000,00	850.759.646,00	0	0,00
m.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	447.647.000,00	410.214.146,00	0	0,00
n.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	132.100.000,00	132.020.000,00	0	0,00
o.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	305.709.000,00	301.575.500,00	0	0,00
p.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.950.000,00	6.950.000,00	0	0,00
	Kelurahan Paal Satu		994.080.950,00	882.294.792,00	0	0,00
q.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	387.128.350,00	352.369.492,00	0	0,00
r.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.850.000,00	221.838.300,00	0	0,00
s.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	308.254.200,00	252.694.000,00	0	0,00
t.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.848.400,00	55.393.000,00	0	0,00
	Kelurahan Lesung Batang		940.941.347,00	849.084.638,00	0	0,00
u.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	375.664.847,00	342.135.638,00	0	0,00
v.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	186.900.000,00	182.500.000,00	0	0,00
w.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	306.484.500,00	261.719.000,00	0	0,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
x.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.892.000,00	62.730.000,00	0	0,00
	Kelurahan Pangkal Lalang		1.292.994.300,00	1.278.211.149,00	0	0,00
y.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	452.592.300,00	440.699.164,00	0	0,00
z.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	378.500.000,00	378.500.000,00	0	0,00
aa.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	344.522.000,00	341.747.985,00	0	0,00
bb.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.380.000,00	117.264.000,00	0	0,00
	Kelurahan Tanjung Pendam		965.325.500,00	902.490.964,00	0	0,00
cc.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	431.135.900,00	379.725.464,00	0	0,00
dd.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	178.650.000,00	178.650.000,00	0	0,00
ee.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	321.167.600,00	311.345.500,00	0	0,00
ff.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.372.000,00	32.770.000,00	0	0,00
2)	Kecamatan Badau		3.248.515.442,00	3.173.369.030,00	114.678.558,00	102.346.000,00
gg.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.668.356.042,00	2.633.122.250,00	114.678.558,00	102.346.000,00
hh.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	132.136.300,00	123.622.980,00	0	0,00
ii.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	373.409.900,00	357.179.600,00	0	0,00
jj.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.613.200,00	59.444.200,00	0	0,00
3)	Kecamatan Sijuk		4.033.631.450,00	3.744.418.754,00	148.967.500,00	125.562.500,00
kk.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.521.801.450,00	3.237.313.627,00	148.967.500,00	125.562.500,00
ll.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	129.530.000,00	128.980.127,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
mm.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	324.550.000,00	320.375.000,00	0	0,00
nn.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.750.000,00	57.750.000,00	0	0,00
4)	Kecamatan Membalong		3.913.607.894,00	3.795.428.603,00	117.747.500,00	114.438.800,00
oo.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.316.331.344,00	3.236.248.235,00	117.747.500,00	114.438.800,00
pp.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	147.289.300,00	136.911.668,00	0	0,00
qq.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	400.000.000,00	378.022.000,00	0	0,00
rr.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.987.250,00	44.246.700,00	0	0,00
5)	Kecamatan Selat Nasik		3.266.866.000,00	2.910.555.640,00	89.355.000,00	82.195.625,00
ss.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.865.128.500,00	2.564.056.140,00	89.355.000,00	82.195.625,00
tt.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	138.145.000,00	117.698.300,00	0	0,00
uu.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	221.342.500,00	209.797.200,00	0	0,00
vv.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.250.000,00	19.004.000,00	0	0,00
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		31.997.236.460,00	30.874.710.535,00	461.750.000,00	414.400.000,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		31.997.236.460,00	30.874.710.535,00	461.750.000,00	414.400.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		31.997.236.460,00	30.874.710.535,00	461.750.000,00	414.400.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.794.514.860,00	4.231.006.759,00	416.250.000,00	369.000.000,00
b.	Program	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.294.411.300,00	1.188.686.101,00	0	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
c.	Program	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	24.092.545.300,00	24.005.412.998,00	45.500.000,00	45.400.000,00
d.	Program	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	591.050.000,00	450.532.562,00	0	0,00
e.	Program	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.224.715.000,00	999.072.115,00	0	0,00
	Jumlah		964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	74.989.800.190,00	67.145.369.203,62

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2024

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan kinerja *"gap expectation"* pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang berdasarkan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting hasil pembangunan periode sebelumnya. Sekain itu juga telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional.

Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pada periode sebelumnya, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, dengan melihat *trend*, perbandingan antar waktu, atau menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan objek tertentu perbandingan dengan standar yang berlaku dan perbandingan antar daerah/wilayah/kawasan lainnya. Selain itu juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 5 (lima) pokok masalah utama yaitu :

- Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
- Konektivitas dan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pelayanan dasar
- Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Tata Kelola Pemerintahan
- Kualitas lingkungan hidup

Identifikasi Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan dari data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung didapat dari gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilihat dari berbagai aspek – aspek pembangunan.



❖ **Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,28 persen, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2021 hingga mencapai 4,64 persen.

Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, walaupun belum mengganggu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun. Inflasi di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 berada pada angka 2,72 kemudian meningkat pada angka 3,19 di tahun 2019 dan turun menjadi 2,11 di tahun 2020. Terjadi lonjakan signifikan di tahun 2021 pada angka 4,01 dan 4,17 di tahun 2022. Komponen penyebab inflasi di Kabupaten Belitung tak bisa dilepaskan dari andil kelompok pengeluaran makan minum dan tembakau, Penyedia makanan dan minuman restoran, perumahan, listrik, air dan bahan bakar rumah tangga, transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Indeks Gini Kabupaten Belitung selama periode 2018-2022 berfluktuatif cenderung menurun dari 0,267 pada tahun 2018 terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 0,195, mengalami peningkatan menjadi 0,237 pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Belitung. Secara nasional selama lima tahun terakhir Kabupaten Belitung memiliki indeks Gini dibawah Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global.

Masalah Pokok pembangunan perekonomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan

Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan.

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perikanan budidaya, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.



2. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

3. Kurangnya daya saing pariwisata

Kurangnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenitas, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

4. Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

Tata kelola penanaman modal dan perizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

5. Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja menyebabkan masih ditemukannya pengangguranterbuka di Kabupaten Belitung. Pengangguran terbuka disebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, informasi bursa kerja yang relatif terbatas, serta kurangnya kemampuan atau kompetensi penduduk usia kerja.

❖ Permasalahan Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing sangat penting dalam pembangunan daerah karena mereka merupakan aset utama dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta meningkatkan daya saing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing:

1. Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat

Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta faktor sosial dan ekonomi. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Belitung. Tahun 2022 angka kematian ibu di Kabupaten Belitung sebesar 216,14 AKI per 100.000 kelahiran hidup.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka kesakitan dan angka kematian. Beberapa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunakan jamban yang sehat. Sampai dengan tahun 2022 persentase desa ODF (Open Defecation Free) di Kabupaten Belitung baru mencapai 53% atau masih ada 23 desa/kelurahan yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Selain itu masih tingginya kasus stunting di beberapa kecamatan di Kabupaten Belitung mengindikasikan masih rendahnya



kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun prevalensi stunting secara kabupaten di angka 6,6 pada tahun 2022 namun masih ada beberapa kecamatan dengan prevalensi diatas 14%.

3. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali

Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemiskinan, kekurangan pangan, keterbatasan sumber daya, dan degradasi lingkungan. Beberapa penyebab laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, rendahnya taraf hidup, keinginan untuk memiliki anak yang banyak, serta norma dan budaya yang mendukung kelahiran banyak anak.

4. Kurangnya akses pendidikan

Kurangnya akses pendidikan adalah salah satu masalah pembangunan yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa akses pendidikan yang memadai, masyarakat sulit untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat memicu kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan sosial. Hal ini terlihat dari angka putus sekolah di Kabupaten Belitung yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka putus sekolah di Kabupaten Belitung sebesar 0,23% meningkat dari 0,15% pada tahun 2018.

❖ Permasalahan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur pada suatu daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan, namun dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pada sebuah daerah tidaklah mudah, seringkali terdapat masalah yang dapat menghambat.

Pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect*, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, penambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Masalah terkait konektivitas dan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pelayanan dasar yaitu:

1. Kurangnya aksesibilitas antara wilayah

Kurangnya infrastruktur kewilayahan menyebabkan kurangnya aksesibilitas antara wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya perencanaan tata ruang, masih rendahnya informasi tata ruang, belum optimalnya penyelenggaraan jalan, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan laut, belum optimalnya pengelolaan pelayaran, belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, belum optimalnya pengelolaan sumber daya air.

2. Kurangnya pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air

Kurangnya pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya air. Untuk pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air tersebut perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian sumber daya air.



❖ **Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Azas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas dan 7) Asas Akuntabilitas.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin dari Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori "B" dari target yang ditetapkan "BB" dan Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori "CC".

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal

Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaannya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis elektronik.

2. Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas

Belum berkualitasnya perencanaan pembangunan dikarenakan sistem perencanaan berbasis elektronik yang diterapkan belum optimal, dan belum terintegrasinya perencanaan dengan pengendalian dan evaluasi. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia perencanaan masih kurang.

3. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal sesuai target, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

4. Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah

Rendahnya kualitas dan profesionalitas aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih belum rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Belitung.

5. Belum optimalnya pelayanan publik dengan teknologi informasi yang terintegrasi

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, belum optimalnya tindak lanjut keluhan dan aduan masyarakat, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang, serta masih kurangnya infrastruktur dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Potensi konflik karena adanya Pemilihan Umum serentak

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak berpotensi menimbulkan ketegangan politik yang dapat menjadi pemicu konflik di masyarakat sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Masih perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap masyarakat.



❖ **Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup**

Definisi lingkungan hidup telah dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Masalah lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap pembangunan baik saat ini maupun di masa depan.

Permasalahan utama terkait aspek lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi penurunan kualitas air, kualitas udara serta kualitas tutupan lahan. Selain itu perubahan tatanan perilaku selama masa pandemi Covid-19 telah membawa dampak langsung pada pengelolaan sampah, contoh kebutuhan akan masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus Covid-19. Namun perlu ada upaya mitigasi terhadap risiko penularan kembali virus Covid-19 dari sampah masker yang telah digunakan, sehingga tidak memunculkan timbulan sampah yang dapat merusak lingkungan dan selanjutnya berdampak pada kesehatan masyarakat. Berikut penjelasan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung

1. Menurunnya kualitas air, udara dan tutupan lahan

Kualitas air yang menurun disebabkan beberapa hal antara lain penggunaan bahan baku yang berpotensi mencemari air, seperti limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Kegiatan masyarakat yang meningkat di sekitar daerah hulu sungai terutama terkait kegiatan penambangan inkonvensional (TI) menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air. Pengujian kualitas air juga belum optimal dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana peralatannya. Kemudian terkait kualitas udara yang menurun dapat disebabkan banyak factor dengan satu diantaranya adalah meningkatnya emisi serta pencemaran udara ambein.

Adapun kualitas tutupan lahan yang belum optimal dikarenakan penggunaan lahan yang meningkat sehingga menjadi lahan kritis, pencadangan sumber daya alam hayati yang masih rendah serta masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Meningkatnya timbulan sampah

Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan terhambatnya pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung yang selanjutnya berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Selain itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah padahal mereka merupakan penyumbang timbulan volume sampah terbesar. Penanganan sampah melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga harus ditingkatkan. Masalah lainnya terkait sampah yaitu pengelolaan dalam hal sistem pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Gunung Sadai juga masih belum optimal.

b. Visi dan Misi

- Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Ortonomi Baru, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Rencana Pembangunan Daerah ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025. Tahap ke-4 ini masih melanjutkan pencapaian tahap ke-3, dimana fokus pada bidang ekonomi, Sumber Daya Manusia dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2025 yaitu:



“ Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”.

- Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus. Pemerintah Kabupaten Belitung, telah menetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

Misi Kesatu	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Kedua	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah;
Misi Ketiga	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Adapun dokumen perencanaan jangka menengah yang digunakan pada tahun 2024 adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung dan RTRW Kabupaten Belitung, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional. Dalam implementasi program pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.15
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026**

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	MISI KESATU : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
I	TUJUAN :	



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	
1)	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Program Penyuluh Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
17	Program Pendidikan dan Pelatihan Pengkoperasian	Dinas Perikanan
18	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas KUKMPTK
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUKMPTK
20	Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKMPTK
21	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
22	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
23	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas KUKMPTK
25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPPKBPMD
26	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora
2)	SASARAN : Menurunnya Kemiskinan Penduduk	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas KUKMPTK
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas KUKMPTK
3	Program Hubungan Industrial	Dinas KUKMPTK
4	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3)	SASARAN : Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
13	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	MISI KEDUA : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah	
II	TUJUAN : Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia	
1)	SASARAN : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Program Pengendalian Penduduk	DPPKBPM
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBPM
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKBPM
8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2)	SASARAN : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	TUJUAN : Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	
1)	SASARAN : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPRD
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
9	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	DISKOMINFO
12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
13	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOLPP
14	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
16	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
17	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesbangpol
19	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
2)	SASARAN : Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	
1	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
	MISI KETIGA : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	
IV	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
1)	SASARAN : Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Karifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup semua kegiatan yang ada di Perangkat Daerah. Uraian kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Peningkatan pelayanan BLUD
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah



- Penataan Organisasi
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD
- Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Fasilitasi Tugas DPRD

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

Kegiatan :

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

➤ **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kegiatan :

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

➤ **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Kegiatan :

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEKESAHATN DAN MAKANAN MINUMAN**

Kegiatan :

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal , Usah Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi ioleh Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Kegiatan :

- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam Promotif Prenventif Tingkat Daerah kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Kegiatan :

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota



➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Kegiatan :

- Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

Kegiatan :

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Persentase Layanan Jasa Kontruksi Tingkat Kabupaten
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

Kegiatan :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

Kegiatan :

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota

➤ **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

Kegiatan :

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

Kegiatan :

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

➤ **PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan :

- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



➤ **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

➤ **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

Kegiatan :

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Kegiatan :

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

➤ **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**

Kegiatan :

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

➤ **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

Kegiatan :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

➤ **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Kegiatan :

- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

Kegiatan :

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

➤ **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Kegiatan :

- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

Kegiatan :

- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

Kegiatan :

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**



Kegiatan :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

➤ **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Kegiatan :

- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

➤ **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

Kegiatan :

- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

Kegiatan :

- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

➤ **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

Kegiatan :

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan :

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupateng/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

Kegiatan :

- Penyimpanan Sementara Limbah B3

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

Kegiatan :

- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH



- **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kmasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
Kegiatan :
 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Sampah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**
Kegiatan :
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- **PROGRAM PENCATATAN SIPIL**
Kegiatan :
 - Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasti Kependudukan
- **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**
Kegiatan :
 - Penyusunan Profil Kependudukan
- **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
Kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**
Kegiatan :
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
Kegiatan :
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
Kegiatan :
 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**



Kegiatan :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Kegiatan :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

Kegiatan :

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Kegiatan :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

Kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

Kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Kegiatan :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

Kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Kegiatan :

- Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Kegiatan :

- Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

Kegiatan :

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

Kegiatan :



- Penyerahan, pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader kabupaten/Kota

➤ **PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

➤ **PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

Kegiatan :

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

Kegiatan :

- Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

Kegiatan :

- Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**

Kegiatan :

- Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

Kegiatan :

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

Kegiatan :

- Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

Kegiatan :



- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
Kegiatan :
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKAKAN**
Kegiatan :
 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**
Kegiatan :
 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**
Kegiatan :
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
Kegiatan :
 - Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain
- **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
Kegiatan :
 - Pengembangan prasarana pertanian
 - Pembangunan prasarana pertanian
- **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
Kegiatan :
 - Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
- **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**



Kegiatan :

- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

➤ **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**

Kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

Kegiatan :

- Pelaksanaan penyuluhan pertanian

➤ **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

Kegiatan :

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

➤ **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

Kegiatan :

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota
- Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

➤ **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Kegiatan :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Kegiatan :

- Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

➤ **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kegiatan :

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Kegiatan :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Kegiatan :

- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

- Pengelolaan pendapatan Daerah

➤ **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**

Kegiatan :



- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Kegiatan :
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Kegiatan :
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Kegiatan :
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Dan koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
Kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
Kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
Kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
Kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
Kegiatan :



- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
- **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
Kegiatan :
 - Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik
- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA**
Kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya
- **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**
Kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Bila dikaji secara mendalam ada pergeseran makna SPM pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Secara tekstual, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dengan kata lain SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam penerapannya, SPM harus berdasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan Paradigma penting lain berkaitan dengan SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Dalam belanja daerah harus ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kinerja Pemerintah Daerah tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah mencakup 6 (enam) bidang



urusan wajib yaitu bidang urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 tidak menggunakan RPJMD melainkan menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2023-2026 merupakan penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Ortonomi Baru, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Rencana pencapaian SPM juga termaktub di dalam Recana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung 2024-2026 dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) serta tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025. Kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan dalam target-target pembangunan Kabupaten Belitung, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Belitung yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :



“Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”

d. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Belitung telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Belitung Tahun 2023-2027 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2023. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Rencana aksi diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut dan harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Adapun arah kebijakan yang terkait SPM di Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2025 adalah :

A. Urusan Pendidikan

1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan
3. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD
4. Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD,SMP dan pendidikan kesetaraan)
5. Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan
6. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak
7. Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi
9. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah
10. Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat

B. Urusan Kesehatan

1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi
2. Meningkatkan desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

C. Urusan Pekerjaan Umum

1. Meningkatkan pelayanan air minum/air bersih
2. Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah

D. Urusan Perumahan Rakyat

1. Pemenuhan rumah layak huni korban bencana
2. Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

E. Urusan Sosial

1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
2. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial

F. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada skala nasional pascapandemi telah memberikan dampak positif pada proses pembangunan ekonomi di daerah yaitu baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Ibarat organ tubuh, perekonomian berfungsi layaknya jantung yang memompa darah serta mengalirkan oksigen keseluruh tubuh. Peranannya sangat vital dalam memompa denyut kehidupan suatu wilayah. Adapun gambaran indikator makro Kabupaten Belitung tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Belitung Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,49 (Persen)	74,96 (Persen)	0,631
2	Angka Kemiskinan (%)	6,46 (Persen)	6,11 (Persen)	-5,418
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) (%)	4,14 (Persen)	3,88 (Persen)	-6,280
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan /ADHK) (%)	5,74 (Persen)	1,84 (Persen)	-67,944
5	Pendapatan Per kapita (PDRB Per Kapita Per Tahun) (Rupiah)	71,365(Juta Rupiah)	73,933(Juta Rupiah)	3,598
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,253	0,248	-1,976

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH),
- Pengetahuan (*knowledge*), dan
Pengetahuan dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- Standar hidup layak (*decent standard of living*).
Standar hidup layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita.

Nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung terus mengalami kemajuan selama kurun 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung

NO	I P M	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KET
1	IPM KABUPATEN BELITUNG	74,49	74,96	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2024 mencapai 74,96. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 74,49. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 dengan nilai IPM sebesar 74,55 .

Pada tahun 2024, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 72,76, naik 0,24 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,09 tahun naik sebesar 0,19 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,05 tahun, naik 0,07 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.365.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.449.000,- per tahun.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dibandingkan pada tahun 2023 terjadi penurunan pada tahun 2024 yaitu 6,46% pada tahun 2023 kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2024.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 919.372,- atau bertambah sebesar Rp. 22.424,- dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 896.948,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 919.372,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 595.242,- pada tahun 2024 atau memiliki selisih Rp. 324.130,- dan selisih Rp. 22.242,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang sebesar Rp. 896.948,- di tahun yang sama.



Tabel 2.3
Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	6,46	6,11	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2025

2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum adanya penghasilan menyebabkan penduduk yang menganggur belum mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 3,88 menurun dari tahun 2023 sebesar 4,14. TPT Kabupaten Belitung tahun 2024 sedikit menurun dari tahun 2023 dengan selisih 0,26%.

Tabel 2.4
Persentase Angka Pengangguran Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	4,14	3,88	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2025

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mengalami penurunan begitupun dengan Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 adalah 0,77%.

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung

NO	PDRB ADHK (%)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	5,74	1,84	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2025

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung sebesar 1,84%, menurun jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,74%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan social .

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 dan tahun 2024 :



Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024(Persen)

Kategori	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	3,78
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,04	-1,68
C	Industri Pengolahan	4,91	-2,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	5,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,77	3,84
F	Konstruksi	9,19	-2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1,78	-0,67
H	Transportasi dan Pergudangan	10,51	-0,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,23	4,32
J	Informasi dan Komunikasi	13,97	10,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,28	0,32
L	Real Estate	4,25	4,51
M,N	Jasa Perusahaan	8,99	9,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	7,91
P	Jasa Pendidikan	11,04	10,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	1,53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,35	8,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,74	1,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2025

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Penghitungan pendapatan per kapita yang digunakan saat ini adalah menggunakan metode penghitungan PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. Pada Tahun 2023 PDRB Per Kapita Riil Kabupaten Belitung tercatat Rp.71.365.000,- sedangkan pada Tahun 2024, PDRB Per Kapita Riil juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.73.933.000,-

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indikator ini hanya dilakukan pengukuran di daerah tingkat provinsi. Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun angka ketimpangan pendapatan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula pada Tahun 2023 adalah 0,253 berubah menjadi angka 0,248 pada Tahun 2024. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam ketimpangan rendah. Nilai indeks Gini Kabupaten Belitung tahun 2024 berada di angka 0,248. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Gini Ratio, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Gini Ratio semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).



2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	$\frac{5.976}{6.111} \times 100\%$ $= 97,79\%$	Disdikbud	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{18.092}{18.901} \times 100\%$ $= 95,71\%$		
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{7.623}{9.918} \times 100\%$ $= 76,86\%$		
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{417}{990} \times 100\%$ $= 42,12\%$		
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{166}{192.405} \times 1000$ $= 0,86$	Dinkes	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100\%$		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{2.007}{2.411} \times 100\%$ $= 83,24\%$		
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{2.314}{2.411} \times 100\%$ $= 95,97\%$		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{2.273}{2.241} \times 100\%$ $= 101,42\%$		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{9.504}{10.275} \times 100\%$ $= 92,49\%$		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{26.875}{27.892} \times 100\%$ $= 96,35\%$		
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{105.536}{127.724} \times 100\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 82,62%		
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{18.419}{19.490} \times 100\%$ = 94,5%		
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{40.500}{53.221} \times 100\%$ = 76,09%		
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{3.025}{2.836} \times 100\%$ = 106,66%		
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{364}{323} \times 100\%$ = 112,69%		
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{4.858}{3.384} \times 100\%$ = 143,55%		
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{3.214}{3.267} \times 100\%$ = 98,37%		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{183,59}{288,37} \times 100\%$ = 63,66%	DPUPR	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	$\frac{9.375,3}{87.633,17} \times 100\%$ = 10,69%		
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{565,42}{1.077,73} \times 100\%$ = 52,46%		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{34.262}{43.044} \times 100\%$ = 79,59%	DPUPR	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{30.179}{43.044} \times 100\%$ = 70,11%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	694 = ----- x 100% = 100% 694		
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	591.765 = ----- x 100% 666.024 = 88,85%		
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	110 = ----- x 100% 418 = 48,88%		
		9. rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	10 = ----- x 100% = 19,23% 52		Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung tidak ada kejadian kecelakaan konstruksi
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	0 = ----- x 100% = 0% 0	DPUPR	Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 = ----- x 100% = 0% 0		Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	41,27 = ----- x 100% 62,01 = 66,55%		
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8.006 = ----- x 100% 43.044 = 18,59%		
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	2.318 = ----- x 100% 2.318 = 100%		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	65 = ----- x 100% 65 = 100%	SAT POL PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	16 = ----- x 100% 22 = 72,72%		
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	179.621 = ----- x 100% 179.621 = 100%	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	179.621 = ----- x 100% 179.621 = 100%		
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.377 = ----- x 100% 2.377 = 100%		
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	60 = ----- x 100% = 83,33% 72		
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	= 16,9 menit		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	130 = ----- x 100% = 100% 130	DSPPPA	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	48 = ---- x 100% 48 = 100%		
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	2 = ----- x 100% 34 = 5,88%	DKUKMPTK	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	358 = ----- x 100% 14.375 = 2,49%		
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7.638,73 = ----- x 100% 14.375 = 53,13%		
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	102 = ----- x 100% 155 = 65,8%		
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	64 = ----- x 100% 100 = 64%		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	527.091.670.494 = ----- x 100% 1.194.818.506.736 = 44,11%	DSPPPA	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	25 = ----- x 100% 26 = 96,15%		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	22 = ----- x 100.000 94.482 = 23,28		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	16.692 = ----- x 100% 20.051 = 0.083%	DKPP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2.527.164.799,14 = ----- x 100% 0 = 0%	DPMPTSP	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	13.318,37 = ----- x 100% 0 = 0%	DPUPR	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0 = ----- x 100% 0 = 0%	DPMPTSP	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0		Surat Pernyataaan Sekda Belitung
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Bagian Pemerintahan Setda	Surat Pernyataaan Sekda Belitung
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	3 = ----- x 100% 3 = 100%		
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten Belitung IKA = 57,57 IKU = 93,52 ITH = 47,12 IKLH Kab = (0.376 x IKA)+(0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) = (0.376 x 57,57) + (0.405 x 93,52) + (0.219 x 47,12) IKLH Kabupaten Belitung = 69,84	DLH	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	21.341,33 = ----- x 100% 34.947,66 = 61,06%		
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	27 = ----- x 100% 48 = 56,25%		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik	139.743 = ----- x 100% 141.164 = 98,99%	Dindukcapil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	32.325 = ----- x100% 51.241 = 63,08%		
		3. Kepemilikan akta kelahiran	53.892 = ----- x 100% 54.337 = 99,18%		
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	23 = ----- x 100% 31 = 74,19%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	= 100%	DPPKBPM	Surat Pernyataan
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1 = ---- x 100% 2 = 50%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR : 2,18	DPPKBPM	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	24.500 = ----- x 100% 31.470 = 77,85%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{2.235}{31.470} \times 100\%$ $= 7,102\%$		
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kabupaten	$= \frac{((11 \times 1/17) \times 70\%) + ((4 \times 1/10) \times 30\%)}{(0.65 \times 70) + (0.40 \times 30)} \times 100$ $= \frac{(45.5 + 12)}{100}$ $= 52,50/100 = 0,52$	DISHUB	
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten	$\frac{295,8}{1019}$ $= 0,29$		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{29}{31} \times 100\%$ $= 93,54\%$	DISKOMINFO	Topologi Jaringan
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{16}{16} \times 100\%$ $= 100\%$		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{95.631}{134.051} \times 100\%$ $= 71,33\%$		Data Penduduk Usia 17 Tahun Keatas
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{52}{146} \times 100\%$ $= 35,61\%$	DKUKMPTK	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{9.581}{21.013} \times 100\%$ $= 45,59\%$		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{1.116.727.112.505 - 1.091.899.000.000}{1.091.899.000.000} \times 100\%$ $= 2,27\%$	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{1.254}{45.970} \times 100\%$ $= 2,72\%$	DISPORA	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{34.684}{45.970} \times 100\%$ $= 75,44\%$		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	3 Medali		
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$	DISKOMINFO	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
21	Persandian	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	$\frac{443}{645} \times 100\%$ $= 68,68\%$	DISKOMINFO	
22	Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{8}{38} \times 100\%$ $= 21,05\%$	DINDIKBUD	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	= 74,14	DPKD	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	= 80,47		
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = \frac{(100+50,04+95,88+18,67)}{4}$ $= 66,15$	DPKD	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = \frac{(100+207,5+111+100+100+100)}{6}$ $= 119,75$		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di wilayah Provinsi	$\frac{41.202,26}{43.270} \times 100\%$ $= 95,22\%$	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{10.592 - 7.093}{7.093} \times 100\%$ $= 49,33\%$	DISPAR	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{276.251 - 294.777}{294.777} \times 100\%$ $= -6,28\%$		
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{181.326}{727.701} \times 100\%$ $= 24,91\%$		
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{596.850.000.000.000}{14.151.240.000.000.000} \times 100\%$ $= 4,2176\%$		
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{24.498.552.274,4}{185.033.079.282,33} \times 100\%$ $= 13,24\%$		
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{3.866,43}{584,8} \times 100\%$ $= 661,15\%$	DKPP	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{515}{1.359} \times 100\% = 37,89\%$		
28	Kehutanan		0		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
29	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0		
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{2.146}{2.146} \times 100\%$ $= 100\%$	DKUKMPTK	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{169.750}{203.850} \times 100\%$ $= 83,27$		
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{2.844}{3.493} \times 100\%$ $= 81,41\%$		
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{55}{2.352} \times 100\%$ $= 2,33\%$	DPMPTSP	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	= 0%		
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	= 0%		
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	= 0%		Surat Pernyataan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	= 0%		Surat Pernyataan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	= 75%		
32	Transmigrasi		0		



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perencanaan Dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{183.946.816.488}{1.060.980.297.208,4} = 17,33\%$	BPKAD	
		2. Rasio PAD	$\frac{185.033.079.282,33}{977.370.141.296,33} \times 100\% = 18,93\%$	BPPRD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{990.280.616.361,78-154.997.791.966,00}{1.060.980.297.208,40} = 78,72$	BPKAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	2014 = WDP 2020 = WTP 2015 = WDP 2021 = WTP 2016 = WDP 2022 = WTP 2017 = WDP 2023 = WTP 2018 = WDP 2019 = WDP	BPKAD	
32	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{3.678} \times 100\% = 0\%$	Bagian PBJ Setda	
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{3.424}{3.564} \times 100\% = 96,07\%$		
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{173.559.888.174,51}{477.561.149.836,4} \times 100\% = 36,34\%$		
		4. Presentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{209.562.695.226-150.412.129.452}{209.562.695.226} \times 100\% = 28,23\%$		
33	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{922}{1.115} \times 100\% = 82,69\%$	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{322}{1.115} \times 100\% = 28,87\%$		
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{190}{322} \times 100\% = 59,006\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
34	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1.060.980.297.208,4}{1.149.800.755.924} - 1) \times 100\%$ <p>7,72%</p>	BPKAD	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{185.033.079.282,33}{154.812.555.643} \times 100\%$ <p>= 19,52%</p>	BPKAD	
		3. Assets Management	<p>= 4</p> <p>1.Apakah ada daftar asset tetap? Ya</p> <p>2.Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya</p> <p>3.Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya</p> <p>4.Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya</p>	BPKAD	1. Neraca Audited 2. Surat Sekda dan lampiran, 3. Inventarisasi Aset atas tindak Lanjut temuan BPR-RI 4. LRA dan Neraca 2023
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{185.632.032.037}{1.232.518.939.359} \times 100\%$ <p>= 15,06%</p>	BPKAD	
35	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{591.791.732.096,34}{636.727.798.452} \times 100\%$ <p>= 92,42%</p>	BPKAD	SPJ Fungsional Diskominfo 2023
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		Dokumen pendukung : 1. Ringkasan RKA SKPD 2. Ringkasan RKA PPKD 3. Raperda APBD 4. Raperda Perubahan APBD 5. Perda APBD 6. Perda Perubahan APBD 7. Ringkasan DPA SKPD 8. Ringkasan DPA PPKD 9. LRA seluruh SKPD 10.LRA PPKD 11.LKPD yang sudah diaudit 12.Opini atas LKPD



2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

❖ Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Tahun 2024, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung. Diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2024 selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pj. Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024. Didalam dokumen Penetapan kinerja tercantum sasaran strategis, dan target setiap indikator kinerja dimaksud baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kerjanya pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	0.248 - 0.253 poin
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4.5 %
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6.40 %
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	62.84 %
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.26
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71.38 Tahun
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8.78 Tahun
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	WTP
		2. Nilai SAKIP	BB
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 - 80
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.25

❖ Pengukuran dan Analisis Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;



- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan selisih antara target dan realisasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi dan analisa guna mendapatkan strategi yang tepat untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)	>90
Berhasil (B)	75.00 – 89.00
Cukup (C)	50.00 – 74.99
Kurang (K)	0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi 1*: Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya realisasi **semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan perumusan:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{RENCANA}) - \text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, pencapaian kinerja



kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD. Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 8 (delapan) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1	Indikator
Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Indikator
Sasaran 2	Menurunnya kemiskinan penduduk	1	Indikator
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	1	Indikator
Tujuan 2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indikator
Sasaran 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Indikator
Tujuan 3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	1	Indikator
Sasaran 6	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2	Indikator
Sasaran 7	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	1	Indikator
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indikator
Sasaran 8	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	1	Indikator

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1	Rasio gini	Poin	0,248 – 0,253	0,248	100
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,5	1,84	40,89
3.	Menurunnya kemiskinan penduduk	3	Tingkat kemiskinan	Persentase	6,40	6,11	104,53
4.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	4	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	62,84	48,93	77,86
5.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,26	74,96	100,94
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka harapan hidup	Tahun	71,38	71,75	100,52
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,78	9,05	103,08



8.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	8	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	112,6
9.	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	9	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
		10	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,39
10.	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	11	Indeks Profesionalitas ASN	Skala	71 – 80 Sedang	78,63 Sedang	100
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,25	69,84	100,85

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10.: Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	10
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	1
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	1
JUMLAH			12

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11: Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembagunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1.	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	100%				SANGAT BERHASIL
2.	Meningkatnya pertumbuhan	Laju pertumbuhan ekonomi	40,89%	KURANG			



	ekonomi yang berkelanjutan				
3.	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	104,53%		SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	77,86%	BERHASIL	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah					
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,94%		SANGAT BERHASIL
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	100,52%		SANGAT BERHASIL
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	103,08%		SANGAT BERHASIL
8.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	112,6%		SANGAT BERHASIL
9.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	100%		SANGAT BERHASIL
10.		2. Nilai SAKIP	92,39%		SANGAT BERHASIL
11.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	100%		SANGAT BERHASIL
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan					
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100,85%		SANGAT BERHASIL
		JUMLAH (KET. 2 n.a)	1	0	1
					10



TUJUAN 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Capaian kinerja tujuan “Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Gini. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Gini	Skala	0,237	0.248-0.253	0,248	100	SB	0,246-0,251

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan belum bisa melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024. Capaian kinerja Indeks Gini sebesar 100% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Nilai indeks Gini Kabupaten Belitung tahun 2024 berada di angka 0,248. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Gini Ratio, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Gini Ratio semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata),” terangnya.

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Gini Ratio Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 menurun menjadi 0,248.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian indeks gini, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu, upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1



jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Data Indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.13.: Tabel Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2021-2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	0,256	0,236	0,245
Bangka	0,243	0,219	0,243
Belitung	0,195	0,237	0,253
Bangka Barat	0,248	0,211	0,199
Bangka Tengah	0,249	0,195	0,227
Bangka Selatan	0,209	0,208	0,209
Belitung Timur	0,243	0,250	0,228
Pangkalpinang	0,300	0,268	0,277

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan nilai gini ratio Kabupaten Belitung dalam jangka waktu 4 tahun terakhir (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024) berada kategori rendah yaitu berada pada posisi dibawah 0,30. Pada Tahun 2023 posisi Kabupaten Belitung berada pada nomor 2 tertinggi di ditingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah posisi pertama tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang.

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung,yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 27,10 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri.

Berdasarkan Perkembangan gini ratio Kabupaten Belitung antara Tahun 2021 s/d 2024 cenderung fluktuatif, maka upaya yang dilakukan antara lain :

- Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
- Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar. ;
- Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.

Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.

Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur sosial). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat.



Tabel 2.14.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan Meningkatkan pengendalian, pengawasan ekonomi dan pembangunan
	Sasaran 2 Menurunnya kemiskinan penduduk	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah Peningkatan sarana dan prasarana permukiman yang layak huni

SASARAN 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target “4,5”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kabupaten Belitang Tahun 2024.

Tabel 2.14.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
			RPD	Target				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,71	4,5	1,84	40,89	K	4,9



Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan tidak bias mencapai target yang ditetapkan dalam RPD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 4,5 dan terealisasi hanya sebesar 1,84 dengan capaian kinerja sebesar 40,89% dengan kategori **KURANG**.

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2024 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,10 persen dan 12,67 persen.

Berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Belitung, PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 14.151,24 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang nilainya 13.504,09 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.500,36 miliar rupiah di tahun 2023, menjadi 7.638,73 miliar rupiah di tahun 2024.

Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 865,77	1 917,39	1 989,95
Pertambangan dan Penggalian	504,01	503,81	495,33
Industri Pengolahan	833,02	873,94	852,57
Pengadaan Listrik dan Gas	10,12	10,38	10,92
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,27	2,28	2,37
Konstruksi	832,06	908,50	889,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	800,86	815,16	809,68
Transportasi dan Pergudangan	468,02	517,22	513,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261,61	288,37	300,84
Informasi dan Komunikasi	341,06	388,69	427,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,36	189,47	190,08
Real Estat	234,11	244,05	255,04
Jasa Perusahaan	22,59	24,62	26,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	414,58	442,99	478,02
Jasa Pendidikan	131,69	146,22	162,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,02	167,08	169,64



Jasa Lainnya	54,04	60,18	65,13
Produk Domestik Bruto	7 093,18	7 500,36	7 638,73

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2022 – 2024 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2024 kontribusinya sebesar Rp 1.989,95 miliar atau sebesar 27,10%. Lapangan usaha yang kedua adalah industri pengolahan sebesar 12,67%, kemudian konstruksi sebesar 11,74%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,31%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2022 – 2024 :

Tabel 2.16.: Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, ADHB

LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,90	26,59	27,10
Pertambangan dan Penggalian	5,47	4,91	4,85
Industri Pengolahan	13,15	13,02	12,67
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	11,72	12,04	11,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,93	10,61	10,31
Transportasi dan Pergudangan	7,62	8,26	8,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,03	4,13	4,22
Informasi dan Komunikasi	3,34	3,52	3,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,46	2,38
Real Estat	3,13	3,06	3,07
Jasa Perusahaan	0,33	0,35	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,30	6,17	6,45
Jasa Pendidikan	1,92	1,98	2,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,92	1,89
Jasa Lainnya	0,79	0,83	0,88

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan social .

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Pada tahun 2024 LPE Kabupaten Belitung sebesar 1,84%, menurun jika dibandingkan LPE tahun 2022 sebesar 5,71% dan juga LPE tahun 2023 sebesar 5,74%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Tabel 2.17.: Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2022–2024

LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,54	2,77	3,78
Pertambangan dan Penggalian	-0,93	-0,04	-1,68
Industri Pengolahan	8,17	4,91	-2,45
Pengadaan Listrik dan Gas	-4,03	2,52	5,20
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,74	0,77	3,84
Konstruksi	-0,88	9,19	-2,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,26	1,78	-0,67
Transportasi dan Pergudangan	36,30	10,51	-0,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,16	10,23	4,32
Informasi dan Komunikasi	10,49	13,97	10,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,03	15,28	0,32
Real Estat	5,48	4,25	4,51
Jasa Perusahaan	22,31	8,99	9,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,44	6,85	7,91
Jasa Pendidikan	2,91	11,04	10,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	9,19	1,53
Jasa Lainnya	12,22	11,35	8,23
Produk Domestik Bruto	5,71	5,74	1,84

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami penurunan begitupun dengan Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 adalah 0,77%. Angka ini lebih lambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,38%.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :

Tabel 2.18.: Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1	Bangka	4,87	4,44	-0,44
2	Belitung	5,71	5,75	1,84
3	Bangka Barat	2,01	2,50	5,47
4	Bangka Tengah	6,10	5,16	-0,34
5	Bangka Selatan	3,07	3,69	0,90
6	Belitung Timur	3,80	4,72	-0,34
7	Pangkalpinang	6,21	5,32	-2,30
	Provinsi Bangka Belitung	3,32	4,40	0,77

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025



Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2024 mengalami penurunan. Sehingga perekonomian Kabupaten Belitung menduduki peringkat tinggi ke dua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kabupaten Bangka Barat.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sector andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru, sector industry dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan;
- Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- Rendahnya daya tarik investasi dan kurangnya kemandirian fiscal yang mempengaruhi pendapatan yang mampu diperoleh daerah untuk menjalankan perekonomian, termasuk penyediaan barang publik;
- Kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya angka partisipasi murni dan lama sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri;
- perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan;
- Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- Meningkatkan kualitas SDM dengan program-program pelatihan.

Tabel 2.19.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.362.530.464	4.751.367.416	88,60%
2	Program Pemasaran Pariwisata	753.286.242	684.168.261	90,82%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	434.196.650	409.483.500	94,31%
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	104.893.950	84.836.538	80,88%
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	383.220.000	238.727.572	62,30%
6	Program Pengembangan Kebudayaan	1.044.416.400	935.011.590	89,52%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024

7	Program Pengelolaan Permuseuman	2.933.958.100	2.772.301.671	94,49%
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.352.704.010	2.315.006.616	98,40%
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	236.302.300	205.404.083	86,92%
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	117.293.000	115.467.700	98,44%
11	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.148.000	147.160.920	98,01%
12	Program Perizinan Usaha Pertanian	760.600.000	658.188.674	86,54%
13	Program Penyuluhan Pertanian	307.217.000	292.254.644	95,13%
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.740.968.750	2.484.417.800	0,00%
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	660.831.100	614.049.245	92,92%
16	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	392.983.200	359.391.480	0,00%
17	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.001.581.000	982.404.418	98,09%
18	Program Pendidikan Dan Pelatihan Pengkoperasian	0	0	0,00%
19	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	311.620.770	152.631.050	48,98%
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	432.568.600	362.575.350	83,82%
21	Program Pengembangan Umkm	363.399.600	323.667.644	0,00%
22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	41.369.050	38.947.472	94,15%
23	Program Promosi Penanaman Modal	117.430.982	114.854.419	97,81%
24	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	450.709.370	429.683.519	95,33%
25	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	45.437.000	22.509.750	49,54%
26	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	911.601.850	883.271.987	96,89%
27	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	439.498.900	435.651.334	99,12%
28	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.636.710.215	1.889.071.727	71,65%
29	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.053.838.200	5.659.328.838	93,48%

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 89,98% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 78,08% maka terdapat efisiensi 10,08 %.

SASARAN 2 : Menurunnya Kemiskinan Penduduk

Menurunnya Kemiskinan Penduduk merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Tingkat kemiskinan dengan target "6,40". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2024.



Tabel 2.20.: Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk

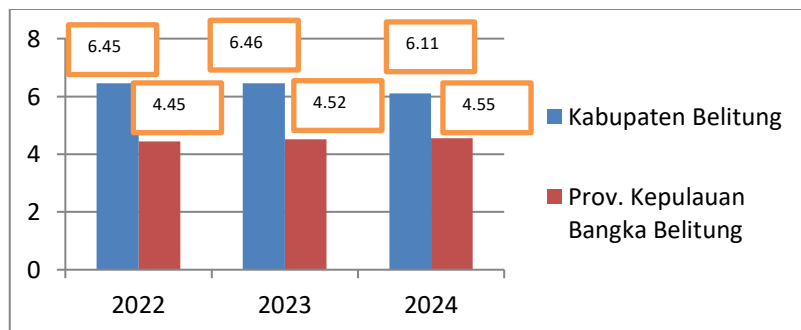
No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
			RPD	Target				
1	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,45	6,40	6,11	104,53	SB	6,2

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 6,40 dan terealisasi sebesar 6,11 dengan capaian kinerja sebesar 104,53% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi. Dengan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 6,46 kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2024.

Sama halnya di tingkat provinsi juga berfluktuatif dalam tiga tahun terakhir namun di tahun 2024 mengalami kenaikan dengan selisih 0,03% menjadi 4,55% di tahun 2024. Meski demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah nasional yaitu sebesar 6,11% pada tahun 2024. Sebagaimana tampak pada gambar perkembangan persentase penduduk miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Grafik 2.1.: Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



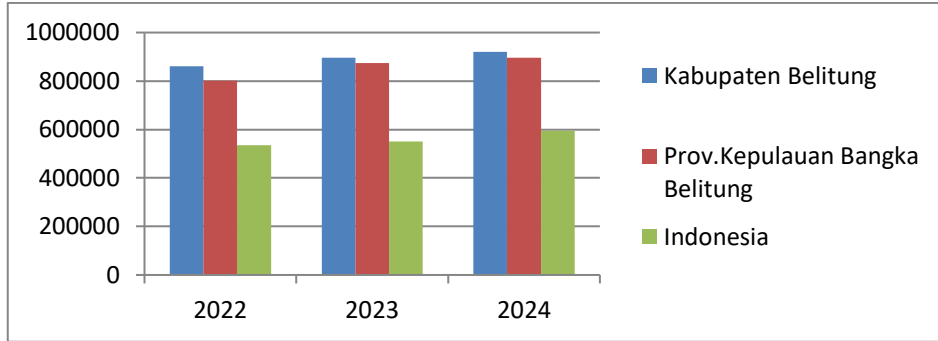
Sumber Data : BPS Belitung, 2025, diolah

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 919.372,- atau bertambah sebesar Rp. 22.424,- dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 896.948,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 919.372,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 595.242,- pada tahun 2024 atau memiliki selisih Rp. 324.130,- dan selisih Rp. 22.242,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang sebesar Rp. 896.948,- di tahun yang sama.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Belitung khususnya, antara lain disebabkan harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah. Kualitas kemiskinan diukur dengan pendekatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.



Grafik 2.2.: Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

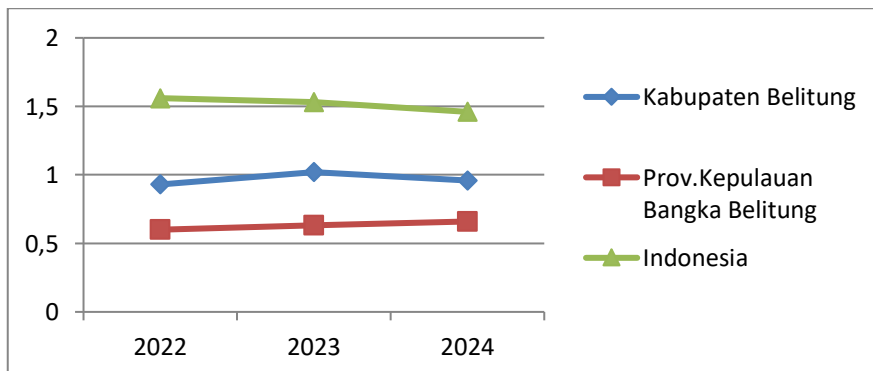


	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	860.629	801.437	535.437
2023	896.948	874.204	550.458
2024	919.372	896.948	595.242

Sumber Data : BPS Belitung, 2024, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 1,02 naik sebesar 0,09 poin dari tahun sebelumnya dan mengalami selisih penurunan 0,06 sehingga di tahun 2024 Indeks Kedalaman kemiskinan Di tahun 2024 sebesar 0,96. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin yang semakin susah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Grafik 2.3.: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	0,93	0,60	1,56
2023	1,02	0,63	1,53
2024	0,96	0,66	1,46

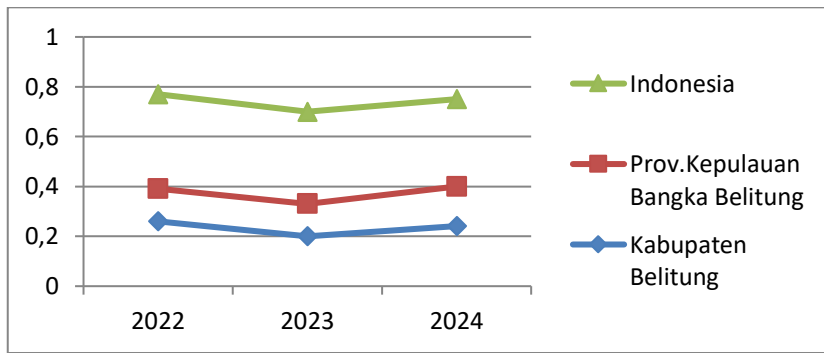
Sumber Data : BPS Belitung, 2024, diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan, menurut BPS merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2022 – 2024.

Pada tahun 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,20 dari sebelumnya menjadi 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Belitung semakin rendah.



Grafik 2.4.: Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



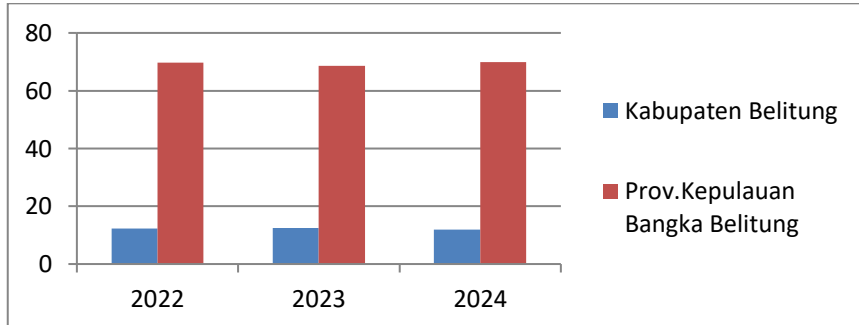
	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	0,26	0,13	0,38
2023	0,20	0,13	0,37
2024	0,24	0,16	0,35

Sumber Data : BPS Belitung, 2025, diolah

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kecenderungan berfluktuatif sebagaimana tampak pada gambar Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 11.970 jiwa dari tahun 2023 yang berjumlah 12.510 jiwa dengan selisih penurunan persentase 0,54 % .

Sebagaimana tampak pada gambar Perkembangan Jumlah Penduduk Kemiskinan (Jiwa) Kabupaten Belitung Tahun 2022- 2024.

Grafik 2.5.: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung
2022	12,34	69,69
2023	12,51	68,69
2024	11,97	69,95

Sumber Data : BPS Belitung, 2025, diolah

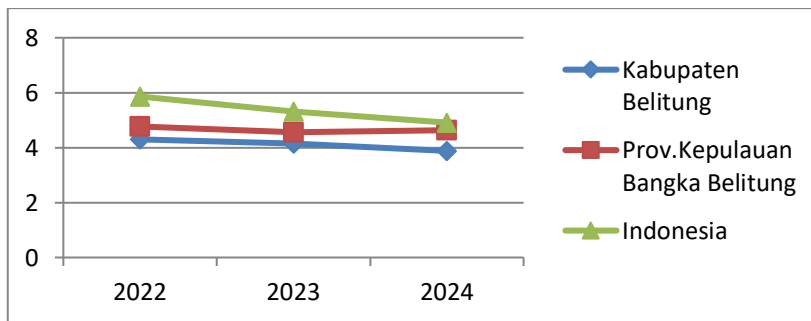
Indikator kemiskinan pada bidang ketenagakerjaan dapat dilihat pada indikator utama yaitu tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum adanya penghasilan menyebabkan penduduk yang menganggur belum mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung mengalami penurunan dalam kurun 2022-2024. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,30 % kemudian terjadi penurunan TPT Kabupaten Belitung di tahun



2023 sebesar 4,14 % dan terus mengalami penurunan dengan selisih 0,26% di tahun 2024 sehingga tingkat TPT pada tahun 2024 sebesar 3,88%. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung masih di bawah provinsi dan nasional.

Grafik 2.6.: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	4,30	4,77	5,86
2023	4,14	4,56	5,32
2024	3,88	4,63	4,91

Sumber Data : BPS, 2025, diolah

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan 10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh Negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan.

Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Kriteria kemiskinan ekstrem daerah berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendataan dan Kriteria Kemiskinan Ekstrem sebagai berikut:

- Pengeluaran tidak melebihi dari Rp322.170/individu/bulan
- Tidak memiliki alat telekomunikasi dan akses kendaraan bermotor
- Kepala keluarga tidak bersekolah/ tidak tamat SD
- Tidak mendapat akses terhadap sanitasi yang layak (sumber air bersih)
- Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
- Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas
- Tidak memiliki tempat tinggal atau tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran
- Tempat tinggal sebagian ber dinding bambu, kawat, papan, kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng.



Tabel 2.21.: Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belitung Tahun 2024 (per Maret)

Kecamatan	Desil							
	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4	
	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
Tanjungpandan	1.628	7.012	2.829	6.954	2.681	10.313	3.652	12.997
Sijuk	553	2.232	1.120	2.552	992	3.755	1.476	5.413
Membalong	682	2.400	1.227	2.847	1.010	3.451	1.386	4.536
Badau	388	1.493	671	1.789	692	2.389	789	2.590
Selat Nasik	335	1.295	238	614	204	703	243	842
Kab. Belitung	3.586	14.432	6.085	14.756	5.579	20.611	7.546	26.378

Sumber: Kemenkopmk, 2024

Berdasarkan tabel di atas, data P3KE di Kabupaten Belitung untuk data keluarga mengalami peningkatan dari sebelumnya 21.158 keluarga menjadi 22.796 keluarga pada tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah individu menurun dari sebelumnya 77.048 individu menjadi 76.177 individu. P3KE dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/ PK-BKKBN 2021 dan 2022). Sedangkan di Kabupaten Belitung, data kemiskinan ekstrem hasil verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah sebanyak 22 individu atau 10 keluarga, yang telah di SK-kan melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/539/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung.

Berdasarkan hasil musyawarah desa dan kelurahan dari lima kecamatan di Kabupaten Belitung, kemiskinan ekstrem sudah di- nol-kan dan di-SK-kan melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/495/KEP/DSPPPA/2024 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/230/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung Sebagaimana Telah diubah dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/539/KEP/ DSPPPA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/230/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu kolaborasi dan sinergi atau secara holistik, intergratif dan spasial antar stakeholder maupun pemangku kepentingan. Beberapa hal yang dapat upayakan untuk peningkatan tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya pemutakhiran data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan validasi
- Perlu adanya inovasi bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan
- Mengevaluasi kembali program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan
- Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penataan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
- Kinerja Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah perlu ditingkatkan.

Tabel 2.22.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Menurunnya kemiskinan penduduk Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	193.110.000	187.860.800	97,28%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0,00%
3	Program Hubungan Industrial	61.185.000	45.154.000	73,80%



4	Program Pemberdayaan Sosial	348.934.400	321.623.110	92,17%
5	Program Rehabilitasi Sosial	355.284.512	316.638.998	89,12%
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	644.184.050	513.269.294	79,68%

Sehingga untuk sasaran Menurunnya kemiskinan penduduk Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 86,39% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 86,41% maka terdapat efisiensi 13,61 %.

SASARAN 3 : Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

Meningkatnya infrastruktur kewilayahan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan target “62,84”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 2.23.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
			RPD	Target				
1	Persentase infrastruktur kewilayahan	Persentase	58,85	62,84	48,93	77,86	K	69,01

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator kinerja Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2024 sebesar 48,93 % dari target sebesar 62,84 %, dengan capaian kinerja sebesar 77,86 % berkategori **KURANG**.

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$(0,5 \times (\text{infrastruktur ke PUan dan permukiman})) + (0,5 \times \text{infrastruktur perhubungan})$ dimana:

Infrastruktur ke PUan dan permukiman = $(0,5 \times \text{Persentase pemenuhan infrastruktur kePUan}) + (0,5 \times \text{Rata-rata pemenuhan PSU Pemukiman})$

Infrastruktur perhubungan = $(0,5 \times \text{persentase pemenuhan pelabuhan}) + (0,5 \times \text{sarpras keselamatan jalan})$

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (0,5 \times (45,35)) + (0,5 \times 52,50) \\
 &= (22,68 + 26,25) \\
 &= 48,93
 \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman yang layak huni.

Ada 13 (tiga belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksebilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang; 2) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 3) peningkatan standar jalan kabupaten; 4) peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 5) meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air; 6) meningkatkan pengendalian sumber daya air; 7) meningkatkan konektivitas transportasi antar moda; 8) peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 9) peningkatan pelayanan keselamatan transportasi darat; 10) peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas; 11) meningkatkan konektivitas antar pulau; 12) meningkatkan pelayanan pelabuhan; dan 13) meningkatkan pemenuhan persyaratan kebutuhan pembangunan pelabuhan.

Dan ada 8 (delapan) arah kebijakan strategi peningkatan sarana dan prasarana permukiman layak huni, yaitu 1) pemenuhan rumah layak huni korban bencana; 2) pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena



relokasi program pemerintah daerah; 3) Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR: 4) Meningkatnya aksesibilitas lingkungan dan permukiman; 5) Pengurangan kawasan kumuh; 6) Meningkatkan pelayanan air minum/ air bersih; 7) Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah; 8) Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung atas sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang yang dijabarkan dalam indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 45,35% telah mencapai target.

Pemenuhan infrastruktur kePUan dan permukiman diukur menggunakan formulasi perhitungan = (0,50 x Persentase pemenuhan infrastruktur kePUan) + (0,50 x Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman). Untuk kinerja atas sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 25,57% belum mencapai target sementara untuk kinerja sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman dengan indikator kinerja pemenuhan PSU permukiman, menunjukkan indikator kinerja sebesar 65,14% telah mencapai target.

Tabel 2.24.: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an	Persen	26,17	25,57	97,71	Belum tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an = (0,25 x jalan standar kabupaten) + (0,25 x rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman) + (0,25 x rumah dengan layanan SPALD) + (0,25 x sumber daya air yang dikelola dengan baik)

Keterangan :

Persentase jalan standar = (Panjang jalan Standar kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%

$$\frac{\text{Panjang jalan standar kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$$

$$\frac{183,18}{666,02} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 27,50% dengan perhitungan Panjang jalan standar kabupaten sebesar 183,18 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yaitu 666,02 km dikali seratus persen.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman = (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman/Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung) x 100%

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{11.431}{61.297} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar 18,65 % dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar 11.431 rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu 61.297 rumah tangga dikali seratus persen.



Persentase rumah dengan layanan SPALD = (Jumlah rumah dengan SPALD/Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung)
x 100%

$$\frac{\text{Jumlah rumah dengan SPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{2.935}{38.153} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah dengan layanan SPALD adalah sebesar 7,69 % dengan perhitungan jumlah rumah dengan SPALD sebesar 2.935 rumah dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Belitung yaitu 38.153 rumah dikali seratus persen.

Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik = (0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur + (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur).

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2024 adalah sebesar 25,57%. Tingkat capaian kinerja sebesar 97,71%, dengan rincian sebagai berikut:

(0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur + (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur)

$$= (0,4 * 55,72\%) + (0,6 * 43,58\%)$$

$$= 48,44\%$$

Realisasi Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik adalah sebesar 48,44% dengan perhitungan 40% Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur dan 60% Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu readiness criteria agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.



Gambar 2.1.: Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2024

Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah kegiatan tahun 2024 hanya untuk operasional dan pemeliharaan baik itu irigasi maupun saluran air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 2.2.: Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air



Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang 375 Sambungan Rumah (SR) selama tahun 2024 sehingga terdapat penambahan sekitar 521 Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak.

Gambar 2.3.: Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2024



Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan.

Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2024.

Tabel 2.25.: Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan
1	SPAM Juru Seberang	108
2	SPAM IKK Sijuk	332
3	SPAM IKK Membalong	199
4	SPAM Desa Bantan	249
5	SPAM IKK Badau	257
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	25
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	92
9	SPAM Kws. Tanjung batu	272
10	SPAM IKK Selat Nasik	350
	Jumlah	1952

Sumber : UPT PAM DPUPR Kab. Belitung, 2025



Gambar 2.4.: Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi



Gambar 2.5.: Pengambilan Sampling Air



Gambar 2.6: Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung dan Kegiatan UPT PAM Tahun 2024

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.



Gambar 2.7.: Kegiatan Pembangunan SPALD Tahun 2024

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub



kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem darinase perkotaan serta sub kegiatan pembangunan sistem darinase lingkungan. Pada Tahun 2024 panjang drainase yang sudah dibangun adalah sepanjang 1.046 meter.



Gambar 2.8.: Kegiatan Pengembangan Sistem Darinase Tahun 2024

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
- Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dnegan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan untuk lokasi dimaksud sudah dilaksnakan oleh pihak lain yaitu BPIW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Tidak adanya anggaran untuk mendukung terhadap ketercapaian indikator kinerja dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
- Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Tabel 2.26.: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen	64,52	65,14	100,96	tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025



Sasaran ini merupakan sasaran startegis untuk urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan PSU Permukiman. Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut :

Pemenuhan PSU Permukiman

Target kinerja pada tahun 2024 untuk indikator pemenuhan PSU Permukiman sebesar 64,52%. Pada Tahun 2024, indikator pemenuhan PSU permukiman yang terealisasi sebesar 65,14% atau mencapai 100,96% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 2.27.: Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52	65,14

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 65,14% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan PSU Permukiman = (0,25 x jalan lingkungan) + (0,25 x RTH) + (0,25 x RLH korban bencana) + (0,25 x RLH korban relokasi program pemerintah)

Keterangan :

- Persentase jalan lingkungan = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%;
- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.
- Dengan menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan PSU permukiman pada tahun 2024 adalah sebesar 65,14% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,96%, dengan rincian sebagai berikut :
- Persentase jalan lingkungan didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 3 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta program pengembangan perumahan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 2.28.: Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Pemenuhan PSU Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,80 %	99,80 %	100,00	tercapai



2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	66,02 %	48,42 %	73,34	belum tercapai
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	100,00 %	0,00 %	0,00	belum tercapai

Sumber : DPUPR Kab. Belitung, 2025

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai tingkat capaian kinerja 100% sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni, dimana untuk tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) unit rumah rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 73,34% yaitu dari target sebesar 66,02% yang terealisasi sebesar 48,42%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung sistem palayanan minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2024 tidak terjadi bencana.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
- Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- Adanya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program pemerintah seperti program stunting dan pengentasan kemiskinan.
- Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
- Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Gambar 2.9.: Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman





Tabel 2.29.: Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Realisasi			
		Panjang	Satuan	Lebar Rata-rata	Satuan
1	Program Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
1	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	258,0	M	1,2 s.d 2,5	M
	1 a. Gang Rambutan, Kampong damai	118,0	M		M
	2 b. RT04/RT05 Perbatasan (Jalan Kik Bujang)	140,0	M		M
2	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	249,0	M	1,0 s.d 2,0	M
	3 a. Gang Depan Kantor Pos, Jl. Merdeka	200,0	M		M
	4 b. Gang Kelinci, Kel. Kota	49,0	M		M
3	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Parit	339,0	M	1,2 s.d 2,2	M
	5 a. Jalan Veteran Lingkungan RT 03 (Dekat Nafisa)	123,0	M		M
	6 b. Jalan Depan Toko Mas Hero	216,0	M		M
4	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	419,0	M	3,0	M
	7 a. Jalan Muallim Dalam	419,0	M		M
5	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Paket 1 (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	890,0	M	3,0	M
	8 a. Jalan Peternakan	310,0	M		M
	9 b. Jalan Lingkar Dusun	580,0	M		M
6	- Peningkatan Jalan Lingkungan Handayani P2IP/Haryani (Lanjutan)	100,0	M	4,0	M
	10 a. Jalan Handayani P2IP/Haryani	100,0	M		M
7	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan	1.725,8	M	3,0 s.d 4,0	M
	11 a. Jalan Kenanga	177,0	M		M
	12 b. Gang Duren	96,0	M		M
	13 c. Jalan Berlian	371,0	M		M
	14 d. Jalan Jerat Nangka	481,0	M		M
	15 e. Jalan Muallim Dalam	148,8	M		M
	16 f. Jalan Bina Insani	452,0	M		M
8	- Peningkatan jalan Lingkungan Kecamatan Sijuk	879,0	M	3,0 s.d 4,0	M
	17 a. Jalan Padat Karya	265,0	M		M
	18 b. Jalan Kik Janggau	292,0	M		M
	19 c. Jalan Aik Dulang (Pesantren Putra)	322,0	M		M
	Jumlah	4.859,8	M		
	Total Panjang Jalan Lingkungan	4.013,8	M		
	Total Panjang Jalan Setapak	846,0	M		

Sumber : Bidang Perkim Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pada Sasaran strategis terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan dengan indikator rasio konektivitas memiliki rumus:

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Dimana :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
- IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)
- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)



4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas:

Sedangkan sasaran strategis dari meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari Rata-Rata Volume kapasitas jalan/Kapasitas Jalan. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat memiliki formulasi Jumlah dari Nilai rata rata tertimbang/ Nilai unsur pelayanan.

Berikut data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan:

Tabel 2.30.: Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Trayek		Jarak	Jumlah Trayek	
	Dari	Ke		Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Tanjung Binga	37	1	1
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1
8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi –via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1
13	Dalam Kota Tanjungpandan 1		15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2		15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
Jumlah				17	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut : $(11 \times 1) / 17 = 0,65$

Tabel 2.31.: Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%



7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
TOTAL		10 Lintasan	4 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)
 $(4 \times 1) / 10 = 0,40$

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

$$= ((11 \times 1 / 17) \times 50) + ((4 \times 1 / 10) \times 50)$$

$$= (0,65 \times 50) + (0,40 \times 50)$$

$$= 32,50 + 20,00$$

$$= 52,50$$

Nilai 52,50 ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan terhadap lintas trayek.

Dukungan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.32.: Rekapitulasi Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		81
3	Mobil Barang	Pick Up	405
		Box Pick Up	84
		Truck	313
		Box Truck	71
		Tangki	35
		B.Khusus	3
4	Kereta Tempelan		0
5	Kereta Gandengan		0
Total			992

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Tabel 2.33.: Rekapitulasi Data Kendaraan Tidak Lulus Uji Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		26
3	Mobil Barang	Pick Up	45
		Box Pick Up	26



	Truck	78
	Box Truck	39
	Tangki	14
	B.Khusus	2
4	Kereta Tempelan	0
5	Kereta Gandengan	0
	Total	230

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Keterangan:

Jumlah Kendaraan di Uji Tahun 2024 : 222 Unit

Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji Tahun 2024 : 992 Unit

Jumlah Kendaraan yang Tidak Lulus Uji Tahun 2024 : 230 Unit

Tabel 2.34.: Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Tahun 2024

No	Jenis Sarana Prasarana/ Faskes	Kebutuhan s/d		Capaian											
		2024		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
1	Rambu Lalu Lintas	2937	Unit	3847	Unit	1967	Unit	1967	Unit	2027	Unit	2067	Unit	2083	Unit
2	Trafic Light	39	Titik	7	Titik	27	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik
3	Warning Light	91	Titik	15	Titik	21	Titik	79	Titik	81	Titik	82	Titik	84	Titik
4	Deliniator	2601	Unit	20	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1947	Unit	1947	Unit
5	Guard Rail	15	Titik	7	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
6	RPJ	200	Unit	120	Unit	132	Unit	132	Unit	138	Unit	138	Unit	138	Unit
7	Pita Penggaduh	36	Titik	18	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik
8	Paku Marka	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
9	Cermin Tikungan	50	Titik	0	Titik	10	Titik	10	Titik	35	Titik	46	Titik	73	Titik
10	Marka Jalan	25	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik
11	Zebra Cross	60	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	46	Titik
12	Papan Nama Jalan	300	Unit	116	Unit	170	Unit	170	Unit	206	Unit	206	Unit	206	Unit
13	RPA	11	trayek	9	trayek	10	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek
14	Trayek	150	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit
15	Bus, Terminal, Halte	35	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit
16	Penerangan Jalan Umum	5,519	Unit	3,433	Unit	4,015	Unit	4,080	Unit	5,014	Unit	7,471	Unit	7,471	Unit

Dari total kebutuhan sampai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 persentase yang tercapai untuk fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan adalah sebesar 73,45 %. Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu:

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, termasuk pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan;
- Fokus pada peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan dan perbaikan fasilitas umum;
- Meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak swasta untuk mempercepat implementasi proyek dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor transportasi.



Tabel 2.35.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2.210.442.886	2.075.728.700	93,91%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	694.710.000	693.614.500	99,84%
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	0	0,00%
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	318.770.000	293.079.556	91,94%
7	Program Penyelenggaraan Jalan	31.029.143.598	27.886.493.473	89,87%
8	Program Pengembangan Perumahan	83.946.803	0	0,00%
9	Program Kawasan Permukiman	0	0	0,00%
10	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000	605.084.000	99,39%
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32%
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	14.236.573.550	14.023.642.642	98,50%
13	Program Pengelolaan Pelayaran	1.587.392.600	1.453.475.555	91,56%

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 93,59% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 87,22% maka terdapat efisiensi 6,41 %.

TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia. Capaian kinerja tujuan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	73,38	74,26	74,94	100,94	SB	74,95

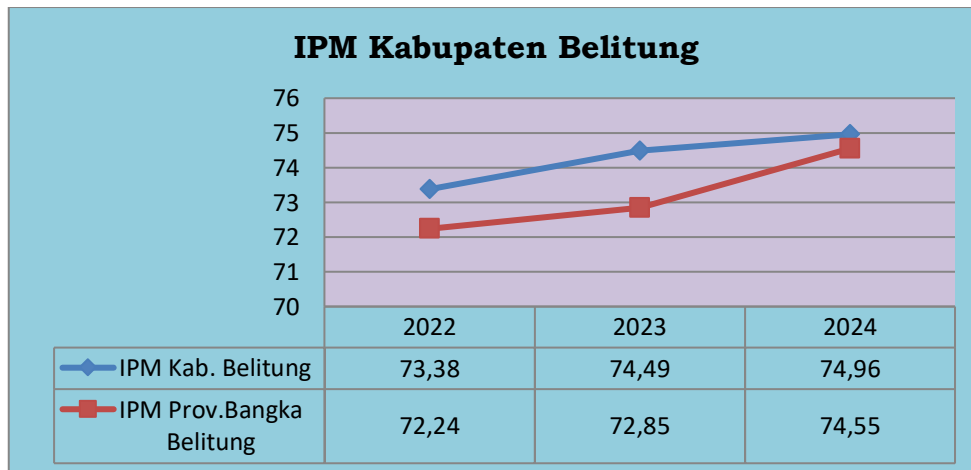
Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,94% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.



IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Capaian Nilai IPM Kabupaten Belitung (Grafik 3.1) selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 73,38 pada tahun 2022 hingga mencapai 74,96 atau berada pada capaian “tinggi” ($70 < IPM < 80$; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dengan nilai 74,49. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada tahun 2024 tercapai sebesar 74,55, nilai IPM Kabupaten Belitung tercapai lebih tinggi 0,41 poin. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2022 – 2024 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.7.: Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 80,90 kategori Sangat Tinggi. Namun Nilai IPM Kabupaten Belitung berada dibawah nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 74,39 menjadi 75,02 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,63 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2022 - 2024:



Tabel 2.37.: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2022 – 2024

URAIAN	TAHUN		
	2022	2023	2024
Belitung Timur	72,29	73,31	73,62
Bangka	72,95	74,49	74,66
Bangka Tengah	71,40	72,36	72,54
Bangka Barat	70,12	71,13	71,36
Bangka Selatan	67,95	69,67	70,01
Belitung	73,38	74,49	74,96
Pangkal Pinang	79,24	80,45	80,90
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,24	72,85	74,55
Indonesia	72,91	74,39	75,02

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Selama kurun waktu 2022 – 2024, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2022 – 2024.

Tabel 2.38.: Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup	71,31	72,52	72,76
2	Harapan Lama Sekolah	11,89	11,90	12,09
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,74	8,98	9,05
4	Pengeluaran per Kapita	14.045	14.365	14.449

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Pada tahun 2024, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 72,76, naik 0,24 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,09 tahun naik sebesar 0,19 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,05 tahun, naik 0,07 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.365.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.449.000,- per tahun.



Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.39.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan

SASARAN 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

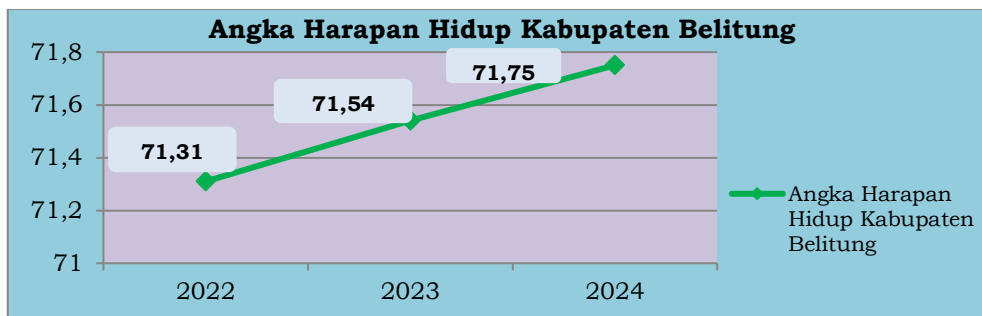
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Angka Harapan Hidup dengan target “71,38”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 2.40.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi 2024		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPD 2026 Target
			Awal RPD	Target				
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,31	71,38	71,75	100,52	SB	72,00

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2024 dari target 71,38 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 71,75 tahun atau 100,52% dari target kinerja. Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Grafik 2.8.: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024



Sumber: Belitung Dalam Angka 2024



Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Tabel 2.41.: Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2022 – 2024

Wilayah Babel	TAHUN		
	2022	2023	2024
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	70,98	71,23	71,49
Bangka	71,37	71,60	71,80
Belitung	71,31	71,54	71,75
Bangka Barat	70,25	70,43	70,59
Bangka Tengah	71,82	72,11	72,36
Bangka Selatan	68,68	68,98	69,24
Belitung Timur	72,33	72,59	72,85
Pangkal Pinang	73,68	73,96	74,24

Sumber: Website BPS Provinsi Kep.Bangka Belitung <https://babel.bps.go.id>

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai usia harapan hidup di Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan, jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Belitung. Setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan jumlah Puskesmas 9 unit pada 5 Kecamatan, dengan jumlah puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah.

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan, tahun 2024 seluruh Puskesmas di Kabupaten Belitung telah dilakukan akreditasi dengan rincian tingkatan sebagai berikut:

Tabel 2.42.: Tingkatan Akreditasi Puskesmas Tahun 2024

No	Puskesmas	Tingkatan Akreditasi	Masa berlaku
1	UPT Puskesmas Selat Nasik	Paripurna	16 November 2023 s.d 16 November 2028
2	UPT Puskesmas Badau	Paripurna	21 November 2023 s.d 21 November 2028
3	UPT Puskesmas Tanjung Binga	Paripurna	05 Desember 2023 s.d 05 Desember 2028
4	UPT Puskesmas Membalong	Paripurna	06 Desember 2023 s.d 06 Desember 2028
5	UPT Puskesmas Simpang Rusa	Paripurna	12 Desember 2023 s.d 12 Desember 2028
6	UPT Puskesmas Perawas	Paripurna	14 Desember 2023 s.d 14 Desember 2028



7	UPT Puskesmas Sijuk	Paripurna	15 Desember 2023 s.d 15 Desember 2028
8	UPT Puskesmas Air Saga	Paripurna	20 Desember 2023 s.d 20 Desember 2028
9	UPT Puskesmas Tanjungpandan	Paripurna	21 Desember 2023 s.d 21 Desember 2028

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai usia harapan hidup di Kabupaten Belitung adalah :

- Optimalnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat
- Menekan Angka Kesakitan (Morbidity) yang terealisasi, diukur dengan Jumlah Kunjungan Sakit dibagi Jumlah Penduduk di Kali 100%. Target kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 33,71. Nilai Angka Kesakitan (Morbidity) yang terealisasi sebesar 26,98 tahun 2024 capaian 119,96 % dari target 2024 sebesar 33,71 ,dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 2.43.

Nilai Angka Kesakitan (Morbidity) yang terealisasi sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 sebesar 26,98 % diperoleh Jumlah Kunjungan Sakit dibagi Jumlah Penduduk di Kali 100% yaitu (51,247 / 189,945 x 100% = 26,98%).

Tabel 2.43.: Penyakit terbanyak tahun 2024

No	Jenis Penyakit	Jumlah kunjungan
1	I10-Essential (primary) hypertension	5,187
2	J00-Acute nasopharyngitis [common cold]	4,396
3	K30-Dyspepsia	4,050
4	J06.9-Acute upper respiratory infection, unspecified	3,261
5	M79.1-Myalgia	2,440
6	J06-Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	2,321
7	I11-Hypertensive heart disease	1,973
8	E11-Non-insulin-dependent diabetes mellitus	1,892
9	A09-Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1,723
10	K04.1-Necrosis of pulp	1,406

Tabel 2.44.: Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	Realisasi	Persentase(%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2007	83,24
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2314	95,98
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2273	101,43
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9504	92,5
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.875	96,35
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	105.536	82,63
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.419	94,5
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita	40.396	75,9



Hypertensi				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus		3.025	106,67
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		364	112,69
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB		4.858	143,56
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		3.214	98,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024

Adanya Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Tabel 2.45 Inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan 2024

NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan					
	a. AMBONG	Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada balita kurus dan ibu hamil KEK berupa pemberian makanan tambahan dan pelayanan asistensi berupa konsultasi dan pendampingan dari petugas kesehatan kepada keluarga sasaran	Menurunkan angka Stunting dan Wasting pada Balita, dan Ibu hamil KEK dan Balita Wasting mendapat PMT	Balita dan bumil KEK	1. Orientasi kader gizi dan petugas gizi 2. Pemberian Susu bagi ibu hamil yang kurang mampu 3. Pemberian PMT Lokal yang dilakukan di masing-masing puskesmas	Inovasi ini masih berjalan
	b. PELANDUK	Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan masyarakat terpusat dan terintegrasi yang bemutu, terjamin kepastian dan profesional.	Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat maupun pelayanan perawatan kesehatan masyarakat	Masyarakat yang terkendala mengakses pelayanan kesehatan	Pelanduk mendatangi masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobil dengan menggunakan kendaraan bermotor	Masih berjalan sampai saat ini terutama untuk kegiatan PERKESMAS di tingkat Puskesmas



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	c. SEHATI	<p>1. Mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan bidang kesehatan dan pelayanan publik</p> <p>2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan masyarakat terpusat dan terintegrasi yang bemutu, terjamin kepastian dan profesional.</p>	<p>Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengurus rujukan terpusat pada Loker SEHATI di RSUD dr. H. Marsidi Judono</p>	<p>Masyarakat yang di rujuk ke Rumah Sakit Luar Daerah Kabupaten Belitung</p>	<p>Biaya transportasi pasien dan pendamping (pergi dan pulang), biaya ambulan pasien duduk atau pasien berbaring, biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah, uang pendampingan rujukan</p>	<p>Masih berjalan sampai saat ini</p>
		<p>3. Memberikan pelayanan rujukan di Loker SEHATI selama 24 jam berupa (informasi tentang rujukan pasien, tiket pasien dan pendamping, transportasi dan akomodasi pasien, kepastian pelayanan kepulangan baik pasien dalam keadaan hidup/meninggal)</p>				
2	Puskesmas Tanjungpandan					
	a. Urisan PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	<p>Untuk meningkatkan capaian atau kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan dengan</p>	<p>Terjaminnya kualitas kesehatan masyarakat</p>	<p>Usia produktif (15-59 tahun) usia lanjut (60 ke atas)</p>	<p>1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar</p> <p>2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar</p>	<p>Inovasi ini masih dijalankan sampai dengan saat ini, dikarenakan target sasaran belum tercapai 100 persen.</p>



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	dan Usia Lanjut)	efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditetapkan.			3. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar 4. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	
	BEDULANG (Besame Posyandu Lancar Nimbang)	Terpantaunya pertumbuhan semua balita dan ibu hamil di posyandu dan masalah-masalah gizi bayi dan balita serta ibu hamil di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjungpandan.	Masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil dapat segera diketahui secara dini dan dapat dilakukan upaya-upaya untuk mencegah permasalahan tersebut.	Semua bayi dan balita yang ada di wilayah UPT Puskesmas Tanjungpandan	Pelayanan pemantauan status gizi bayi dan balita di posyandu melakukan penimbangan secara langsung bayi dan balita, pemberian konsultasi pada bayi, balita yang mengalami masalah gizi.	Inovasi ini masih dijalankan sampai dengan saat ini, dikarenakan target sasaran belum tercapai 100 persen.
	KOPIASIK (Skrining Kelompok Beresiko Bila Ketemu Kasus Segera Terapi Jaga Privasi ODHIV Kawal Pengobatan)	menjaring kelompok beresiko dan segera di tindaklanjuti	Skrining Kelompok Beresiko	Ibu Hamil, LSL, Waria, WPS, Pasien TB, Penasun	Skrining, Pengobatan, Pemantauan	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	PELANGI (Pasien Lama di kunjungi Kembali)	Untuk Menemukan Pasien Baru	Dengan kegiatan pelangi untuk menemukan pasien baru yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien TB yang sudah sembuh	Pasien TB yang sudah sembuh 1, 2, 3 Tahun yang lalu dan keluarga yang kontak dengan pasien TB	Kunjungan Rumah	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
3	Puskesmas Air Saga					



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	a. Marisahak (Mari Periksa Dahak)	<p>Tujuan Umum: Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara memutuskan mata rantai penularan sehingga penyakit TB tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat</p> <p>Tujuan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan penemuan kasus TB secara aktif dan / massif berbasis keluarga dan masyarakat2. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang TB3. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan tentang penularan TB di lingkungan masyarakat	Target SPM semua terduga TB di periksa sesuai standar telah mencapai target Kabupaten	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan lintas program dan integrasi program2. Melakukan kegiatan lintas sektor di wilayah kerja puskesmas3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa /Kelurahan4. Melakukan kegiatan pengambilan sampel dahak pada sasaran di Puskesmas, Pustu, posyandu, RT, tempat pengajian, Hotel, cafe dan panti pijat, sekolah dan instansi pemerintahan dan swasta, dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2024	inovasi terus berjalan sampai saat ini
	b. Ketan bu Jian (Periksa Kesehatan Ibu-ibu Pengajian)	Mendeteksi sedini mungkin penyakit tidak menular pada ibu ibu pengajian		Ibu ibu pengajian usia 15 tahun keatas	Pemeriksaan tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat.	Inovasi terus berjalan sampai saat ini



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	c. Lampu Hias (Melampun Hygienis di Puskesmas Air Saga)	Menanamkan pola kebiasaan sarapan pagi sesuai prinsip hygiene dan sanitasi kepada masyarakat yang datang berkunjung ke Puskesmas Air Saga	Memberikan edukasi mengenai pentingnya sarapan bersih dan sehat kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi pasien yang datang ke puskesmas sebelum memulai aktifitas	Pasien rawat jalan yang berkunjung ke Puskesmas Air Saga	Menyajikan sarapan berupa snack dengan menu sehat yang berbeda setiap harinya sesuai siklus, diletakkan di dekat meja pendaftaran puskesmas. Sarapan disajikan setiap pagi dihari kerja puskesmas	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	d. Yuni Shara (Youtube Edukasi Puskesmas Air Saga)	Menyebarkan informasi seputar kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Tersebarnya informasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengakses Youtube	Semua lapisan masyarakat, tanpa batasan usia, jenis kelamin dan wilayah, yang mengakses Youtube, khususnya Channel "Puskesmas Air Saga Belitung"	Edukasi seputar kesehatan dalam bentuk Video dan akan dikembangkan dengan membuat podcast yang membahas isu kesehatan dan video hasil editan diunggah ke channel youtube milik UPT Puskesmas Air Saga dengan nama channel "Puskesmas Air Saga Belitung"	Inovasi sudah berjalan meskipun belum optimal, dan untuk podcast sudah mulai membuat rancangan konsep untuk skenario alur cerita, untuk peralatan masih menggunakan peralatan pribadi, dari perangkat smartphone, tripod, microphone wireless dan pendukungnya yang dibutuhkan.
	e. Pindang Patin (Pemeriksaan dan Edukasi Gigi pada Calon Pengantin)	Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut bagi calon ibu hamil sedini mungkin, yaitu pada masa sebelum pernikahan, melalui edukasi catin	Memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagi catin sebagai salah satu	Pasangan catin yang datang ke UPT Puskesmas Air Saga	Pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dan mulut bagi calon pengantin.	Inovasi terus berjalan sampai saat ini



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
			persiapan untuk kehamilan			
	f. Pasar Berehun (Puskesmas Air Saga Bersama Pantau SPM Tahunan)	Monitoring evaluasi yang berkelanjutan untuk capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) 100% di UPT Puskesmas Air Saga	Agar capaian SPM di UPT Puskesmas Air Saga dapat di pantau, di monitoring dan dievaluasi secara bersama-sama baik oleh pengelola program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor)	Masyarakat, Pengelola Program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor	Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi SPM	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	g. KEREMUNTING (Kegiatan Rembuk Terpadu Menurunkan Stunting) di UPT Puskesmas Air Saga	Meningkatkan pelayanan dan penguatan program penanggulangan stunting sehingga bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat luas dan masyarakat yang memiliki anak stunting dan membantu serta mendukung pemerintah dalam melaksanakan intervensi spesifik penurunan stunting dalam bidang kesehatan dan mencegah terjadinya peningkatan kasus stunting di wilayah UPT Puskesmas Air Saga	Remaja putri, ibu hamil, ibu nifas, dan balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga	Edukasi dan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri, Gerakan Aksi Bergizi (Rematri Fokus Minum Tablet Tambah Darah bersama), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus, Home Visit (Kunjungan Rumah) Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Bayi dan Balita dengan Masalah Gizi (Weight	Inovasi ini melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait, seperti : Promosi Kesehatan, Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Dokter Puskesmas, Imunisasi, Sekolah, serta Desa/Kelurahan. 85% kegiatan sudah berlangsung di tahun kemarin dan akan dimaksimalkan di tahun ini	Inovasi sudah berjalan meskipun belum optimal



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
				Faltering), wasting, underweight, serta beresiko stunting/stunting , Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu dan Poli Gizi Puskesmas, Gerakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Balita, Stimulasi Deteksi Intervensi dan Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pemberian Vitamin A Dosis Tinggi secara Rutin bagi Balita, Pemberian Vitamin A Dosis Tinggi untuk Ibu Nifas, Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi kader kesehatan wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga, Refreshing Kader Kesehatan wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga, Pemicuan 5 Pilar STBM		



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
				(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Poli Stunting (Pelayanan UKP Terpadu UPT Puskesmas Air Saga)		
4	Puskesmas Perawas					
	A. Silansing (Sistem Pelayanan Vaksinasi Keliling)	Meningkatkan akses layanan vaksinasi kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau vaksinasi di fasilitas kesehatan atau pos pelayanan	Meningkatkan cakupan vaksinasi	Masyarakat yang terkendala mengakses layanan vaksinasi di faskes dan pos pelayanan	Bersama kader kesehatan Melakukan kunjungan rumah dan memberikan vaksinasi terhadap sasaran yang terkendala datang ke faskes atau pos pelayanan	Masih berjalan terutama untuk vaksinasi rutin balita
	B. Segar Manis (Sehat Bugar Bersama Program Penyakit Kronis)	Tersedianya wadah kepada penderita penyakit kronis hipertensi dan DM dalam memperoleh informasi dalam upaya menjaga kesehatannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para penderita penyakit kronis	Meningkatkan pengetahuan peserta Prolanis tentang penyakit kronis dan meningkatkan kekeluargaan peserta Prolanis sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan menekan penyakit tidak menular	Peserta BPJS memiliki penyakit kronis (Diabetes Melitus tipe II dan Hipertensi)	Penyuluhan dan rekreasi, waktu 1x/bulan menyesuaikan, tempat menyesuaikan, anggaran BPJS	Masih berjalan rutin
	C. Mukat (Melakukan Investigasi Kontak TB)	Meningkatkan penemuan kasus dan mencegah penularan TBC di masyarakat	Meningkatkan capaian pelayanan SPM	Kontak penderita TBC dan kelompok beresiko	Mengumpulkan data kontak yang pernah berhubungan terhadap penderita TB kemudian melakukan screening TB terhadap kontak	Masih berjalan rutin



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
					tersebut. dengan melibatkan kader kesehatan atau pos kelompok kesehatan kerja. Kegiatannya bisa menyesuaikan, bisa dilakukan di faskes atau menjemput bola	
5	Puskesmas Badau					
	a. Jerami (Jelajah Rumah Terintegrasi)	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Terjadi Peningkatan IKS	Semua Keluarga di Desa Ibul	Melakukan intervensi lanjut sesuai masalah kesehatan masing masing keluarga	Masih Berlanjut
	c. Siskamling MRT (Skrining Kesehatan Masyarakat Keliling Masjid dan RT)	Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat usia produktif dan lansia	Terlaksananya skrining kesehatan	Masyarakat usia produktif dan lansia	Pemeriksaan kesehatan/skrining ke masjid dan RT secara berkala	Masih Berlanjut
	h. Dara Keriting (Dapur Keluarga Untuk Kelola Stunting)	Menurunkan angka Stunting	Peningkatan pengetahuan keluarga dalam mengelola menu keluarga untuk penanganan Stunting	Ibu Rumah Tangga (khususnya keluarga stunting dan Ibu Hamil)	Pelatihan dan demo mengelola makanan keluarga untuk penanganan dan pencegahan stunting	Masih Berlanjut
	i. Sabu Saja (Satu Bulan , Satu Jamban)	Meningkatkan angka akses jamban sehat	Tersedianya akses jamban sehat warga	Keluarga yang belum memiliki akses jamban sehat	Melakukan pembangunan jamban setiap bulan melalui gotong royong, kerjasama dengan desa dan CSR	Masih Berlanjut
	m. Penjaga Di Hati (Penjaringan dan Pengendalian Penyakit Diabetes dan Hipertensi)	terjaringnya dan Mengendalikan penyakit Diabetes dan Hipertensi	Mengurangi angka kesakitan dan komplikasi penyakit	Penderita Hipertensi dan Diabetes	Pemeriksaan rutin kesehatan, cek darah dan konseling obat,gizi penderita HT DM	Masih Berlanjut
6	Puskesmas Sijuk					



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	a. Lumpia Sujuk	Pemberian Sertifikat kepada balita yang telah lulus penimbangan sampai usia 5 tahun	Meningkatkan minat orang tua balita untuk mengunjungi posyandu setiap bulan	Balita	Pemberian sertifikat kepada balita yang telah lulus posyandu, dilaksanakan di posyandu	Berjalan dengan bekerjasama dengan desa
	b. Markisa Sujuk	Untuk mengurangi sampah di wilayah kerja sujuk	Membersihkan lingkungan	Wilayah kerja sujuk	Gotong royong dalam membersihkan sampah	Berjalan
	c. Gorong Batik	Pencegahan penyakit DBD	Mengurangi kejadian kesakitan DBD di masyarakat	Masyarakat	Gotong royong dalam pemberantasan jentik dengan melakukan PSN 3M Plus	Berjalan, bekerjasama dengan lintas sektor
	d. Masdarini	Menerapkan kebiasaan ber PHBS dirumah tangga	terbentuknya kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan PHBS dikehidupan sehari-hari	Masyarakat di wilayah kerja	kunjungan rumah dan pembinaan PHBS	Berjalan
	e. Penyuk Baja	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di tempat kerja	Skrining kesehatan pada pekerja	Karyawan/ pekerja	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan (tensi, DM, dll)	Berjalan kerjasama pengelola PTM dan kesjaor
	f. Bersahabat	Berobat sebelum batuk hebat (mengurangi risiko TBC)	Menghindari terjadinya penyakit yang lebih parah dikarenakan batuk	Masyarakat yang berobat	Skrining pada pasien yang batuk	Berjalan
	g. Doger Pedes	Adanya kegiatan home visit bertujuan sebagai upaya kesehatan masyarakat secara holistik mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah	Meningkatkan kemandirian dan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, meningkatkan hubungan tenaga medis dan pasien, dan sebagai kegiatan promosi kesehatan yang	Masyarakat di wilayah kerja	Kunjungan rumah meliputi pemeriksaan kesehatan dan promosi kesehatan	Berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
		kehatan	sebaiknya dilakukan secara rutin			
	h. Ngenjugak	Mendeteksi dini penyakit tidak menular, memberikan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan DM sesuai standar, Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko PTM	Mengurangi risiko PTM	Masyarakat di wilayah kerja	Skrining dan kunjungan rumah, melakukan deteksi dini PTM	Berjalan
	i. Batu Bedil	Bank Darah Untuk Bersiap Dulu Menuju Bersalin	tersedianya calon pendonor darah bagi ibu hamil yang belum memiliki calon pendonor darah, khususnya untuk bumil yang memiliki resiko tinggi	Masyarakat di wilayah kerja yang sudah terbiasa dan bersedia menjadi calon pendonor darah	Membentuk sebuah grup yang terdiri dari calon2 pendonor darah yang sewaktu waktu bumil memerlukan darahnya, calon tersebut siap dan bersedia	Berjalan
7	Puskesmas Tanjung Binga					
	Healthy Traveling by SIMPKI (Wisata Sehat oleh Keluarga Simpor Laki)	Menjalin kerja sama lintas sektor dengan penggiat wisata berupa pembinaan protokol kesehatan khususnya selama pandemi, pembinaan IRTP, pembinaan jasa catering, pembinaan homestay, penginapan/ hotel dan P3K	Melaksanakan pelayanan kepada objek dan pelaku wisata yang berada diwilayah UPT Puskesmas Tanjung Binga.	Pelaku dan objek wisata	Pemeriksaan Tekanan darah, Berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, peemriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, iva test	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	Plesir Simpki SEHATI (Patroli Ambulans Air SIMPKI SEHATI)	memberikan pertolongan cepat pada kondisi sakit/ kecelakaan berupa patroli ambulans air pada hari Sabtu dan Minggu	Tujuan dari Kegiatan PLESIR SIMPKI SEHATI adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan khususnya di bidang kepariwisataan di kawasan perairan.	Yang menjadi sasaran dalam kegiatan PLESIR SIMPKI SEHATI adalah wisatawan dan penggiat wisata di Pantai Tanjung Kelayang dan pulau-pulau disekitarnya.	Tim PLESIR SIMPKI SEHATI berkeliling di seputar pantai dan pulau sekitar hingga pos Kesehatan di Pulau Lengkuas.Tim melakukan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan. Berkoordinasi dengan Tim UGD UPT Puskesmas Tanjung Binga untuk menindaklanjuti kejadian yang harus dirujuk.	berjalan
	Pelayanan Akupresur dan Pijat Relaksasi	Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur pada Pasien	memberikan pengobatan dengan akupresur dan pijat relaksasi untuk pengobatan tradisional	pasien yang dirujuk oleh dokter untuk di berikan layanan ini	memberikan pelayanan akupresur dan pijak relaksasi kepada seluruh pasien yang dirujuk oleh dokter	
	Kerapu Asam Garam (Kreasi ramuan jamu dan asuhan mandiri TOGA Masyarakat)	Untuk Memberikan Hasil Olahan TOGA yang Berupa Ramuan Jamu pada Pasien	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatannya sendiri melalui pelayanan kesehatan tradisional asuhan mandiri TOGA dan Akupresur.	1. Ramuan seleraja disajikan kepada 20 pasien antrian pertama dan tamu yang berkunjung ke UPT Puskesmas Tanjung Binga pada kegiatan tertentu. 2. Sasaran pelayanan akupresur yaitu pasien yang memiliki gejala dan telah disetujui dokter untuk dilakukan	Menyajikan Ramuan Seleraja kepada tamu yang berkunjung ke Puskesmas Tanjung Binga. - Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara membuat Ramuan Seleraja.	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
				akupresur (3-5 Pasien Per Hari) 3. Sasaran penyehat tradisional yang didata berjumlah 14 penyehat tradisional yang terdaftar pada laporan UPT Puskesmas Tanjung Binga. 4. Sasaran asuhan mandiri yaitu minimal ada 1 kelompok asuhan mandiri di setiap desa dan setiap kegiatan program lain bisa diisi dengan penyuluhan tentang toga dan akupresur		
	Galeri SIMPKI	Menjadi galeri promosi industri rumah tangga pangan, industri kreatif, ramuan tradisional dan jamu binaan Puskesmas	memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM dan mempromosikan hasil karya UMKM binaan	seluruh pengunjung	menjual hasil UMKM binaan	berjalan
	TANJAK Si SIMPKI (Tanya Jawab Kesehatan Streaming bersama Simpor Laki)	Sebagai inovasi penyuluhan di saat pandemi dengan memberikan Informasi Kesehatan dalam jaringan Kepada Masyarakat melalui sosial media	kegiatan inovasi ini adalah sebagai inovasi penyuluhan disaat pandemic dengan memberikan informasi kesehatan dengan media sosial kepada masyarakat.		1.Petugas membuat jadwal dan tema yang akan dijadikan topik 2. Petugas berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor 3. Petugas menyiapkan lokasi dan alat untuk melakukan streaming 4. Petugas dan narasumber	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
					menyampaikan informasi (materi penyuluhan) melalui facebook 5. Petugas membuka sesi tanya-jawab dengan audience yang menonton melalui kolom komentar 6. Petugas menutup kegiatan streaming	
	Cempedak Masak (Cek Penyakit Tidak Menular di Hari Bemasak)	Meningkatkan Cakupan Skrining Kesehatan Usia (15-59)	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik	Sasaran dari kegiatan CEMPEDAK MASAK adalah masyarakat yang berusia 15-59 tahun, yang memiliki atau tidak memiliki faktor resiko PTM di lokasi pesta/ kenduri	Membentuk tim dan koordinasi kegiatan CEMPEDAK MASAK Bersama Ketua Pokja UKM, lintas program dan lintas sektor berkoordinasi dalam penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan Mensosialisasi kegiatan CEMPEDAK MASAK. Mensosialisasikan jadwal dan tempat pelaksanaan kepada Pihak Desa dan Kader Kesehatan Menginformasikan dan izin dengan tuan rumah pesta/kenduri Bersurat dan tatap muka kepada Pihak Tuan rumah yang akan diadakan pelaksanaan	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
					kegiatan CEMPEDAK MASAK Pemeriksaan Kesehatan Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, mengukur tekanan darah. Pemeriksaan Laboratorium Melakukan Pemeriksaan Laboratorium Sederhana berupa, pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol Konseling Kesehatan Melakukan konseling kesehatan sesuai dengan masalah Kesehatan Rujukan Kegiatan rujukan ke UPT Puskesmas Tanjung Binga dengan pemanfaatan sumber daya tersedia termasuk respon cepat sederhana dalam penanganan prarujukan	
	Peyek Ikan (Penyuluhan Edukasi dan Informasi di Rawat Jalan)	memberikan informasi dan edukasi untuk pasien rawat jalan	meningkatkan pengetahuan masyarakat	seluruh pasien yang berkunjung		berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	Mutik Sahang (Mutik Saran dan Harapan Pengunjung)	mengumpulkan saran dan harapan dari pasien maupun pengunjung yang datang ke Puskesmas Tanjung Binga	meningkatkan pelayanan puskesmas	seluruh pasien yang berobat	memberikan kertas untuk menuliskan saran dan harapan kepada pasien yang berkunjung	berjalan
	Mempelam (Menu GERMAS untuk Pasien Melampun)	Untuk Mendukung Sekaligus Mempromosikan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang memeriksakan diri ke Puskesmas.	Sasaran dari kegiatan Mempelam adalah 20 Pasien antrian pertama pada Pelayanan Rawat Jalan di UPT Puskesmas Tanjung Binga	1.Mempelam disajikan dengan mematuhi hygiene penyajian makanan dengan porsi perorangan. 2. Mempelam diletakkan di rak Mempelam yang terletak di ruang tunggu pasien pendaftaran. 3. Mempelam disajikan untuk 20 pasien antrian pertama pelayanan rawat jalan.1.	berjalan
	PELUK MESRA SIMPKI (Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Serentak oleh Keluarga Simpor Laki)	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan kunjungan lapangan lintas program UKM secara serentak	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu siklus hidup untuk mencapai masyarakat sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat	seluruh masyarakat dalam siklus hidup	Melakukan Pemeriksaan Tekanan Darah b. Melakukan Pemeriksaan Berat badan dan Tinggi Badan c. Melakukan Skrining Kesehatan seluruh siklus hidup d. Melakukan Pemeriksaan Darah e. Memberikan Edukasi Kesehatan	berjalan
8	Puskesmas Membalong					



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	a. Begadai (Begalor Bujang Dayang)	Menjaring dan melakukan pemeriksaan kepada remaja di wilayah kerja Puskesmas membalong dalam kegiatan Posyandu Remaja	Meningkatkan capaian kunjungan remaja, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi, mencegah kenakalan remaja dan pernikahan dini	Usia remaja 10-18 tahun di wilayah kerja puskesmas Membalong	Melakukan pemeriksaan Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar perut, Lingkar Lengan, cek Hb dan pemberian KIE terkait Kesehatan Reproduksi	Kegiatan berlangsung setiap bulan
	b. Ceklis Rupa (Ceklis 10 indikator Rumah Tangga)	Pemantauan rumah tangga yang sudah Ber PHBS	Meningkatkan kualitas kesehatan melalui kesadaran masyarakat dalam menjalani perilaku kehidupan sehari hari yang bersih dan sehat	Seluruh Rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan 10 indikator PHBS di Rumah tangga	kegiatan berlangsung setiap bulan
	c. Bekemas (Bejamban Kerjasama Lintas sektor)	Mendorong masyarakat untuk akses jamban sehat	Mengurangi penyakit berbasis lingkungan terkait BAB sembarangan dan meningkatkan PHBS	Seluruh Rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Verifikasi	kegiatan berlangsung setiap bulan
	d. SIBIRU (Swiiping Ibu Hamil Baru)	Menjaring ibu hamil baru yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan ke petugas kesehatan di fasyankes	Meningkatkan capaian ibu hamil baru dan menurunkan angka K1 akses	Seluruh ibu hamil baru yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan informasi dari kader, masyarakat terkait keberadaan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas membalong yang belum melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan, waktu pelaksanaan fleksibel berdasarkan	Kegiatan sampai saat ini masih berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
					informasi	
	e. Sirih Merah (Cek tensi dan Gula darah dari rumah ke rumah)	Mendeteksi dini dan menemukannya secara awal adanya faktor resiko Penyakit tidak menular pada masyarakat usia 15-59 tahun	Mencegah faktor resiko penyakit tidak menular secara dini	seluruh masyarakat usia 15-59 tahun	Melakukan pemeriksaan Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar perut, cek gula darah dan pemberian KIE terkait penyakit tidak menular	kegiatan berlangsung setiap bulan
	f. Kawal Imunisasi (Kartu jadwal Imunisasi Bayi dan Baduta)	Memudahkan orang tua bayi/balita untuk mengingat jadwal imunisasi anaknya sesuai dengan usianya	Meningkatkan cakupan imunisasi dan mencegah penyakit PD3I	Orang tua bayi/balita yang diimunisasi	Kegiatan ini dilakukan di setiap posyandu dengan memberikan kartu jadwal imunisasi kepada orang tua bayi/balita yang baru pertama kali datang untuk imunisasi, dan petugas mencatat imunisasi yang diberikan sesuai tanggal pemberian dan mengingatkan kembali waktu untuk anak imunisasi selanjutnya	Kegiatan masih berlangsung
	g. Perawan Ceking (Peduli Rahim wanita dengan cek iva keliling)	Mendeteksi secara dini kanker leher rahim pada wanita usia subur yang sudah menikah	Meningkatkan capaian iva test dan mendeteksi secara dini kanker leher rahim	Seluruh Wanita yang sudah pernah menikah	Melakukan pemeriksaan iva test dengan menggunakan asam cuka	Kegiatan masih berlangsung



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	h. Gerubak (Gerakan orang tua peduli 1000 hari kehidupan)	Meningkatkan pelayanan preventif kasus stunting	Mengurangi angka stunting	Ibu hamil K1 yang memeriksakan diri ke Puskesmas dan Ibu hamil di kelas ibu hamil	Melakukan KIE pada ibu hamil yang melakukan K1 di Puskesmas dan Kelas ibu hamil	Kegiatan sudah berjalan
9	Puskesmas Simpang Rusa					
	a. SANGU KETAN (Sambil nunggu antrian nonton video kesehatan)	Memberikan informasi mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit kepada pasien yang sedang menunggu antrian	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan pencegahan penyakit pada pasien	Pasien dan keluarga pasien yang sedang menunggu antrian	Melakukan pemutaran video kesehatan dan informasi pencegahan penyakit, dilakukan pada saat jam pelayanan di laksanakan di ruang tunggu antrian pasien	Masih berjalan
	b.MARTABAK (Mari Akselerasi Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis)	Mencegah terjadinya sakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC	Sebagai pengobatan pencegahan bagi masyarakat sehat yang kontak erat dengan penderita positif TBC	Kontak serumah dan kontak erat penderita positif TBC	1. PP TB melakukan investigasi kontak 2. Kontak serumah atau kontak erat dilakukan mantouk tes dan telah dibaca oleh dokter pemeriksa bila hasil > 10 mm (1 cm) pasien di rujuk ke poli DOTS bila < 10 mm (<1 cm) pasien di observasi dan dilakukan pemeriksaan menggunakan algoritma pemeriksaan ILTB 3. Kontak serumah/ kontak erat yang berisiko	Masih berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
					mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis	
	c. SOSIS PERIGI (Sosialisasi dan Aksi Sikat Gigi Bersama Pojok Edukasi gigi)	1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut 2. Menekan angka kejadian karies anak	Membantu upaya promotive dan preventive kesehatan gigi dan mulut di wilker pkm simpang rusa, masyarakat mengetahui cara menjaga kesehatan gigi dan mulut	Anak Kelas 1 SD dan orang tua	1. Pembuatan video edukasi tentang bagian – bagian rongga mulut dan fungsinya, serta cara menjaga Kesehatan gigi dan mulut. 2. Sosialisasi dan edukasi berupa penyuluhan dengan media edukasi berupa video kepada anak kelas 1 SD beserta orang tua di luar Gedung wilayah kerja UPT Puskesmas Simpang Rusa 3. Sosialisasi dengan media video edukasi yang diunggah melalui media sosial resmi UPT Puskesmas Simpang Rusa (Facebook) 4. Aksi sikat gigi Bersama anak sekolah dasar 5. Pemberian lembar KASIH (Kalender Sikat Gigi Harian) dan sticker	Masih berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
	d. CEMARA (Cek Kesehatan Masyarakat Ramai)	Mencapai cakupan skrining uspro 100%	Masyarakat berperilaku CERDIK dan terkendalinya PTM	Usia 15-59 tahun	1. Kegiatan penggalan informasi faktor risiko dengan wawancara sederhana tentang riwayat PTM pada keluarga dan diri peserta, aktifitas fisik, merokok, kurang makan sayur dan buah, serta informasi lainnya 2. Kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, tekanan darah. 3. Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran 4. Skrining PUMA untuk perokok usia >40 tahun. 5. Kegiatan pemeriksaan gula darah, kolesterol total dan asam urat (jika stik ada) 6. Kegiatan konseling dan penyuluhan 7. Kegiatan rujukan ke Puskesmas jika dibutuhkan.	Masih berjalan
	e. DARLING (Dapur Balita Cegah Stunting)	Memberikan pengetahuan kepada ibu balita tentang makanan yg bergizi untuk mencegah	Meningkatkan pengetahuan ibu balita dan mencegah terjadinya masalah gizi pada	Ibu bayi balita/ keluarga balita/pengasuh balita yang ibu pekerja	Penyuluhan dan demo masak	Masih berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
		terjadinya stunting pada balita	anak dengan masalah gizi kurang, gizi buruk, stunting dan obesitas			
10	Puskesmas Selat Nasik					
	a. Asyira	Untuk menurunkan angka kesakitan Penyakit Tidak Menular	Meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, serta membiasakan pola hidup sehat	Anak-anak, Remaja, Usia Produktif, dan Usia Lanjut	Senam Bersama, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan	Masih berjalan
11	RSUD dr.H.Marsidi Judono					
	a. Belungkak	Membantu pasien atau keluarga untuk mendapatkan akta kelahiran bayi baru lahir di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono tanpa harus datang ke Dinas Disdukcapil	Memberikan kemudahan bagi pasien / keluarga yang melahirkan di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	Seluruh bayi hidup yang lahir di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	Membantu pengurusan penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir, dengan cara menyampaikan seluruh kelengkapan berkas administrasi, dalam waktu kurang lebih 7 hari kerja	Proses perpanjangn Kerjasama dengan Dinas jependudukan dan Catatan Sipil Setempat
	b. Simino	Mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran rawat jalan, secara online melalui aplikasi SIMINO atau Website resmi UPT RSUD dr.H. Marsidi Judono	Memberikan kemudahan pendaftaran pasien rawat jalan tanpa harus datang langsung ke RS, dapat memonitoring antrian serta jadwal pelayanan dokter. Pasien / keluarga dapat langsung datang pada saat hari pelayanan tanpa antrian panjang dan tidak perlu	Seluruh masyarakat yang akan menggunakan layanan rawat jalan	Pendaftaran online melalui aplikasi SIMINO atau Website resmi UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	Masih Berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
			datang pagi-pagi			
	c. Sehati	Mempermudah pasien / keluarga pasien (Kepesertaan BPJS PBI) baik rawat jalan maupun rawat inap dalam hal perujukan pasien ke luar daerah Kabupaten Belitung	Memberikan keringanan bagi pasien / keluarga (Kepesertaan PBI) dalam proses perujukan pasien ke luar daerah baik pasien rawat jalan maupun rawat inap	Seluruh pasien kepesertaan BPJS PBI yang membutuhkan perujukan ke luar daerah	Proses pengurusan administrasi perujukan pasien ke luar daerah	Masih Berjalan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung 2024

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesehatan individu tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistic dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai factor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Rekomendasi/ solusi untuk permasalahan tersebut adalah pertama-tama penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau harus menjadi prioritas, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan perawatan primer.

Selain itu, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan kebersihan pribadi. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik. Kurikulum sekolah, dan kampanye komunitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Dalam menghadapi kompleksitas tentang ini, kolaborasi antara pemerintah, sector swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil adalah kunci. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam rangka harapan hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tabel 2.46.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	92.103.300.354	82.388.443.512	89,45%



2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.010.001.840	1.757.355.549	87,43%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	396.331.000	384.421.200	96,99%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	508.160.000	412.078.291	81,09%
5.	Program Pengendalian Penduduk	104.732.500	98.271.520	93,83%
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	985.567.050	922.629.503	93,61%
7.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.875.716.000	2.521.470.292	87,68%
8.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	119.964.378	105.704.936	88,11%
9.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.097.500	55.585.786	97,35%
10.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	96.259.100	92.219.709	95,80%

Sehingga realisasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan capaian 89,40% dengan persentase rata-rata capaian 91,14% maka terdapat efisiensi 10,60%.

SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat" diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2024 yang ditetapkan adalah 8,78 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

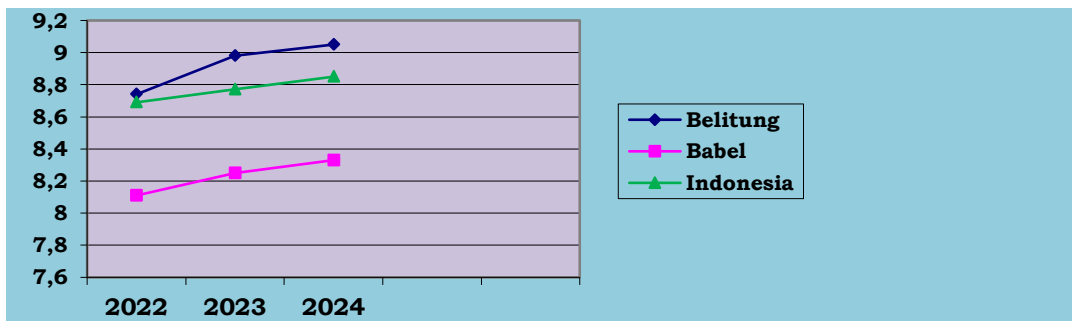


Tabel 2.47.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN SATUAN	KONDISI AWAL RPD	2024		CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPD 2026
			TARGET	REALISASI			
1	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun	8,74	8,78	9,05	103,08	SB	8,82

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabuapten Belitung tahun 2024 sebesar 9.05 tahun. Realisasi ini melampaui target sebesar 3,08%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2022 sampai 2024.

Grafik 2.9. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2022 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2022 – 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung. Dan jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung 9,05 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,33 tahun, dan capaian nasional sebesar 8,85 tahun. Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 10 (sepuluh) arah kebijakan, yaitu:

- Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
- Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD dan SMP dan pendidikan kesetaraan);
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- Meningkatkan penyelenggaraan PAUD;
- Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
- Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan tenaga kependidikan;
- Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi;
- Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah; dan
- Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat.

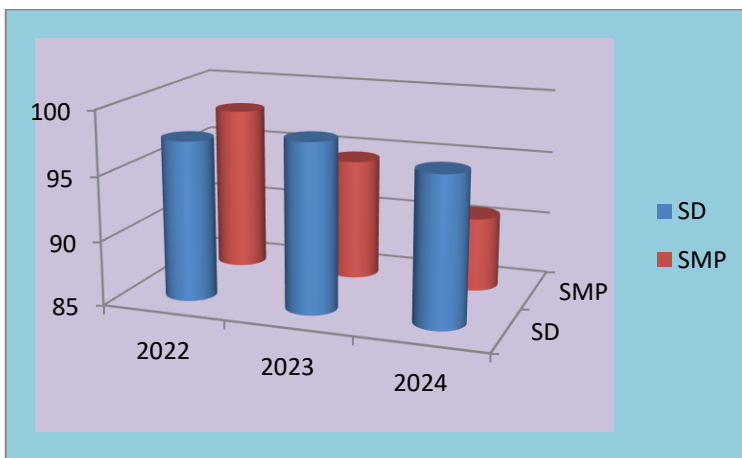
Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).
Angka Partisipasi Kasar (APK)



Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2024:

Grafik 2.10.: Perkembangan APK Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Pada tahun 2024 APK jenjang SD tertinggi berada di Kecamatan Badau yaitu sebesar 103,93%, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan sijuk yaitu sebesar 90,62%. Sama hal dengan APK jenjang SD, untuk APK jenjang SMP tertinggi juga berada di Kecamatan Badau yaitu sebesar 94,46% dan terendah di Kecamatan selat nasik yaitu sebesar 66,97%. Atau dari 327 penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP di Kecamatan Selat Nasik hanya 219 orang, artinya masih ada 108 penduduk yang berusia 13-15 tahun yang tidak menempuh pendidikan jenjang SMP, hal ini bias terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang mungkin masih bersekolah di jenjang SD ataupun memilih bersekolah di kecamatan lain dan atau masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang memang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Terlihat bahwa APK SD/MI di Kabupaten Belitung berfluktuatif cenderung menurun. Hal tersebut perlu mendapatkan evaluasi yang komprehensif oleh pemerintah daerah sehingga perencanaan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah di SD/MI/Paket A di Kabupaten Belitung terus meningkat. Sama halnya dengan APK jenjang SD, pada APK jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meurun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan dan intervensi di dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B memberikan kesempatan kepada anak-anak usia SMP/MTs untuk bias melanjutkan pendidikan mereka. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar disekolah juga mendorong semakin banyak anak-anak usia SMP yang bias bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.



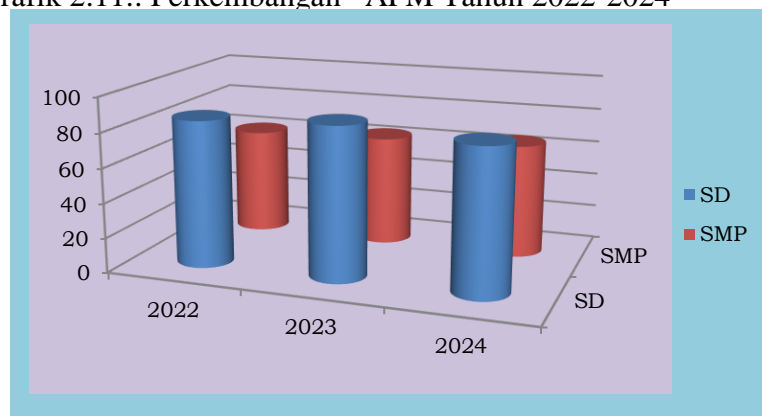
Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2024.

Grafik 2.11.: Perkembangan APM Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Tren penurunan APM yang terjadi baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs dipengaruhi berbagai factor, antara lain ketidakmerataan infrastruktur pendidikan hingga danya regulasi terkait zonasi sekolah yang telah diberlakukan memberikan dampak terhadap turunnya APM SD. Angka APM kurang dari 100% berarti terdapat anak usia SD maupun SMP yang bersekolah sebelum usia berdasarkan ketentuan atau ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bias sekolah melalui sekolah formal, anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara home shoolling, anak drop out sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggapi gap yang ada.

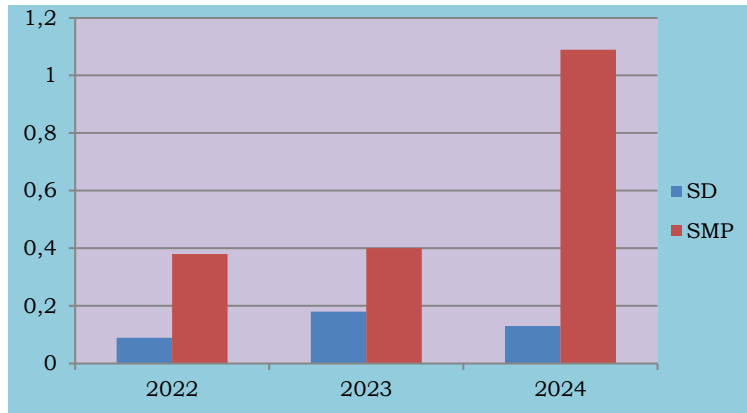
Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut:



Grafik 2.12.: Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitang Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

APS pada penduduk berusia 7-12 tahun berfluktuatif pada rentang 2020-2024 dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,19%. kemudian tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 0,07% dan kembali meningkat pada tahun berikutnya menjadi 0,18% namun pada tahun 2024 kembali turun menjadi 0,13% atau sebanyak 25 anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah. Sementara itu pada tahun 2024 terdapat 95 orang penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Belitang yang putus sekolah atau sebesar 1,09% melonjak jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 0,4% atau sebanyak 35 orang. hal ini bisa disebabkan beberapa faktor seperti terjadi pernikahan usia anak, faktor ekonomi, ataupun ketidakmauan anak untuk bersekolah.

Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024 pada bulan Agustus, jumlah anak putus sekolah di Indonesia berjumlah 4,6 juta orang dengan rincian data rata-rata pada jenjang sekolah menengah. Hal ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah namun juga sampai ke pemerintah pusat, bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah angka putus sekolah yang semakin meningkat melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat sasaran.

Kecamatan Tanjungpandan menjadi kecamatan dengan jumlah putus sekolah paling tinggi jika dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya yaitu berjumlah 13 anak putus sekolah usia 7-12 tahun dan 57 anak putus sekolah usia 13-15 tahun pada tahun 2024. Sedangkan Kecamatan Selat Nasik pada tahun 2024 untuk usia 7-12 tahun sebanyak 2 anak yang putus sekolah sedangkan tidak ada yang putus sekolah untuk usia 13-15 tahun.

Angka putus sekolah di Kabupaten Belitang tergolong cukup rendah jika dilihat dari grafik. Selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 angka putus sekolah tidak pernah melebihi 1 % artinya masih tergolong cukup rendah. meski demikian pemerintah tidak boleh mengabaikan hal ini karena setiap tahun angka semakin meningkat. Peran orang tua, sekolah maupun lingkungan sangat mempengaruhi minat dan motivasi anak untuk bersekolah sehingga pemerintah perlu bersinergi untuk menciptakan program-program positif yang melibatkan anak-anak usia sekolah sehingga bisa menjaga minat dan motivasi mereka untuk terus bersekolah.

Sementara untuk angka putus sekolah pada penduduk usia 13-15 tahun meningkat tajam pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,09% dari sebelumnya 0,4% pada tahun 2023. hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menemukan faktor penyebab putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan mencari solusi yang tepat sehingga jumlah angka putus sekolah bisa ditekan dan tidak bertambah.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

- 1) Melakukan Pembinaan secara Intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah
- 2) Melalui bidang Teknis Melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan responsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan:

- 1) Melakukan Pembinaan secara intensif kepada sekolah untuk melakukan antisipasi dan pemetaan terhadap siswa yang rentan putus sekolah.
- 2) Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk mencegah angka putus sekolah melalui kesadaran kolektif masyarakat



Tabel 2.48.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2024/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	7	7	29	26	252	255
Tanjungpandan	21	20	117	113	1.371	1.369
Badau	4	4	20	19	139	118
Sijuk	9	10	39	45	335	312
Selat Nasik	1	1	5	5	31	28
Belitung	42	42	210	208	2.128	2.082

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Tabel 2.49.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2022/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	30	30	253	263	2.493	2.449
Tanjungpandan	45	45	611	585	10.851	10.737
Badau	17	17	141	147	1.549	1.561
Sijuk	22	22	203	207	2.954	2.908
Selat Nasik	7	7	52	55	495	496
Belitung	121	121	1 260	1 257	18.342	18.151

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Tabel 2.50.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2024/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	5	5	69	73	961	972
Tanjungpandan	15	15	276	272	4.825	4.875
Badau	3	3	46	47	755	751
Sijuk	4	4	79	82	1.314	1.293
Selat Nasik	2	2	18	22	241	217
Belitung	29	29	488	496	8.096	8.108

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD di tiap kecamatan, peningkatan dan penurunan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP dan guru yang memasuki masa pensiun. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualitas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat" melalui dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Program, yaitu:

- Program Pengelolaan Pendidikan;



- Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik;
- Program Pembinaan Perpustakaan.



Gambar 2.10.: Bantuan Program Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga (SIMPOR) Tahun 2024

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menyasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Ketersediaan anggaran yaitu tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan beban orangtua siswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komitmen pimpinan karena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.
- Program pusat yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah dan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- Program Inovatif daerah "SIMPOR" dapat berjalan dengan baik.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.
- Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah.
- Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- Meningkatkan kemampuan pembelajaran
- Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.



- Meningkatkan prasarana dan sarana
- Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru. Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.
- Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.

Tabel 2.51.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	61.085.487.055	52.995.602.351	86,76%
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	526.664.350	444.663.420	84,43%
3.	Pembinaan Perpustakaan	333.844.900	320.544.342	96,02%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran program dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 86,79%, dengan rata-rata capaian program 89,07% maka terdapat efektifitas anggaran sebesar 13,21%.

3.2.3 TUJUAN 3 : Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	BB	B	BB (hasil sementara)	112,6	SB	BB

Pada tahun 2024 Berdasarkan hasil evaluasi sementara atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung oleh KemenPANRB. Namun berdasar hasil (nilai) evaluasi eksternal yang disampaikan KemenPANRB sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian hasil evaluasi RB 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2024 melalui portal rb nasional dengan alamat <https://portalrb.menpan.go.id/> tanggal 26 Februari 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung mendapat nilai indeks RB Sementara 78,82 dengan predikat "BB". mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3,68 poin.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 dan 2024.



Tabel 2.53.: Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2024

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
1	2022	57,71 (CC)
2	2023	75,14 (BB)
3	2024	Hasil Sementara 78,82 (BB)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejak tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

The screenshot displays the 'SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB' interface. On the left is a navigation menu with options: Beranda, Dokumen, Rencana Aksi, Evaluasi, Hasil Evaluasi, and Hasil Evaluasi 2023. The main content area shows 'Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung' with the following data:

RB General Awal	68.85
Koefisien	0
RB General	68.85
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	68.85
RB Tematik	9.97
Index RB	78.82



Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023-2024 :

Tabel 2.54.: Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitang Tahun 2023-2024 (Komponen dan Sub Komponen)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2023		Tahun 2024		
					Skor	Skor Index	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.88	1.88	3	2.21	2.21
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4.39	7	87	4.49
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99.62	1.99	2		
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	3	4	2.4
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.2	2.56	4	3.54	2.83
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	1.5	1.5	3.5	0.5	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63.52	2.54	4	64.68	2.59
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	1	0.5	2.5	0	0
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	93.22	2.33	2.5	92.36	2.31
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	3	1.5	2.5	3	1.5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0	2.5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	45.61	1.14	2.5	97.84	2.45
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	2.12	1.06	2.5	2.62	1.31
14	RB	Capaian	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	72.4	1.81	2.5	73.66	1.84



	General	Pelaksanaan Kebijakan RB							
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252.5	2.46	4	252.5	2.46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.89	1.17	2	4.02	1.61
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	88.87	1.33	2	93.07	1.86
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.11	5.6	9	3.35	6.03
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1.96	4	98.79	3.95
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57.14	2.9	6	78.21	3.04
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5	5	3	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80.1	3.2	4	77.38	3.1
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlaq	4	61.6	2.46	4	63.26	2.53
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76.61	7.66	10	76.55	7.66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89.33	7.15	8	89.71	7.18
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10			10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.28	0.28	1	0.6	0.6
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.28	0.28	1	0.86	0.86
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4			1	0.61	0.61
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.4	0.4	1	0.69	0.69



31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0.4	0.27	0.27	1	0	0
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	54.61	0.23			
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6					
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6					
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	100	0.42			
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6					
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5	3	1.98	1.98
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.61	1.61	3	1.61	1.61
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3			3	0.75	0.75
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.8	2.8	3	2.87	2.87
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2.46	2.46	3	0	0

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory, Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik.



Tabel 2.55.: Hasil Evaluasi RB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2023

Instansi Pemerintah	Indeks RB 2022		Indeks RB 2023			
	Nilai	Predikat	General	Tematik	Total	Predikat
Kabupaten Bangka Tengah	69,36	B	66,54	12,14	78,7	BB
Kabupaten Belitung Timur	58,2	CC	64,2	12,24	76,4	BB
Kabupaten Belitung	57,71	CC	64,89	10,25	75,14	BB
Kabupaten Bangka	62,97	B	62,08	8,7	70,8	BB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69,53	B	60,54	8,46	69	B
Kabupaten Bangka Barat	53,48	CC	60,47	7,25	67,7	B
Kabupaten Bangka Selatan	60,61	B	55,5	9,03	64,5	B
Kota Pangkalpinang	63,13	B	55,86	1,97	57,8	CC

Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi dari 7 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan sebanyak 5 Pemda mengalami kenaikan predikat, 2 Pemda dari CC ke BB, 2 Pemda dari B ke BB dan 1 Pemda dari CC ke B. 1 Pemda yang mengalami penurunan nilai yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 1 Pemda mengalami penurunan predikat yaitu Kota Pangkal Pinang.

Faktor Pendukung:

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat:

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab bersama segenap elemen pemerintahan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu:

Terdapat kegiatan utama mandatory yang belum di tetapkan sebagai target Instansi Pemerintah; dan targetnya belum didasarkan pada baseline dan target nasional (Kemenpanrb nomor 739 Tahun 2023);

Rencana aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran kegiatan utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;

Masih terdapat indicator output atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran dan targetnya;

Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan belum baik, ada 3 indikator yang nilainya (0) yaitu Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Kualitas Kebijakan dan Tematik Pengendalian Inflasi untuk strategi pembangunan dan capaian indicator dampak. Dan 5 indikator nilainya belum baik, yaitu, tingkat keberhasilan pembangunan ZI, Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Indeks pembangunan statistik, Indeks BerAkhlaq, dan nilai pada strategi pelaksanaan RB Tematik dan capaian dampak yang masih perlu penguatan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang diperlukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks indicator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks yang masih dinilai buruk. Karena secara umum, indeks indicator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks penilaian Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Perbaikan dalam strategi penyusunan kegiatan dalam rencana aksi juga perlu dilakukan agar relevan untuk mencapai target sasaran dalam kegiatan utama. Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 21 kegiatan utama telah menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal baik dalam rb general maupun dalam rb tematik.

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.56.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Meningkatkan statistic sektoral Meningkatkan kualitas pelayanan public Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif.
	Sasaran 7 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapabilitas aparatur

SASARAN 6 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026. Capaian kinerja tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi		2024		Capaian (%)	Kategori	Akhir RPD 2024 Target
			Awal 2023	Target	Realisasi	Target			
1	Opini BPK	Skala	WDP	WTP	WTP	100	Sangat Baik	WTP	
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	B	BB	B	92,39	Sangat Baik	BB	

(*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara



pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib. Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung juga belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target BB di dapatkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2024 yaitu B dengan nilai 64,68 dengan capaian kinerja sebesar 92,39%.



Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2024



Gambar 2.11.: Penerimaan Penghargaan atas Opini BPK

Tabel 2.58.: Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 22 Mei 2024. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan keuangan; 2) Meningkatkan barang milik daerah (BMD); dan 3) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan



peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan e-budgeting yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta langkah upaya yang kuat dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan Faktor penghambat capaian kinerja adalah perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terus terjadi, dan juga transisi peralihan sistem informasi keuangan dari SIMDA ke SIPD. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, akan melakukan :

- Mendukung upaya untuk mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah .



Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.59.: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung



KOMPONEN	BOBOT	2022	% kinerja komponen terhadap bobot	2023	% kinerja komponen terhadap bobot	2024	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	21.68	72.27	22.40	74.67	22.28	74.26
Pengukuran Kinerja	30	15.26	50.87	16.16	53.87	16.27	54,23
Pelaporan Kinerja	15	9.84	65.60	10.25	68.33	10.48	69,87
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.20	56.80	14.71	58.84	15,65	62,60
Nilai Hasil Evaluasi Kategori	100	60.98		63.52		64,68	
		B		B		B	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2024 sebesar 64,68, dengan kategori B (Baik) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/193/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Tahun 2023 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2024 sebesar 1,16 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level organisasi perangkat daerah. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja dan seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap OPD melalui website monev.belitung.go.id yang telah diintegrasikan dengan sakup.belitung.go.id.

Namun dari data capaian nilai SAKIP di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam range 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala



bidang merupakan hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain: Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP , Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP. Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu: Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pangkalpinang terkait pengelolaan barang milik daerah;

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:

- belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
- belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur; sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
- pelayanan publik yang masih kurang;
- terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik;

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tabel 2.60.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih , Transparan dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	113.179.109.358	109.666.261.359	96,90%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.706.653.857	935.696.269	54,83%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.514.288.693	1.458.362.960	58,00%
4	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.147.603.100	16.649.142.430	91,74%
5	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.402.902.555	1.287.857.918	91,80%
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	418.587.057	395.302.365	94,44%
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	380.424.450	226.115.408	59,44%



8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	328.126.300	274.396.394	83,63%
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	226.224.414	196.935.939	87,05%
10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.902.432.014	2.516.650.075	86,71%
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	253.385.752	233.053.502	91,98%
12	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.182.598.064	1.098.885.087	92,92%
13	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.643.284.000	4.603.229.100	99,14%
14	Program Penanggulangan Bencana	1.696.690.200	1.529.924.988	90,17%
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	776.955.100	678.756.300	87,36%
16	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.294.411.300	1.188.686.101	91,83%
17	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	24.138.045.300	24.050.812.998	99,64%
18	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	591.050.000	450.532.562	76,23%
19	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.224.715.000	999.072.115	81,58%

Sehingga untuk Sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,16% dan persentase rata-rata capaian program 85,02% maka terdapat efisiensi 4,84%.

SASARAN 7 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional” merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “71-80” Sedang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 2.61.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024				Kategori	Akhir RPD 2026 Target
			RPD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Profesional ASN	Skala	75,44	71-80	78,63	100	SB	71-80

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator



profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

- Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
- Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
- Kinerja, dengan nilai maksimal 30
- Disiplin, dengan nilai maksimal 5
- Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas.

Indikator yang digunakan adalah :

Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 berdasarkan perhitungan Badan Kepegawaian Negara adalah 78,63 (sedang) Hasil IP ASN Tahun 2023 sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 435/B-BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024 hal : Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi Daerah Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Tahun 2023.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang

Penjelasan:

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 20,86 dari 25; Kompetensi 28,50 dari 40; Kinerja 24,26 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5.

Tabel 2.62.: Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2021	12,69	18,52	23,23	5,00	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-



2023	20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang	BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Hasil Penilaian BKN No: 435/B- BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024
------	-------	-------	-------	------	-------	--------	---

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2024

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 antara lain : Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan formasi kebutuhan instansi.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 93 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam : pengelolaan sistem Manajemen Talenta PNS; perencanaan dan pengembangan karier pegawai berdasarkan Sistem Merit; pelaksanaan assessment pegawai; peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan assessment dan talenta pegawai; dan penyusunan talent pool berdasarkan hasil assessment dan kinerja PNS sebagai dasar Rencana Suksesi pengisian jabatan PNS.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS dan untuk memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau tim pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan PNS yang bersangkutan. Diharapkan Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing unit kerja, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi:

- Berkoordinasi dengan OPD untuk memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM Kabupaten Belitung;
- Melaksanakan Sosialisasi atau seminar online kepegawaian dengan target peserta massal.



Gambar 2.12.: Pemerintah Kabupaten Belitung raih penghargaan pada Anugerah Meritokrasi 2023

Pemerintah Kabupaten Belitung meraih dua kategori penghargaan sekaligus pada Anugerah Meritokrasi 2023. Kedua kategori tersebut yaitu pada penerapan sistem merit dengan nilai 252,5 atau berpredikat baik, serta indeks kualitas pengisian JPT dengan nilai 87,16 atau berpredikat baik.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

Tabel 2.63. : Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kepegawaian daerah	2.900.833.720	2.379.787.330	82,04%
2.	Pengembangan sumber daya manusia	1.889.920.200	1.673.698.459	88,56%

Sehingga untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional dengan capaian 84,61% dengan persentase per sasaran 81,25% maka terdapat efisiensi 18,75%.



3.2.4 TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, upaya pencapaian Tujuan 4 “ meningkatkan kualitas lingkungan hidup “ telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Pengelolaan sampah

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan target 69,25. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 2.64.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Capaian (%)	Kategori	Akhir RPD 2024 Target
			Kondisi Awal RPD	Target	Realisasi			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	69,25	69,25	69,84	100,85	SB	69,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 69,84 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2024 sebesar 69,84 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori Sedang. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusnya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk perhitungan nilai IKLH sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA) : 57.57

Indeks Kualitas Udara (IKU) : 93.52

Indeks Tutupan Lahan (IKL) : 47.12



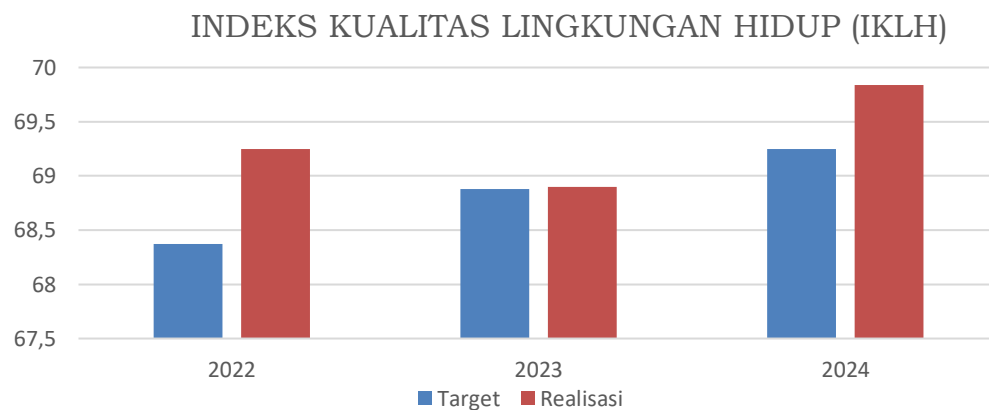
$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0.376 \times 57.57) + (0.405 \times 93.52) + (0.219 \times 47.12) \\
 &= 21,646 + 37,875 + 10.319 \\
 &= 69,84
 \end{aligned}$$

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65.: Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	68,90	69,84

Grafik 2.13 Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, pengelolaan pengendalian pencemaran udara serta pengendalian kerusakan lahan.

Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.

Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah dan emisi udara yang dihasilkan.

Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan pemantauan secara kontinyu menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS).

Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.

Peningkatan program pemulihan kualitas lingkungan atau kegiatan inovasi lainnya bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.

Sosialisasi dan publikasi terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan hidup terhadap stakeholder- stakeholder.



SASARAN 8 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan target 69,25. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 2.66.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir
			Kondisi Awal RPD	Target				RPD 2024 Target
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	69,25	69,25	69,84	100,85	SB	69,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 69,84 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2024 sebesar 69,84 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori Sedang.

Dalam perhitungan nilai IKLH Tahun 2024 dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Adapun nilai IKA, IKU dan IKL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 52,9 sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 ialah 57,57 dengan tingkat capaian sebesar 108,83%.

Nilai IKA tahun 2024 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik yang dipantau yang terlapor sejumlah 24 (Dua puluh empat) titik yang terdiri dari 18 (delapan belas) titik air sungai dan 6 (enam) air danau/Kolong/SPAM. Nilai IKA pada tahun 2024 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.

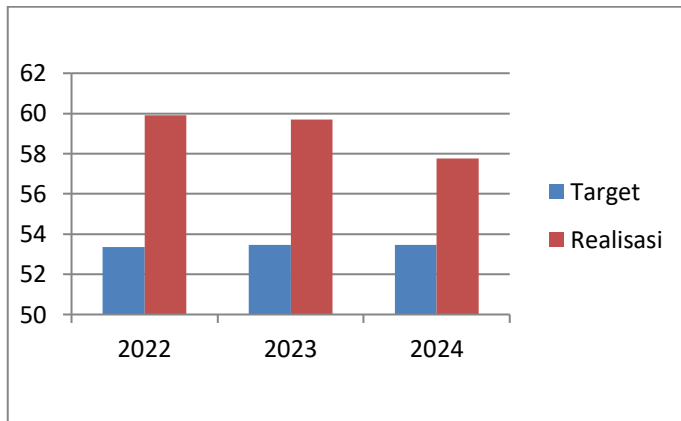
Penambahan nilai IKA yang dihitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding yang diukur sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 (empat) titik.

Adanya pengaruh dari kondisi cuaca pada triwulan akhir yang memengaruhi besarnya debit air sehingga terdapat beberapa parameter yang mengalami penurunan kualitas terutama kandungan oksigen dalam air / Dissolve oxygen (DO). Selain itu, sifat tanah di Kabupaten Belitung yang bersifat asam memengaruhi parameter Ph air menjadi asam.

Nilai IKA yang dihitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK. Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib. Data yang terverifikasi sejumlah 103 (seratus tiga) dari 104 (serratus empat) titik air sungai dan danau yang terinput dengan persentase titik yang memenuhi baku mutu sebanyak 39 titik (37,5%), dan cemar ringan sebanyak 64 titik (62,13%). Terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara persentase titik yang memenuhi baku mutu dengan titik yang tercemar ringan.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA 3(tiga) Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.14.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKA 3(tiga) Tahun terakhir



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja IKA sebagai berikut :

Gambar 2.13.: Pengujian Kualitas Air Sungai, Air Danau, dan Air Higiene Sanitasi di Kabupaten Belitung



Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU Tahun 2024 ditargetkan 93,93 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 93.52 dengan tingkat capaian sebesar 99,56%. Indeks kualitas udara diketahui dengan melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode Passive Sampler yang dilakukan 2 (dua) kali setahun (dalam hal ini per-semester) selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari pada 4 (empat) titik lokasi, yaitu area transportasi, industri, Kawasan perkantoran dan pemukiman. Data yang diukur berupa konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter pencemar udara SO₂ dan NO₂. Data tersebut digunakan untuk menyatakan atau menyimpulkan kondisi ketercemaran udara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan salah satu komponen IKLH . Lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteria lokasi, antara lain:

Kepadatan transportasi

- Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jalan Jendral Sudirman.
- Kepadatan pemukiman
- Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara RT.04 RW.02.
- Lokasi perkantoran
- Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di Area Perkantoran dekat Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung.
- Lokasi industri
- Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge Jalan TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Rerata Nilai SO₂ dan NO₂ yang terukur masih memenuhi baku mutu namun nilai IKU belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

Kenaikan nilai SO₂ dan NO₂ pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.67.: Perbandingan Nilai SO2 dan NO2 Tahun 2023 dengan 2024

No	Parameter	Kategori	Nilai Rata-rata	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	SO2	Transportasi	8,86	7,45
		Industri	5,31	8,69
		Pemukiman	9,92	2,735
		Perkantoran	5,135	4,96
2	NO2	Transportasi	7,895	6,53
		Industri	3,97	8,245
		Pemukiman	5,54	1,885
		Perkantoran	11,73	5,03

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai pada 1 (satu) titik yang cukup signifikan, pada kategori lokasi industri jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada kategori lokasi lain mengalami penurunan. Sumber sulfur utama yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi SO2, ialah pembakaran bahan bakar fosil baik dari kendaraan bermotor, peralatan diesel, hingga pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi atau batu bara. Terlihat adanya peningkatan konsentrasi SO2 pada Kawasan industri yang berdekatan dengan pembangkit listrik. Meningkatnya nilai NO2 pada area perkantoran dikarenakan berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas.

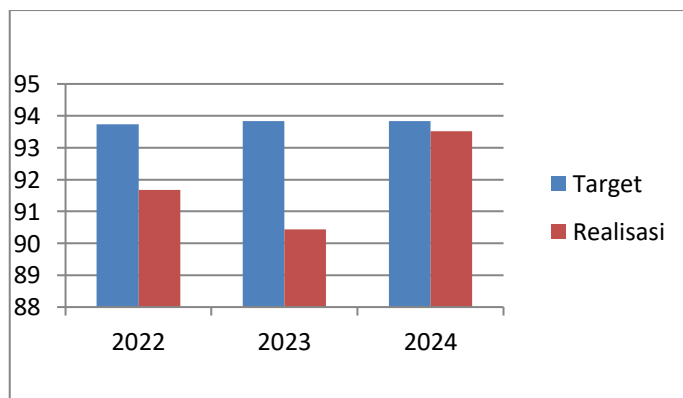
Meningkatnya nilai NO2 pada area perkantoran dikarenakan berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas.

Selain itu, terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan pada titik lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik pada parameter SO2 maupun NO2.

Nilai IKU didapat berdasarkan data hasil pengujian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga data perhitungan indeks kualitas udara hanya terbatas pada hasil di 4 (empat) titik pantau tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung agar dapat menambah jumlah titik pantau kualitas udara sesuai dengan metode yang dipersyaratkan dalam PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kurangnya penetapan ruang terbuka hijau di Kabupaten Belitung

Grafik 2.15.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKU 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2022-2024



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja sebagai berikut :

Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Terminal Bus Tanjungpandan



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler Kawasan Industri Suge



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Area Pemukiman Desa Aik Pelempang Jaya



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Kawasan Industri PLTU Suge



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Kawasan Pemukiman Kantor Desa Aik Pelempang Jaya



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung



Pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Terminal Bus Tanjungpandan



Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

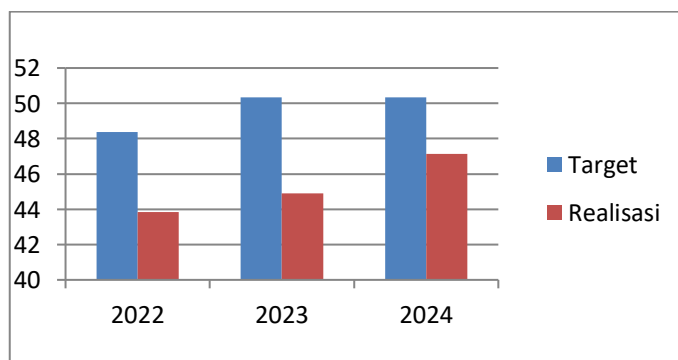
Nilai IKL pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 51,69 sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 47,12 dengan tingkat capaian sebesar 91,16%. Nilai IKL dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam aplikasi IKLH. Kabupaten menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung serta Data Vegetasi Lainnya yang didapat dari verifikasi lapangan reklamasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Belitung..

Kenaikan nilai IKL Tahun 2024 dikarenakan :

Inventarisasi data seperti verifikasi lapangan dan pengumpulan data sekunder dari dinas lainnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022 dan dilanjutkan hingga tahun 2023, sehingga terdapat kenaikan nilai IKL dari 43,89 tahun 2022 menjadi 44,89 tahun 2023. Namun, perlu dilakukan metode lain yang dapat menunjang peningkatan nilai indeks kualitas lahan, salah satunya ialah Deliniasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 menggunakan software dan verifikasi lapangan.

Terdapat kenaikan target IKL tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang cukup signifikan dari 48,38 tahun 2022 menjadi 50,35 tahun 2023.

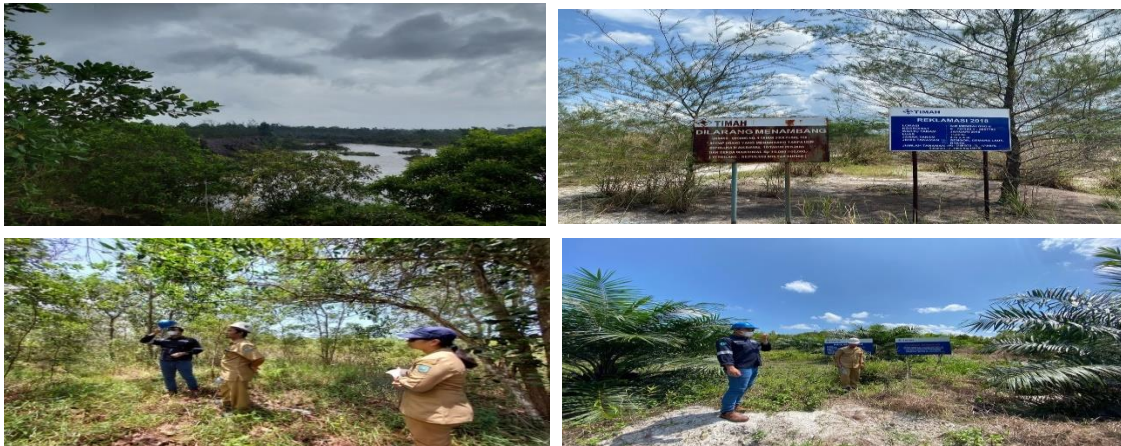
Grafik 2.16.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKL 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2022-2024



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja IKL sebagai berikut :



Pemantauan Kualitas Lahan di Salah Satu Lahan Reklamasi PT.Timah, Tbk di Kecamatan Membalong, Sijuk, dan Badau



Pemantauan kualitas pesisir di Kabupaten Belitung



Faktor Pendorong dan faktor penghambat untuk sasaran strategis I Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan

Faktor Pendorong :

- Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik
- Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan dan persetujuan teknis lingkungan
- Monitoring dan pengawasan kegiatan setiap industri atau kegiatan usaha yang melakukan kegiatan wajib melaksanakan pencegahan dan pengurangan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- SDM sudah didukung oleh pejabat fungsional yaitu pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup
- Sudah didukung oleh Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah terakreditasi oleh lembaga KAN.

Faktor Penghambat :

- Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi adanya perubahan iklim
- Masih rendahnya Indeks Tutupan Lahan (IKL) dikarenakan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Masih kurangnya pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup

Solusi :

Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) perlu pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.

Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah



Menambah SDM pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup

Tabel 2.68.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	346.659.900	339.531.845	97,94%
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.417.753.400	2.377.774.562	98,35%
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	521.213.200	503.405.700	96,58%
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23.680.500	23.402.350	98,83%
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	49.999.500	49.047.485	98,10%
6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	134.195.500	108.558.300	80,90%
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.640.200	93.729.442	93,13%
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.628.300	3.571.200	98,43%
9	Program Pengelolaan Persampahan	7.380.397.250	7.310.683.850	99,06%

Sehingga untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan realisasi anggaran sebesar 98,47% dan rata-rata persentase per sasaran sebesar 95,70%, maka terdapat efektifitas dan efisiensi 1,53%.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/anggaran RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.068.510.021.579,00 bertambah sejumlah Rp. 79.990.090.345,00 sehingga menjadi Rp. 1.148.500.111.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan daerah:

Semula	Rp. 932.744.201.063,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 34.424.522.824,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 967.168.723.887,00

Belanja daerah:

Semula	Rp. 1.068.510.021.579,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 81.290.734.345,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.149.800.755.924,00

Pembiayaan daerah:

Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp. 138.765.820.516,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 46.866.211.521,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 185.632.032.037,00

Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp. 3.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. --
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 182.632.032.037,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. –

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari komponen (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan



Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.69.: Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	967.168.723.887,00	977.370.104.650,33	101,05	1.117.439.818.908,80
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.812.555.643,00	185.033.042.636,33	119,52	186.621.508.495,80
	Pajak Daerah	87.742.429.243,00	95.733.329.497,25	109,11	94.099.943.027,70
	Retribusi Daerah	21.074.509.702,00	28.328.429.252,00	134,42	12.144.612.725,60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.566.654.064,00	5.566.654.063,95	100,00	6.035.003.956,00
	Lain-lain PAD yang Sah	40.428.962.634,00	55.404.629.823,13	137,04	74.341.948.786,50
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.812.555.643,00	185.033.042.636,33	119,52	186.621.508.495,80
2	PENDAPATAN TRANSFER	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53	920.148.463.207,00
	Dana Perimbangan	666.328.668.000,00	661.132.445.242,00	99,22	760.379.607.792,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	80.736.185.000,00	80.735.062.654,00	100,00	136.611.970.768,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.449.524.000,00	485.393.500.051,00	99,99	469.430.528.687,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.226.341.000,00	10.766.768.288,00	95,91	69.464.145.429,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.916.618.000,00	84.237.114.249,00	94,74	84.872.962.908,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	666.328.668.000,00	661.132.445.242,00	99,22	760.379.607.792,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	41.029.718.000,00
	Dana Desa	41.717.027.000,00	41.477.591.670,00	99,43	40.466.853.100,00
	Insentif Fiskal	15.976.321.000,00	15.976.321.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	57.693.348.000,00	57.453.912.670,00	99,58	81.496.571.100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.337.000.000,00	62.973.287.334,00	81,43	78.272.284.315,00
	Pendapatan Bagi Hasil	67.305.000.000,00	59.001.661.334,00	87,66	71.558.916.815,00
	Bantuan Keuangan	10.032.000.000,00	3.971.626.000,00	39,59	6.713.367.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	77.337.000.000,00	62.973.287.334,00	81,43	78.272.284.315,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53	920.148.463.207,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	JUMLAH PENDAPATAN	967.168.723.887,00	977.370.104.650,33	101,05	1.117.439.818.908,80

Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 - 2026 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan



proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing- masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program- program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2024 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.70.: Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA DAERAH	1.149.800.755.924,00	1.060.978.760.805,40	92,28	1.108.448.343.633,00
	BELANJA OPERASI	964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	91,89	849.822.871.783,00
	Belanja Pegawai	508.271.590.243,63	475.569.482.472,00	93,57	445.534.554.743,00
	Belanja Barang dan Jasa	407.951.234.350,37	363.320.239.519,78	89,06	363.679.104.935,00
	Belanja Subsidi	693.409.628,00	638.399.797,00	92,07	644.159.628,00
	Belanja Hibah	46.960.884.950,00	46.220.077.443,00	98,42	39.760.641.477,00
	Belanja Bantuan Sosial	345.180.862,00	235.972.000,00	68,36	204.411.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	91,89	849.822.871.783,00
2	BELANJA MODAL	74.989.800.190,00	67.145.369.203,62	89,54	151.031.461.750,00
	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00	4.135.660.290,00	63,63	1.098.020.400,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.837.407.740,00	26.330.082.535,00	85,38	62.234.547.745,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.878.149.382,00	18.418.277.038,62	97,56	38.123.739.705,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.122.711.886,00	14.696.115.290,00	97,18	46.774.899.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.483.820.182,00	3.400.250.200,00	97,60	2.800.254.900,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	167.711.000,00	164.983.850,00	98,37	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	74.989.800.190,00	67.145.369.203,62	89,54	151.031.461.750,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.753.057.800,00	9.753.057.800,00		
3	BELANJA TRANSFER	108.088.655.700,00	107.849.220.370,00	99,78	107.594.010.100,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.774.242.924,00	8.774.242.924,00	100,00	8.079.725.000,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	978.814.876,00	978.814.876,00	100,00	1.052.096.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.335.597.900,00	98.096.162.570,00	99,76	98.462.189.100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	108.088.655.700,00	107.849.220.370,00	99,78	107.594.010.100,00



JUMLAH BELANJA	1.149.800.755.924,00	1.060.978.760.805,40	92,28	1.108.448.343.633,00
SURPLUS/DEFISIT	(182.632.032.037,00)	(83.608.656.155,07)	45,78	8.991.475.275,80

Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;



Tabel 2.65.: Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	PEMBIAYAAN DAERAH	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	176,668,393,594.00	176,668,393,594.32	100.00	176.668.393.594,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	99.023.375.881,70	-	185.659.868.870,12

Capaian Keuangan

Rencana keuangan pendukung 12 sasaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.139 Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Realisasi Anggaran 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024 (%)	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	CAPAIAN 2024(%)	KETRERANGAN
MISI I : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembagunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat											
1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Rasio Gini	1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	0,248-0,253			-	-	-	-
		2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2. Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,5			31.541.314.703,00	28.361835.218	89,92	EFEKTIF DAN EFISIEN
		3. Menurunnya kemiskinan penduduk	3. Tingkat kemiskinan	Persentase	6,40			1.602.697.962,00	1.384.546.202,00	86,39	EFEKTIF DAN EFISIEN
		4. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	4. Persentase Pmenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	62,84			63.315.477.437,00	59.259.704.752,00	93,59	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI II : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah											
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,26	74,96	100,94	-	-	-	-
		6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6. Angka harapan hidup	Tahun	71,38	71,75	100,52	99.257.129.722,00	88.738.180.298,00	89,40	EFEKTIF DAN EFISIEN
		7. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7. Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,78	9,05	103,08	61.945.996.305,00	53.760.810.113,00	86,79	EFEKTIF DAN EFISIEN
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	3. Indeks Reformasi Birokrasi	8. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	n/a	-	-	-	-	-
		9. Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	9. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	177.007.486.514,00	168.439.673.870,00	95,16	EFEKTIF DAN EFISIEN
		10. Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan profesional	10. Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,39	-	-	-	-
			11. Indeks Profesional itas ASN	Predikat	71-80 Sedang	78,63 Sedang	100	4.790.753.920,00	4.053.485.789,00	84,61	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI III : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan											
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	11. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	12. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Skala	69,25	69,84	100,85	-	-	-	-
		12. Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	13. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	69,25	69,84	100,85	10.978.167.750,00	10.809.704.734,00	98,47	EFEKTIF DAN EFISIEN





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu, tugas pembantuan diberikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui kementerian teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan tersebut akan lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Belitung menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dengan uraian sebagai berikut :

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

3.1.1. Target Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung di Tahun 2024 menerima Tugas Perbantuan dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa belanja barang Rumah Kemasan yang berlokasi UPT PLUT dengan pagu anggaran Rp. 1.401.990.000,-.

➤ **Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

- a. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 07 Desember 2022 tentang pelaksanaan pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan*
- b. Keputusan Menteri Koperasi dan usaha Kecil Menengah Nomo 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Pengembangan Kemasan produk Usaha Mikro dan Usaha kecil melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024.

3.1.2. Realisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung di Tahun 2024 menerima Tugas Perbantuan dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa belanja barang Rumah Kemasan yang berlokasi UPT PLUT dengan pagu anggaran Rp. 1.401.990.000,-. dan dengan realisasi Rp. 1.291.831.000,-.

Kegiatan Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro di Kabupaten Belitung diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro yang ada di di Kabupaten Belitung terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Disamping itu Layanan Pengembangan Kemasan Produk juga dapat dimanfaatkan untuk sarana informasi dan edukasi terkait pengembangan kemasan oleh para pemangku kepentingan lainnya seperti dari aparaturnya dinas, akademisi dan pelajar. Pelaksanaan/Operasional Layanan Kemasan di Kabupaten Belitung akan di kelola oleh UPT PLUT KUMKM Kabupaten Belitung dengan merekrut Tenaga Manajer, Tenaga Desainer dan Tenaga Operator Mesin.



Layanan Pengembangan Kemasan bertujuan menjadi sentra pelayanan dan edukasi kepada UMKM terkait kemasan produk yang baik dan benar sesuai dengan jenis produk dan segmentasi, memberikan kemudahan kepada UMKM untuk mendapatkan kemasan dengan harga terjangkau.

Selain itu Layanan Pengembangan Kemasan juga bertujuan sebagai penyedia jasa pengemasan bersama, yaitu UMKM yang membutuhkan alat pengemasan berteknologi tinggi namun belum mampu melakukan sendiri, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bisa menggunakan layanan pengemasan bersama dengan membawa produk ke Pusat Layanan Pengembangan Kemasan untuk kemudian dikemas dengan menggunakan mesin pengemas yang tersedia.

Tabel 3.1

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 14 Tahun 2022	<p>Program : Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi</p> <p>Kegiatan : Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro</p> <p>Output : Terwujudnya Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil</p> <p>Rincian Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pengadaan Peralatan Produksi Kemasan - Pengadaan Peralatan Desain Kemasan - Pengadaan Meja/Kursi dan Rak Ruang Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro 	Belitung	UPT PLUT KUMKM	1.401.990.000	1.291.831.000	92,14	Peralatan Penunjang Pengemas Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100	

Sumber : Dnas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2024



Adapun gambaran umum rincian kegiatan pelaksanaan Tugas Pembantuan Layanan Pengembangan kemasan produk UMKM yaitu :

Tahap I

Pecah DIPA Dana Tugas Pembantuan (TP)

1. Pembentukan Kode Satker
2. Pengajuan User SAKTI
3. Pengajuan Revisi Pecah DIPA

Tahap II

Pembuatan SK KPA, SK PPK

Pembuatan KAK Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

Pembuatan Spesifikasi Mutu Kualitas Barang

Tahap III

Penerbitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : SP DIPA-044.01.4.419000/2024

Nama Program dan Kegiatan : Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro

Tahap IV

Proses pengadaan barang melalui LPSE

Tahap V

Proses Pengiriman Barang Mesin dan Peralatan Bahan Baku oleh penyedia

Proses Pembayaran Invoice kepada penyedia

Tahap VI

Proses rekrutmen tenaga layanan kemasan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI terdiri dari

- Manager Kemasan
- Designer Kemasan
- Operator Mesin kemasan

Tahap VII

Pelaporan Keuangan

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

UMKM mendapatkan kemudahan dalam meningkatkan kualitas kemasan produk UMKM melalui kegiatan Layanan Kemasan yang dikelola oleh UPT PLUT KUKM Kabupaten Belitung.

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Kegiatan pelaksanaan Tuga Pembantuan berupa fasilitas dalam bentuk Layanan Kemasan diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan pelayanan kemasan bagi UMKM, yang dapat membantu UMKM memecahkan permasalahan kemasan yang dihadapinya, menjadi unit konsultasi mengenai kemasan dan menjadi tempat pelayanan pengemasan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM serta dapat menyediakan kemasan sesuai dengan yang diperlukan. Rumah kemasan diharapkan menjadi pusat informasi “ *one stop service*” kemasan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- Pelaku usaha UMKM yang mempunyai kemasan produk yang baik dan modern yang dapat bersaing
- Industry dan penyelia kemasan
- UMKM Pemula, Mahasiswa, Pelajar, dan Koperasi



Pada awal pelaksanaan layanan kemasan bagi UPT PLUT KUKM ini sesuai DIPA bahwa dianggarkan honor untuk pengelola layanan kemasan dari bulan Oktober s.d Desember 2024 yaitu terdiri dari :

- 1 orang Manager Kemasan
- 1 orang Designer Kemasan
- 2 orang Operator Mesin kemasan

Namun diawal Januari 2025 telah disampaikan oleh Kementerian Koperasi UKM RI bahwa karena keterbatasan anggaran untuk honor pengelola kemasan ditiadakan dan dibebankan ke APBD Pemerintah Kabupaten Belitung. Tetapi dari APBD Pemerintah Kabupaten Belitung karena keterbatasan anggaran juga tidak bisa mengakomodir honor tenaga layanan kemasan tersebut. Ditambah aturan baru bahwa tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer lagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sehingga peralatan dan mesin kemasan yang sudah dibeli tidak bisa dioperasionalkan. Sangat disayangkan mesin yang sudah dibeli mahal tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT

- Layanan kemasan UMKM tetap membutuhkan tenaga operator mesin untuk operasional. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung bisa mengakomodir tenaga operasional layanan kemasan melalui pengadaan jasa melalui *outsourcing*.
- Layanan kemasan UMKM bisa berkolaborasi dengan Koperasi untuk pengelolaannya kedepan



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri dari:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	6.111
2	Pendidikan Dasar	Orang	28.819
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	990

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap jenjang pada tahun 2024 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2024 (Orang)	Realisasi (Orang)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	6.111	5.976
2	Pendidikan Dasar	28.819	25.715
3	Pendidikan Kesetaraan	990	417

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024



4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 247.627.783.823,00 dengan realisasi sebesar Rp233.657.094.790,00 atau terserap 94,36% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	177.673.097.388,00	172.714.941.913,00	97.21
2.	Belanja Barang dan Jasa	49.527.705.491,00	41.370.308.558,00	83.53
3.	Belanja Hibah	6.107.929.000,00	5.814.701.041,00	95.20
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.579.482.380,00	4.429.901.839,00	96.73
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.272.749.382,00	5.943.991.239,00	94.76
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.466.820.182,00	3.383.250.200,00	97.59
Jumlah		247.627.783.823,00	233.657.094.790,00	94,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	Program Pengelolaan Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.859.580.058,00	25.990.955.053,00	90.06
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.535.511.632,00	19.003.155.524,00	92.54
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.174.537.315,00	6.013.841.139,00	83.82
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.515.858.050,00	1.987.650.635,00	44.01
Jumlah		61.085.487.055,00	52.995.602.351,00	86.76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	65	S2 : 2 orang S1 : 49 orang D3 : 4 orang SMA : 10 orang	Gol II : 7 orang Gol III : 40 orang Gol IV : 18 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 6 Esl.IV : 10	48 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024



4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2024 capaiannya sebesar 9,05 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,98 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Masih banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
2. Kualitas layanan pendidikan yang belum memenuhi standar yang di tetapkan.
3. Pemenuhan dan pemerataan guru belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang pendidikan dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di PAUD/TK, SD dan SMP, masih adanya guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengajar dengan metode yang efektif serta belum memiliki sertifikat pendidik;
5. Sekolah dan guru yang belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran;
6. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dan asesmen di sekolah.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan.
8. Kesenjangan kompetensi antar guru, terutama dalam inovasi pembelajaran berbasis digital.

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Pemenuhan penerimaan dan pengadaan guru baru berdasarkan formasi ASN sesuai kebutuhan daerah serta penyebaran guru ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik;
3. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan ke jenjang yang lebih tinggi, S1, S2 atau S3, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
4. peningkatan pelatihan dan sertifikasi guru, insentif bagi guru untuk meningkatkan kualitas mengajar
5. Pendidikan saat ini masih sering berfokus pada aspek akademik, sementara pendidikan karakter sering kali terabaikan. Untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, etika, dan kepedulian sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekolah perlu lebih banyak mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membentuk kepribadian siswa;
6. Implementasi Pendidikan Berkelanjutan diantaranya: Pelatihan dan Sertifikasi Profesional, Pendidikan Inklusif untuk Semua Usia, Edukasi Lingkungan dan Keberlanjutan serta Pembelajaran Berbasis Teknologi.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Peningkatan dan Optimalisasi Sarana Prasarana TIK
 - a. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat TIK
 - b. Penyediaan Jaringan Internet yang Lebih Merata
 - c. Pembuatan Bank Soal dan Sumber Belajar Digital
9. Mengatasi Kesenjangan Kompetensi Guru dalam Inovasi Pembelajaran Digital
 - a. Pelatihan Berjenjang Berdasarkan Level Kompetensi Guru
 - b. Program Guru Penggerak TIK dan Pembelajaran Berbasis Digital
 - c. Pemberian Apresiasi dan Insentif bagi Guru yang berprestasi dan Inovatif



4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang (SPM) Kesehatan di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten Belitung juga melakukan penghitungan kebutuhan untuk tenaga serta sarana dalam menunjang pencapaian SPM ini. Berikut Data penghitungan kebutuhan tenaga, alat / sarana :

Tabel 4.6

Penghitungan Kebutuhan Tenaga Serta Sarana Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil			
	Kartu Ibu	2.411 Buah	2.007 Buah	
	Buku KIA	2.411 Buah	2.007 Buah	
	Tablet tambah darah	2411 Buah	2.007 Buah	
	Vaksin tetanus Difteri	315 vial	315 vial	
	Alat deteksi resiko Bumil, test kehamilan, pemeriksaan Hb, Gol darah, protein urine	2411 Buah	2.007 Buah	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	9 Orang	9 Orang	
	Bidan	18 Orang	18 Orang	
	Perawat	51 Orang	51 Orang	
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin			
	Formulir patograf	2.411 Buah	2.341 Buah	
	Kartu Ibu	2.411 Buah	2.007 Buah	



NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Buku KIA	2.411 Buah	2.007 Buah	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	20 Orang	20 Orang	
	Bidan	45 Orang	45 Orang	
	Perawat	45 Orang	45 Orang	
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir			
	Vaksin hepatitis B	2.836 Vial	2.836 Vial	
	Vitamin K Injeksi	2.836 Vial	2.836 Vial	
	Salep/tetes mata antibiotik	2.836 Buah	2.836 Buah	
	Formulir Bayi baru lahir	2.836 Buah	2.836 Buah	
	Formulir manajemen terpadu bayi muda (MTBM)	2.836 Buah	2.836 Buah	
	Buku KIA	2.836 Buah	2.836 Buah	
	Dokter / Dokter Spesialis Anak	8 Orang	8 Orang	
	Bidan	40 Orang	40 Orang	
	Perawat	40 Orang	40 Orang	
4	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	13.640 Buah	13.640 Buah	
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	13.640 Buah	13.640 Buah	
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2.836 Buah	2.836 Buah	
	Vitamin A Biru	1.285 Kapsul	1.285 Kapsul	
	Vitamin A Merah	10.162 Kapsul	10.162 Kapsul	
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2.836 Vial	2.836 Vial	
	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2.836 Vial	2.836 Vial	
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2.836 Buah	2.836 Buah	
	Peralatan Anafilaktik	49 Paket	49 Paket	
	Bidan	9 Orang	9 Orang	
	Dokter	9 Orang	9 Orang	
	Perawat	9 Orang	9 Orang	
	Ahli Gizi	9 Orang	9 Orang	
	Guru Paud	80 Orang	80 Orang	
	Kader kesehatan	245 Orang	245 Orang	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
	Buku raport kesehatanku	27.184 Buah	27.184 Buah	
	Buku pemantauan kesehatan	27.184 Buah	27.184 Buah	



NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Kuesioner skrining kesehatan	27.184 Buah	27.184 Buah	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	15 Buah	15 Buah	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	15 Buah	15 Buah	
	Dokter/Dokter gigi	15 Orang	15 Orang	
	Bidan	35 Orang	35 Orang	
	Perawat	35 Orang	35 Orang	
	Ahli Gizi	15 Orang	15 Orang	
	Tenaga kesehatan masyarakat	10 Orang	10 Orang	
	Guru	525 Orang	525 Orang	
	Kader kesehatan	176 Orang	176 Orang	
6	Pelayanan kesehatan Usia Produktif			
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	90 Paket	90 Paket	
	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	9 Paket	9 Paket	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9 Paket	9 Paket	
	Dokter	9 Orang	9 Orang	
	Perawat	9 Orang	9 Orang	
	Bidan	9 Orang	9 Orang	
	Ahli Gizi	9 Orang	9 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9 Orang	9 Orang	
	Tenaga non kesehatan terlatih	245 Orang	245 Orang	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	19.490 Buah	17.903 Buah	
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	19.490 Buah	19.490 Buah	
	Buku kesehatan lansia	19.490 Buah	19.490 Buah	
	Dokter	15 Orang	15 Orang	
	Bidan	15 Orang	15 Orang	
	Perawat	15 Orang	15 Orang	
	Ahli gizi	15 Orang	15 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	15 Orang	15 Orang	
	Tenaga non kesehatan terlatih	15 Orang	15 Orang	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10 Buah	10 Buah	



NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Tensimeter	18 Buah	18 Buah	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9 Buah	9 Buah	
	Dokter	9 Orang	9 Orang	
	Bidan	9 Orang	9 Orang	
	Perawat	9 Orang	9 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9 Orang	9 Orang	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus			
	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	3.017 Buah	3.017 Buah	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	10 Buah	10 Buah	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10 Buah	10 Buah	
	Dokter	9 Orang	9 Orang	
	Perawat	9 Orang	9 Orang	
	Bidan	9 Orang	9 Orang	
	Ahli Gizi	9 Orang	9 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9 Orang	9 Orang	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	9 Buah	9 Buah	
	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	9 Paket	9 Paket	
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	9 Buah	9 Buah	
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	9 Buah	9 Buah	
	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	36 Orang	36 Orang	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis			
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	1000	1000	
	Reagen Zn TB	500	500	
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	500	500	
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	15	15	
	Catridge tes cepat molekuler	4700	4700	
	Formulir pencatatan dan pelaporan	10	10	
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	5	5	
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	16	16	
	Perawat	17	17	
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	16	16	
	Penata Rontgen	10	10	
	Tenaga kesehatan masyarakat	9	9	



NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	9	9	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100	100	
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	4400	4400	
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	45 paket	45 paket	
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13 paket	13 paket	
	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	13	13	
	Perawat	13	13	
	Bidan	13	13	
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	13	13	
	Tenaga kesehatan masyarakat	13	13	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	9	9	

Sumber : Dinas Kesehatan 2024

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan target sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	Jenis layanan	Target	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,411	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2,411	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2,241	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	10,275	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27,892	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	127,724	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19,490	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	53,221	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2,836	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	323	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	3,384	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3,267	100%

Sumber : Dinas Kesehatan 2024



4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis layanan	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,007	83.24%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2,273	94.28%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	2,273	101.43%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9,504	92.50%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26,875	96.35%
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	105,536	82.63%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18,419	94.50%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	40,500	76.10%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3,025	106.66%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	364	112.69%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	4,858	143.56%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3,214	98.38%

Sumber : Dinas Kesehatan 2024

a. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2024 adalah sebesar 83,24%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan untuk sub kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil didukung dari sumber pembiayaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui kegiatan kelas ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil, pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil, memberikan buku KMS Ibu hamil pada saat kontak pertama dengan petugas kesehatan (K1), Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Glukoprotein urin, serta pada ibu hamil dilakukan pelayanan antenatal dengan 10T, pemantauan P4K pada ibu hamil.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tentang adanya ibu hamil kepada tenaga kesehatan dan membantu memasang stiker P4K, pelaksanaan kelas ibu hamil, yang dipantau oleh tenaga kesehatan.

b. Realisasi Jenis Pelayanan Ibu Bersalin tahun 2024 adalah sebesar 94.28 %;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan ibu bersalin melalui kegiatan kegiatan Jaminan persalinan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani persalinan, pengadaan buku KIA yang digunakan untuk pencatatan selama masa kehamilan dan kelahiran, pemberian vaksin TT pada ibu hamil, menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang diperuntukkan pada ibu yang akan melahirkan di fasilitas kesehatan (RS), mengaktifkan Puskesmas mampu salin pada 9 Puskesmas di Kabupaten Belitung serta menjalin jejaring dengan klinik dan RS swasta.



b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran swasta dengan adanya bantuan ambulance desa yang diberikan melalui CSR dan digunakan untuk membantu sistem rujukan bagi ibu hamil yang akan bersalin yang mengalami resiko dalam persalinan (PEB, KPD dan lainnya) / komplikasi dalam persalinan. Peran masyarakat dalam hal ini sangat kuat diantaranya selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan melalui perannya sebagai kader kesehatan di Desa.

c. Realisasi Jenis Pelayanan Bayi Baru Lahir tahun 2024 adalah sebesar 101,43%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan Bayi Baru Lahir melalui kegiatan DAK Non Fisik yaitu kegiatan Jaminan persalinan dimana jaminan persalinan ini bisa mendanai persalinan ibu dan perawatan bayi jika bayi harus dilakukan perawatan yang intensif, kegiatan vaksinasi pada bayi baru lahir (HBo, Vik K, salep mata), melakukan kunjungan pelayanan pada bayi baru lahir 4 x, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan pada bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital (SHK) dengan mengambil sampel darah pada tumit bayi dengan metode khusus dan sampel tersebut di kirim ke RS dalam hal ini adalah RSCM karena sudah dilakukan MoU antara Dinas Kesehatan dengan pihak RSCM Jakarta.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat adalah peran serta kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, mencegah adanya bayi baru lahir yang tidak terlayani seperti pelayanan perawatan tali pusar.

d. Realisasi Jenis Pelayanan Balita sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 92,50%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan anak Balita melalui Anggaran DAK Non Fisik yaitu pelayanan DDTK pada balita, pemberian Vit A, kegiatan vaksinasi, pemberian makanan tambahan bagi bayi balita yang mengalami masalah gizi, pelayanan posyandu bayi balita, kegiatan penimbangan. Kegiatan inovasi yang dilakukan adalah AMBONG (asistensi dan pemberian makanan tambahan pada balita dan Ibu mengandung)

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat dalam hal ini berperan sebagai kader posyandu yang bertugas dalam menjalani tugas di 5 (lima) meja yang menjadi mitra tenaga kesehatan.

e. Realisasi Jenis Pelayanan Anak Usia Pendidikan pada tahun 2024 adalah sebesar 96,35%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan bersumber dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Puskesmas (BOK). Sub kegiatan pelayanan kesehatan anak sekolah melalui kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak sekolah, pelayanan kegiatan UKGS dan lain – lain.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat warga sekolah dalam hal ini guru di sekolah (guru) UKS/M yang berperan aktif dalam membantu tenaga kesehatan dalam melakukan penjangkaran kesehatan pada peserta didik usia pendidikan dasar (SD sampai dengan SMP).

f. Realisasi Jenis Pelayanan Usia Lanjut pada tahun 2024 adalah sebesar 82,63%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan kesehatan usia lanjut bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) melalui kegiatan posyandu lansia di desa, senam lansia di desa, pemeriksaan kesehatan pada lansia yang tidak bisa datang di Posyandu dengan inovasi yang dilakukan di Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Belitung.



- b). Kontribusi swasta/masyarakat:
Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di posyandu Usia lanjut dan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).
- g. Realisasi Jenis Pelayanan warga Negara usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 94,50%;**
- a). Kontribusi Pemerintah Daerah:
Pendanaan pada sub kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa.
- b). Kontribusi swasta/masyarakat:
Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.
- h. Realisasi Jenis Pelayanan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 76,10%;**
- a). Kontribusi Pemerintah Daerah:
Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pencegahan dan penanggulangan penyakit di danai DAK Non Fisik melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita hipertensi disarankan untuk rutin memeriksakan kondisinya ke fasilitas kesehatan (pemeriksaan secara berkala) dan melaksanakan Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS)
- b). Kontribusi swasta/masyarakat:
Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM dan kader kesehatan secara keseluruhan.
- i. Realisasi Jenis Pelayanan DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 106,66%;**
- a). Kontribusi Pemerintah Daerah:
Pendanaan pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita DM harus rutin konsumsi obat dan mengatur pola makan serta melaksanakan GERMAS.
- b). Kontribusi swasta/masyarakat:
Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.
- j. Realisasi Jenis Pelayanan ODGJB (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 112,69%;**
- a). Kontribusi Pemerintah Daerah:
Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan yaitu penjangkaran orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB), pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan mental, wawancara (jika memungkinkan), edukasi (Jika Memungkinkan) serta proses rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).



b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu membantu memerikan informasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas/ kabupaten.

k. Realisasi Jenis Pelayanan TB Paru yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 143,56%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Untuk kegiatan pelaksanaan penjarangan terduga TBC didukung dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) juga dari anggaran APBD Kabupaten Belitung. Kegiatan yang dilakukan seperti penjarangan dilakukan secara aktif massif dan pasif intensif sehingga banyak masyarakat yang diperiksa. Penjarangan juga dilaksanakan pada kelompok khusus (seperti lapas, pondok pesantren, sekolah dan perkebunan sawit, calon jemaah haji) sehingga meningkatkan cakupan penemuan terduga TBC. Pelaksanaan kegiatan investigasi kontak dari indeks kasus TBC dilakukan kepada kontak serumah dan juga kontak erat, misalnya di lingkungan kerja/ lingkungan sekitar pasien. Pelaksanaan skrining terduga TBC juga dilakukan kepada anak-anak yang terindikasi stunting, juga anak-anak di posyandu yang beresiko seperti anak-anak yang tidak naik berat badannya. Pelaksanaan penjarangan terduga TBC juga dilaksanakan terintegrasi dengan lintas program dan lintas sektor lainnya, seperti pemeriksaan kesehatan usia produktif, posyandu siklus hidup, dan juga even-even lainnya yang terintegrasi dengan skrining TBC dan pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pertemuan terkait program TBC.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi swasta dalam mendukung program penanggulangan TBC seperti adanya kerja sama dalam pemeriksaan terduga TBC dan juga dalam pengobatan pasien TBC. Fasyankes swasta yang sudah bekerja sama antara lain seperti RS Almah, RS Utama, Klinik Bakti Timah, Klinik Aisyah Medika, Klinik Bhayangkara Polres, Klinik Utama, Klinik Anak Belitung, Lapas Tanjungpandan dan Polkes 02.10.10 TNI AD. Kerjasama dengan komunitas PARHAT Belitung dalam mendukung program TBC.

l. Realisasi Jenis Pelayanan HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 98,38%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Untuk kegiatan pelaksanaan penjarangan terduga HIV didukung dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) juga dari anggaran APBD Kabupaten Belitung. Kegiatan yang dilakukan seperti pemeriksaan/skrining HIV pada kelompok ibu hamil, penderita TBC, pasien IMS, kelompok LSL, kelompok transgender, kelompok WPS, warga binaan Lapas dan pengguna jarum suntik. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penyakit HIV di masyarakat serta peningkatan kapasitas petugas terkait HIV.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi swasta dalam mendukung program penanggulangan HIV belum maksimal. Fasyankes swasta yang sudah bekerja sama dalam pemeriksaan HIV seperti RS Almah dan RS Utama. Belum adanya komunitas penjangkau untuk kegiatan skrining ataupun penemuan kasus aktif HIV pada kelompok beresiko, seperti LSL, transgender, dll



4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.9

Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil	331.800.000	262.579.000	79,14
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	55.650.000	54.020.000	97,07
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	11.400.000	1.400.000	12,28
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	235.540.800	193.910.000	82,33
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	247.050.000	213.000.000	86,22
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	409.247.800	417.734.375	102,07
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	26.100.000	14.000.000	53,64
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	35.800.000	33.075.000	92,39
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	391.993.000	429.238.300	109,50
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	18.600.000	-	-
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis	82.050.000	73.950.000	90,13
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	224.439.600	188.630.950	84,05

Sumber : Dinas Kesehatan 2023



4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan ASN dan Non ASN serta tenaga lainnya seperti guru, kader kesehatan dan lain - lain yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar

Tabel 4.10

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	110 orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	88 orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	361 orang
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	810 orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	56 orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	90 orang
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	45 orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	45 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	77 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	74 orang

Sumber : Dinas Kesehatan 2024

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

➤ Masalah :

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya target 100% adalah :

- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (83,24%)
 1. Belum semua ibu hamil melakukan ANC sesuai standar karena adanya kehamilan ibu hamil di atas trimester I
 2. Kurangnya pemahaman ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya ANC sejak awal kehamilan
 3. Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan ANC sesuai standar
 4. Masih ada ibu hamil yang tidak terdata karena melakukan pemeriksaan kehamilan diluar wilayah kerja faskes
 5. Masih adanya ibu hamil di bawah umur yang hamil di luar nikah
 6. Pelayanan USG terkendala dengan jadwal piket dokter yang sudah terlatih
 7. Belum semua ibu hamil melakukan USG di Trimester 1 dan Trimester II
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (94,28%)
 1. Masih adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong tenaga kesehatan (melahirkan di rumah).
 2. Masih adanya adat masyarakat tidak mau persalinan di damping tenaga kesehatan.
 3. Masih adanya persalinan dengan faktor resiko (usia tua/ terlalu muda sehingga malu melahirkan di fasyankes).
 4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan kesehatan Balita (83.56%)
 1. Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk datang ke posyandu
 2. Masih adanya ibu balita yang tidak rutin membawa balita ke posyandu untuk ditimbang sampai 8 kali
 3. Masih adanya orang tua yang tidak memberikan anaknya imunisasi dasar lengkap
 4. Belum Optimalnya pelaksanaan kelas ibu balita diposyandu
- ✓ SPM Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar (98.86%)
 1. Masih kurangnya tim penjangkaran UKS di Fasyankes



2. Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan buku raport kesehatanku.
 3. Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait jadwal dan kehadiran siswa saat skrining dilakukan.
- ✓ SPM Pelayanan kesehatan Usia Lanjut (91,91%)
1. Kurangnya kunjungan lansia ke Posyandu karena tidak ada pengobatan
 2. Sarana dan Prasarana di posyandu lansia kurang memadai
 3. Dukungan keluarga untuk mendampingi lansia ke posyandu lansia sangat kurang
 4. Anggaran untuk mendukung kegiatan posyandu lansia terutama stik gula darah sangat minim.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) (82,63%)
1. Jumlah sasaran skrining kelompok usia produktif yg besar (127.724 org), dibandingkan jml SDM puskesmas yg melayani sasaran skrening kelompok usia produktif.
 2. Adanya tugas rangkap dan alih tugas pengelola program P2PTM di puskesmas
 3. Kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan di posyandu/posbindu PTM, karena adanya anggapan tubuh dalam kondisi sehat, adanya kekhawatiran apabila tahu akan penyakit yang di derita dan kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga, dll.
 4. Belum optimalnya kolaborasi lintas program dan lintas sektor, dalam upaya skrining faktor resiko penyakit tidak menular.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (76,11%)
1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke fasyankes, posyandu/ Posbindu PTM, karena merasa tidak ada keluhan sakit, sehingga tidak diketahui kemungkinan mempunyai resiko penyakit hipertensi.
 2. Sebagian masyarakat mencari pengobatan sendiri seperti membeli obat di toko/ apotik atau mencari pengobatan alternatif pada saat merasa ada keluhan sakit
 3. Belum semua data kasus hipertensi dari Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter, terintegrasi dengan pelaporan data kasus hipertensi di puskesmas.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (98,38%)
1. Ada perubahan data sasaran kelompok ibu hamil di akhir tahun, sehingga membuat pengelola program puskesmas tidak maksimal dalam memvalidasi data seluruhnya.
 2. Untuk kelompok resiko penderita TBC, masih ada beberapa pasien TBC baik TBC anak maupun TBC Dewasa yang tidak bersedia diperiksa HIV nya, padahal petugas puskesmas sudah menjelaskan prosedur sesuai SOP.
 3. Masih terbatasnya komunitas penjangkau untuk kegiatan skrining ataupun penemuan kasus aktif HIV pada kelompok beresiko, seperti LSL, transgender, dll.
 4. Masih ada beberapa pengelola program HIV yang belum maksimal dalam penginputan data program HIV ke aplikasi SIHA.

Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan serta masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

➤ **Solusi :**

Untuk menanggulangi permasalahan di atas diperlukan beberapa solusi sebagai berikut :

1. memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.



2. Melakukan kerjasama Lintas Sektor/ Lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan
4. Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas
5. Melakukan Monitoring serta evaluasi secara berkala per bulan/ per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
6. Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

➤ Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (Kabupaten/Kota)

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

➤ Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Kabupaten/Kota)

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Memperhatikan kebutuhan di Kabupaten Belitung maka direncanakan target pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.11

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024
Berdasarkan RENSTRA DPUPR Tahun 2024-2026 dan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kab. Belitung Tahun 2023-2027

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	3.780
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024
Berdasarkan Target dan Realisasi DPPA SKPD

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target	Realisasi Pencapaian SPM	Realisasi Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	1.500	1.500	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	50 KK/ 200	58 KK/ 232	116

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024



4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13 di bawah ini :

Tabel 4.13
Anggaran SPM Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Samak Kecamatan Badau (PAMSIMAS) (Dana Insentif Fiskal 2024)	APBN	157.500.000	156.776.000	99,54
2	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Gunung Riting Kecamatan Membalong (PAMSIMAS) (Dana Insentif Fiskal 2024)	APBN	157.500.000	156.753.000	99,53
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	198.749.000	99,62
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	198.735.000	99,62
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 3) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	199.206.000	99,85
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 4) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	198.798.000	99,65
7	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 5) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	199.196.000	99,85
8	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 6) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	199.131.000	99,82
9	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 7) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	199.500.000	199.000.000	99,75
10	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 8) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	120.750.000	119.989.000	99,37
11	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 9) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	136.500.000	135.797.000	99,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024



Tabel 4.14
Realisasi Anggaran SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Paket 1 (Dana Insentif Fiskal 2024)	APBN	80.000.000	79.814.000	99,77
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Paket 2 (Dana Insentif Fiskal 2024)	APBN	80.000.000	79.922.000	99,90
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	160.000.000	159.820.000	99,89
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	160.000.000	159.827.000	99,89
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 3) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	160.000.000	159.813.000	99,88
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 4) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)	APBN	160.000.000	159.855.000	99,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

4.3.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2024, jumlah Pegawai adalah sebanyak 49 pegawai. Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	11
3	Bidang Sumber Daya Air	6
4	Bidang Bina Marga	4
5	Bidang Cipta Karya	6
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	8
7	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	7
8	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	4
9	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024



Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.16
Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	2	0	2	4
2	S.1	22	3	25	50
3	D4	4	0	4	8
4	D3	12	1	13	26
5	SMA/Sederajat	5	0	5	10
Jumlah		45	4	49	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan
 - a. Belum Optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/ sektor.
 - b. Belum semua indikator dan definisi operasional dalam SPM mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik daerah.
 - c. Belum tersusunnya database yang komprehensif dalam penerapan SPM.
 - d. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan SPM.
- Solusi
 - a. Kebijakan Pejabat Terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
 - b. Dukungan OPD terkait penanganan SPM Air minum dan Air Limbah
 - c. Dukungan Alokasi anggaran daerah dan pusat terkait penerapan SPM.
 - d. Penyiapan dan bimbingan teknis SDM Terkait Penyusunan SPM.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.



- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

1. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Di Kabupaten Belitung tidak terjadi bencana sehingga tidak ada SK bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam mencapai SPM sebagai berikut :

Tabel 4.17

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

Perhitungan Capaian :

- A. Pencapaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu dengan perhitungan :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- B. Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.



$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2024 tidak terealisasi anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten karena sepanjang Tahun 2024 tidak terjadi bencana alam/lainnya yang dampaknya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana kabupaten oleh Bupati, sehingga tidak ada rumah korban bencana yang pemiliknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Sedangkan untuk Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tidak ada relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.18
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	N/A =100%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini :

Tabel 4.19
Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
					(Rp)	%
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	83.956.803	-	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024



4.4.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2024, jumlah Pegawai adalah sebanyak 49 pegawai. Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

1. **Tabel 4.20**
Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	11
3	Bidang Sumber Daya Air	6
4	Bidang Bina Marga	4
5	Bidang Cipta Karya	6
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	8
7	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	7
8	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	4
9	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

2. **Tabel 4.21**
Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	2	0	2	4
2	S.1	22	3	25	50
3	D4	4	0	4	8
4	D3	12	1	13	26
5	SMA/Sederajat	5	0	5	10
	Jumlah	45	4	49	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024



Dukungan personil dalam rangka proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.22
Jumlah SDM Dinas PUPR

Dalam Rangka proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No.	Personil	Jumlah
1.	KPA	1 Orang
2.	PPK	1 Orang
3.	PPBJ	1 Orang
4.	Pengawas Lapangan	3 Orang
5.	Penyedia	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- ✓ Permasalahan :
 - a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sector;
 - b. Tingkat pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum komprehensif antar stakeholder/sector;
 - c. Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik Daerah;
 - d. Belum teridentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
 - e. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- ✓ Solusi :
 - a. Kebijakan pejabat terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
 - b. Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.
 - c. Penyiapan dan bimbingan teknis SDM terkait Penyusunan SPM

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :



Tabel 4.23
Jenis SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	OPD Pelaksana SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2024

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target
1	2	3	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%



No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target
1	2	3	
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab. Belitang 2024

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25
Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				93,94%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	65	65	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13,94%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Total	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	69,72 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada	1656	278	1378	16,79%
	2 . Standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada	14	7	7	50%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda dan Perkada	631	325	306	51,51%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan material dan pelayanan pengobatan	1	1	0	100%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	Tidak ada



6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	Tidak ada
--	---	---	---	-----------

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						93.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	179621	179621	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana <small>(tersedianya KR8 dalam bentuk dokumen yang sah/legal)</small>	Dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1	1	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana <small>(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)</small>	Orang	100	100	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	10	10	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					95.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	179621	179621	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	15.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana <small>(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)</small>	Unit	30	15	15	50.00%



	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) <small>(terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)</small>	Orang	56	56	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					84.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2377	2377	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	4.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					20.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana <small>(terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)</small>	Posko	0	0	0	0.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana <small>(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)</small>	Orang	0	0	0	0.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana <small>(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)</small>	Dokumen	0	0	0	0.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas <small>(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)</small>	Layanan	0	0	0	0.00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1	1	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						97.78%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					97.78%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	72	72	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	17.78%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					88.89%



1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi <small>(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)</small>	Layanan	60	60	0	100.00%
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi <small>(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)</small>	Dokumen	1	1	0	100.00%
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran <small>(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)</small>	Unit	30	10	20	33.33%
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia <small>(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)</small>	Orang	10	10	0	100.00%
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran <small>(korban jiwa langsung)</small>	Layanan	72	72	0	100.00%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran <small>(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</small>	Layanan	0	0	0	100.00%

Sumber : BPBD Kab.Belitung 2024

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

Tabel 4.26
Anggaran Pencapaian SPM pada Sat Pol PP Kabupaten Belitung
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran	Realisasi
Sub Keg	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.246.275.000	1.234.858.000
Sub Keg	2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.000.000	49.800.000
Sub Keg	3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	39.600.000	34.200.000
Sub Keg	4. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	6.680.000,	1.680.000
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		1.344.555.000	1.320.538.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2024



Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah :

Tabel 4.27
Anggaran Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Belitung
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Penanggulangan Bencana	1.696.690.200	1.529.924.988	90,17
I.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	104.756.000	91.257.738	87,11
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	170.770.000	131.822.600	77,19
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	1.421.164.200	1.306.844.650	91,96
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	776.955.100	678.756.300	87,36
1.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	588.045.100	511.620.300	87
2.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	188.910.000	167.136.000	88,47

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2024

1.5.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 di Kabupaten Belitung didukung oleh Personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Belitung.

Tabel 4.28
Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Satuan	1	
2.	Sekretaris	1	
	Subbag Kepegawaian dan Umum	1	
	Subbagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	1	
	Bendahara	1	
	PPPK Fungsional umum	2	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah	1	
	Seksi Penyelidikan dan penyelidikan	1	



No	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
	Seksi pengawasan dan penindakan	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	4	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	3	
	Fungsional Umum	2	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	
	Seksi penertiban, operasional dan pengendalian	1	
	Seksi samapta	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	3	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	4	
	Fungsional Umum	3	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	
	Seksi satuan perlindungan masyarakat	1	
	Seksi bina potensi masyarakat	1	
	Fungsional polisi pamong praja ahli	2	
	Fungsional polisi pamong praja terampil	2	
	Fungsional umum	4	
	Total ASN	43	
6.	Non ASN	94	
	Jumlah	137	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2024

Terhitung per 31 Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung seluruhnya adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) ASN dan 34 (tiga puluh empat) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 4.29

Komposisi dan Jumlah ASN BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO.	J a b a t a n	ASN Berdasarkan Golongan				PPP K VII	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	Kepala Pelaksana				1		1
2.	Sekretariat			2			2
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			3			3
4.	Seksi Penanganan Darurat logistik dan Kebakaran		5	7			12
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			3			3
6.	Pranata Komputer					1	1
	J U M L A H		6	12	1		22

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2024

Tabel 4.30

Komposisi dan Jumlah Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	URAIAN	Jumlah
1.	Tenaga Operasional Lapangan	32
2.	Petugas Kebersihan	2
	Jumlah	34

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2024



4.5.6 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

- a) Kesulitan Penetapan jumlah target penerima layanan dasar, dikarenakan jumlah dan lokasi penertiban tidak dapat diketahui secara pasti (sebagai acuan penghitungan jumlah perkiraan yang akan terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada);
- b) Kompetensi dan kapasitas Personil dalam hal tata cara pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada belum optimal;
- c) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.

Solusi :

- a) Prediksi Jumlah target penerima layanan dasar berdasarkan jumlah pelanggar tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan jumlah tahun berjalan;
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dengan “Tanpa Kecelakaan atau Kerugian”.
- c) Mengoptimalkan Sarpras yang tersedia dan mengupayakan penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;

➤ Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

- a) Identifikasi data warga yang menjadi target layanan SPM belum optimal .
- b) Sulitnya menentukan jumlah target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran dalam SPM karena tentunya tidak ada yang berharap terjadi bencana atau targetnya adalah nol;
- c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
- d) Standar peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar belum optimal.

Solusi :

- a) Optimalisasi pendataan warga yang menjadi target layanan SPM;
- b) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
- c) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab. /kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana pada saat dan pasca tanggap darurat bencana.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kabupaten Belitung sesuai dengan Jenis Layanan yaitu Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia diketahui bahwa jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia yang ada di DTKS adalah sebagai berikut

Tabel 4.31

Hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS T)ahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH	KET
1.	Penyandang Disabilitas	632 Orang	
2.	Anak Terlantar	219 Orang	
3.	Lanjut Usia	7923 Orang	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Dari data tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diperoleh Sasaran yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan keterlantaran sesuai dengan jenis layanan:

Tabel 4.32

Sasaran yang harus dipenuhi Pelayanan SPM urusan Sosial pada Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH	KET
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Orang	
2.	Anak Terlantar	15 Orang	
3.	Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Sedangkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota dan Perlindungan Sosial Korban Bencana pada saat dan pasca tanggap darurat bencana data bersifat asumtif berdasarkan data kejadian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Kebutuhan Dasar berdasarkan jumlah Warga Negara yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jumlah jenis layanan dasar yang dikategorikan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis serta Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang belum mampu untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah berjumlah sebagai berikut:

Tabel 4.33

Perhitungan Sasaran Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH SASARAN	RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR			
			Jumlah Yang Sudah Terpenuhi Melalui APBN / Sumber Lain	Jumlah Yang Belum Terpenuhi		
				Jumlah	Dipenuhi Melalui APBD	Yang Belum Ditangani
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Jiwa	-	30 Jiwa	30 jiwa	-
2.	Anak Terlantar	15 Jiwa	-	15 Jiwa	15 Jiwa	-
3.	Lanjut Usia Terlantar	60 Jiwa	-	60 Jiwa	60 Jiwa	-
4.	Gelandangan dan Pengemis	25 Jiwa	-	25 Jiwa	25 Jiwa	-
5.	Korban Bencana Alam dan Sosial	48 Jiwa	9 Jiwa	-	41 Jiwa	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024



Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah 100% dengan rincian target capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.34
Target Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target Capaian
		Indikator Kinerja	2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %
		Persentase (%)Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	100 %
		Persentase (%) Korban Bencana Alam Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

4.6.3 Realisasi

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan permakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitasi untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 dapat tergambar dalam tabel 4.35 berikut :



Tabel 4.35

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2024
Berdasarkan Mutu Layanan

N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM						97.40 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					99.79 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	30	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.79 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.97 %
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	30	30	0	100.00 %
	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan / atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial.					
	2. Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0	100.00 %
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)					
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	30	30	0	100.00 %
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)					
	4. Penyediaan sandang	Orang	30	28	2	93.33 %



	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	6	6	0	100.00 %
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	30	30	0	100.00 %
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100.00 %
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan / olahraga / outbound / gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	30	28	2	93.33 %
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain, dan / atau di lingkungan keluarga / masyarakat)					
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100.00 %



	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5	5	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3	3	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	30	30	0	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15	15	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	15	15	0	100.00 %
	layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					



	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100.00 %
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)					
	3. Penyediaan permakanan	Orang	15	15	0	100.00 %
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan / atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan / orang / hari)					
	4. Penyediaan sandang	Orang	3	3	0	100.00 %
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	15	0	100.00 %
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	0	100.00 %
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan / olahraga / outbound / gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis).					
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	15	15	0	100.00 %
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas					



	sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain, dan / atau di lingkungan keluarga / masyarakat)					
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas / klinik / rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	15	15	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					99.23 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.23 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	0	100.00 %



	layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	60	60	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	60	60	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	12	12	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet / alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	2	2	50.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	60	60	0	100.00 %



	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00 %
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan / olahraga / outbound / gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain, dan / atau di lingkungan keluarga / masyarakat)	Orang	20	20	0	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas / klinik / rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan / atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	60	60	0	100.00 %



	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	60	60	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25	25	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	25	25	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	25	25	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan / orang / hari)	Orang	25	25	0	100.00 %



4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	12	12	0	100.00 %
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	0	100.00 %
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan / olahraga / outbound / gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	25	25	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa / kelurahan / nama lain, dan / atau di lingkungan keluarga / masyarakat)	Orang	7	7	0	100.00 %
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	6	6	0	100.00 %



	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas / klinik / rumah sakit)					
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	23	23	0	100.00 %
	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)					
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	23	23	0	100.00 %
	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					88.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48	48	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.00 %
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	41	41	0	100.00 %
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware	Orang	9	9	0	100.00 %



	dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras / tikar / alas tidur, dan / atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	0	0	0	0.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	0	0	0	0.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah / situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	15	15	0	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 6
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2024
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	1.111.535.900,00
2.	APBN	35.532.489.200,00
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	17.606.400.000,00
	- Kebencanaan Alam dan Sosial	314.853.350,-
	- PKH (3.680 KPM)	17.647.850.000,00
	Jumlah	32.514.005.803,-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024



Tabel 4.37
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Belitang Serta Realisasinya APBD Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1.	Program Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Galandangan Pengemis di Luar Panti	1. Penyediaan Permakanan	208.131.000	205.070.000	98,53%
		2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.148.750	5.495.000	49,29%
		3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	60.041.400	54.269.850	90,39%
		4. Pemberian Layanan Kedaruratan	36.350.862	36.116.500	99,36%
		5. Pemberian Layanan Rujukan	61.803.670	44.792.982	72,48%
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	41.256.200	16.955.668	41,10%
3.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	438.517.700	398.107.550	90,78%
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	252.957.750	136.813.444	54,09%
		2. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	7.993.500	1.080.000	13,51%
		1. Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.264.600	8.875.900	58,15%
Jumlah			1.133.465.432	907.576.894	80,07%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024



4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM tahun 2024 pada Bidang sosial yaitu :

- Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) sebanyak 28 orang
- Non PNS 6 orang
- Pendamping Rehabilitasi Sosial sebanyak 2 orang
- Petugas Pengelola Gudang Logistik dan Kendaraan Operasional Kebencanaan 1 Orang
- Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya:
 1. SDM PKH sebanyak 20 Orang
 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 5 Orang
 3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 49 Orang
 4. Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 45 Orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu data PMKS yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial, anggaran dan sarana prasarana.

Permasalahan yang dihadapi pun dapat di kategorikan berdasarkan Tahapan penerapan SPM di Bidang Sosial diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tahapan Pengumpulan Data; permasalahan yang dialami diantaranya Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar bersifat dinamis sehingga sulit untuk menetapkan data baku, sedangkan untuk data Gepeng dan korban bencana bersifat asumsi berdasarkan data realisasi pada Tahun sebelumnya.
- b. Pada tahapan Penghitungan Kebutuhan; yang menjadi masalah adalah Permasalahan dalam penghitungan kebutuhan bukan berdasarkan kebutuhan penerima layanan, namun berdasarkan anggaran yang tersedia.
- c. Pada tahapan Perencanaan dan Penganggaran; permasalahan yang dialami yaitu terkait terbatasnya anggaran sehingga penghitungan kebutuhan yang sudah dihitung dalam perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan tidak dapat seluruhnya masuk dalam penganggaran.
- d. Pada tahapan Pelaksanaan; permasalahan yang dialami diantaranya terbatasnya SDM membuat layanan yang diberikan kurang maksimal dan masih kurangnya sinergitas dari Lembaga/Instansi lain dalam upaya pemberian layanan.

Selain permasalahan terkait tahapan penerapan SPM, terdapat permasalahan lain yang juga menjadi fokus perhatian dalam pencapaian penerapan SPM yaitu Peran Sekretariat Bersama Penerapan SPM yang belum optimal sehingga banyak permasalahan penerapan SPM tidak menjadi *concern* bersama dalam solusi dan pemecahan masalah.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS secara periodik dan terencana, penyiapan dan penguatan SDM Kesejahteraan Sosial melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.



4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

➤ Urusan Pendidikan

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas
- 4) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah
- 6) Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah
- 7) Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar
- 8) Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
- 9) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- 10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 11) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar
- 12) Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 13) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 14) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Laboratorium
- 3) Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 6) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium
- 8) Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 9) Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah
- 10) Pengadaan Mebel Sekolah
- 11) Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 14) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 16) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 17) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- 2) Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 3) Pengadaan Mebel PAUD
- 4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- 5) Penyelenggaraan proses belajar PAUD
- 6) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan



- 7) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 9) Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

- 1) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 2) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 4) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

➤ **Urusan Kesehatan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

Tabel 4.38
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengadaan Buku KIA
			Montoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Kelurga (Ibu Hamil)
			Kelas Ibu Hamil
			Pemantauan P4K
			Pelayanan Antenatal Care (ANC)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Jaminan Persalinan
			Penguatan Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Pelayanan Kesehatan ibu Nifas
			Pelayanan KB Pasca Salin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberian Vit K dan vaksin HB O
			Perawatan Tali Pusat
			Skринing Hipotiroid Kongenital
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi Penguatan Buku KIA
			Pemantauan pemanfaatan kohort Balita
			Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
			Deteksi Dini Tumbuh Kembang balita (DDTK)
			Pelayanan imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan Posyandu Remaja
			Penjaringan kesehatan anak sekolah
			pelayanan vaksinasi anak sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
			Pembinaan PKPR



No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program	Kegiatan
			Pembinaan UKS/M
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemantauan pelayanan screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Pendampingan dan pelaksanaan screening IVA Pendampingan kegiatan screening Gangguan Indra Fungsional (GIF) Pelayanan Posbindu PTM
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan kesehatan lansia Posyandu Lansia
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Screening PTM kegiatan pelayanan Posbindu PTM
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular kegiatan pelayanan Posbindu PTM Informasi dan edukasi terkait Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan, edukasi dan advokasi kesehatan jiwa di masyarakat koordinasi terpadu lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan kesehatan jiwa melakukan rujukan (oleh Puskesmas) ke Fasilitas kesehatan lanjutan (RSUD dan RSJ)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penanggulangan Penyakit TB Baru Pendampingan Deteksi dini TB Pemeriksaan Sputum TB yang dilakukan oleh analis Puskesmas dan RS Edukasi terkait penyakit TB
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/ AIDS) Pendampingan pelaksanaan screening HIV pada populasi kunci Pemberdayaan masyarakat melalui kader penjangkauan lapangan dalam rangka mapping populasi kunci Orientasi kader penjangkau lapangan dalam Penanggulangan penyakit HIV/ AIDS

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024



➤ **Urusan Pekerjaan Umum**

Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Samak Kecamatan Badau (PAMSIMAS) (Dana Insentif Fiskal 2024)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Gunung Riting Kecamatan Membalong (PAMSIMAS) (Dana Insentif Fiskal 2024)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 3) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 4) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 5) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 6) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 7) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 8) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 9) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)

✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Paket 1 (Dana Insentif Fiskal 2024)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Paket 2 (Dana Insentif Fiskal 2024)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 3) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 4) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023)

➤ **Urusan Perumahan Rakyat**

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

✓ Program Pengembangan Perumahan

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➤ **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

Tabel 4.39

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja

1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Indikator	target	realisasi	Persentase capaian
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100 %



1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Indikator	target	realisasi	Persentase capaian	
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Laporan	12	12	100%
	2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	11	11	100%
	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	30	30	100%
	4	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1	1	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2024

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

Tabel 4.40

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1	Program Penanggulangan Bencana
	Kegiatan :
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024

➤ **Urusan Sosial**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:



Tabel 4.41
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2024
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Galandangan Pengemis di Luar Panti	1. Penyediaan Permakanan
		2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		3. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		4. Pemberian Layanan Kedaruratan
		5. Pemberian Layanan Rujukan
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal
3.	Program Penanggulangan Bencana 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
	Jumlah	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024



BAB V PENUTUP

Berdasarkan paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2024 sebagai suatu tahapan proses pemerintahan, dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah terdapat program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan terdapat juga program-program yang belum optimal hasilnya seperti perencanaannya. Namun demikian, pada masa yang akan datang hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga program-program dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2024 masih terdapat kendala dalam realisasinya yang disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dan juga sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat meminimalisasi berbagai kendala tersebut sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi jumlah program-program yang akhirnya batal dilaksanakan dan juga program-program yang ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, diharapkan semua unsur terkait pada masa yang akan datang membuat perencanaan program-program dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian diharapkan kinerja dapat lebih efektif karena tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan program-program yang tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan.
- b. Diharapkan OPD dalam penyampaian data dan bahan untuk menunjang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kelengkapan dari laporannya masing-masing sesuai dengan format yang diberikan demi untuk memudahkan rekapitulasi data. Selain itu diharapkan agar menyampaikan laporannya tepat waktu sehingga penyampaian LPPD Kabupaten Belitung ke Provinsi dapat disampaikan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.
- c. Agar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan dapat meningkatkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terkesan hanya baik pada sisi kuantitas personil penyusunan namun tidak pada sisi kualitas/kinerjanya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang, agar terjadi kesinambungan pembangunan yang terpola dan tersusun secara tahap demi tahap dan sistematis.



**Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	6.891	6.370	13.261
2	5-9	7.803	7.309	15.112
3	10-14	8.478	8.091	16.569
4	15-19	7.767	7.407	15.174
5	20-24	8.017	7.956	15.973
6	25-29	7.767	7.293	14.950
7	30-34	8.017	7.074	14.549
8	35-39	7.657	6.872	14.258
9	40-44	7.475	7.752	15.967
10	45-49	7.386	6.734	13.980
11	50-54	8.215	5.792	11.942
12	55-59	7.246	4.648	9.427
13	60-64	6.150	3.915	7.812
14	65-69	4.779	2.888	5.617
15	70-74	3.897	2.086	3.931
16	>75	1.588	2.295	3.883
TOTAL		97.923	94.482	192.405

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2024



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pekerjaan Tahun 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	21.626	19.487	41.113
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	48.617	48.620
3	PELAJAR/MAHASISWA	18.423	16.813	35.236
4	PENSIUNAN	937	403	1.340
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1.911	2.139	4.050
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	208	3	211
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	440	27	467
8	PERDAGANGAN	674	174	848
9	PETANI/PEKEBUN	5.440	269	5.709
10	PETERNAK	14	3	17
11	NELAYAN/PERIKANAN	7.467	16	7.483
12	INDUSTRI	36	4	40
13	KONSTRUKSI	52	2	54
14	TRANSPORTASI	54	0	54
15	KARYAWAN SWASTA	8.447	3.074	11.521
16	KARYAWAN BUMN	201	59	260
17	KARYAWAN BUMD	21	22	43
18	KARYAWAN HONORER	751	851	1.602
19	BURUH HARIAN LEPAS	20.659	483	21.142
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	135	31	166
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	224	2	226
22	BURUH PETERNAKAN	4	2	6
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	47	48
24	TUKANG CUKUR	3	0	3
25	TUKANG LISTRIK	13	0	13
26	TUKANG BATU	10	0	10
27	TUKANG KAYU	45	0	45
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0	4
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	221	0	221
30	TUKANG JAHIT	20	17	37
31	TUKANG GIGI	0	0	0
32	PENATA RIAS	6	6	12
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	7	8	15
35	MEKANIK	101	0	101
36	SENIMAN	26	2	28
37	TABIB	2	0	2
38	PARAJI	0	2	2
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0
41	IMAM MASJID	1	0	1
42	PENDETA	16	2	18
43	PASTOR	2	0	2
44	WARTAWAN	26	0	26
45	USTADZ/MUBALIGH	7	0	7



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
46	JURU MASAK	2	6	8
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR L	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	1	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	1
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	2	1	3
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	25	2	27
64	DOSEN	9	8	17
65	GURU	116	282	398
66	PILOT	1	0	1
67	PENGACARA	11	3	14
68	NOTARIS	1	3	4
69	ARSITEK	4	0	4
70	AKUNTAN	0	1	1
71	KONSULTAN	13	1	14
72	DOKTER	33	50	83
73	BIDAN	0	53	53
74	PERAWAT	12	39	51
75	APOTEKER	2	13	15
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	2	2
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	1	1	2
79	PELAUT	138	0	138
80	PENELITI	1	0	1
81	SOPIR	378	1	379
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	372	103	474
85	PERANGKAT DESA	129	98	227
86	KEPALA DESA	22	-	22
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	5	5
88	WIRASWASTA	8.587	1.200	9.787
89	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA	1	0	1
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	0	0	0



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	24	45	69
TOTAL		97.923	94.482	192.405

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2024



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Agama Tahun 2024

NO	AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ISLAM	90.393	87.005	177.398
2	KRISTEN	1.755	1.742	3.497
3	KATHOLIK	665	611	1.277
4	HINDU	423	382	805
5	BUDHA	4.588	4.642	9.230
6	KONGHUCHU	93	94	187
7	ALIRAN KEPENCAYAAN	6	5	11
TOTAL		97.923	94.482	192.405

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2024



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	1.989	2.083	4.072
2		PARIT	2.718	2.718	5.436
3		LESUNG BATANG	3.459	3.478	6.937
4		PANGKALLALANG	6.627	6.465	13.092
5		TANJUNGPENDAM	2.625	2.644	5.269
6		PAAL SATU	4.238	4.181	8.419
7		KAMPONG DAMAI	1.974	1.962	3.936
8		BULUH TUMBANG	2.180	2.037	4.217
9		PERAWAS	2.680	2.629	5.316
10		DUKONG	3.327	3.174	6.501
11		JURU SEBERANG	1.416	1.300	2.716
12		AIR SAGA	6.328	6.093	12.421
13		AIR MERBAU	4.269	4.187	8.456
14		AIK PELEMPANG JAYA	3.674	3.611	7.285
15		AIK KETEKOK	2.831	2.673	5.504
16		AIK RAYAK	5.203	5.083	10.286
Jumlah			55.545	54.318	109.863
1	MEMBALONG	MEMBALONG	2.574	2.456	5.030
2		PERPAT	999	946	1.945
3		LASSAR	1.827	1.610	3.467
4		SIMPANG RUSA	1.623	1.509	3.132
5		KEMBIRI	1.531	1.463	2.944
6		BANTAN	1.486	1.399	2.885
7		TANJUNGRUSA	1.100	1.077	2.177
8		MENTIGI	727	712	1.439
9		PULAU SELIU	576	506	1.082
10		PULAU SUMEDANG	270	289	559
11		GUNUNG RITING	718	671	1.389
12		PADANG KANDIS	665	647	1.312
Jumlah			14.096	13.315	27.411
1	SELAT NASIK	SELAT NASIK	1.209	1.165	2.374
2		PETALING	337	323	660
3		SUAK GUAL	495	438	934
4		PULAU GERSIK	1.009	975	1.984
Jumlah			3.050	2.902	5.952
1	SIJUK	SIJUK	1.630	1.583	3.213
2		BATU ITAM	1.351	1.302	2.653
3		TERONG	1.437	1.398	2.835
4		AIR SERUK	3.233	3.099	6.332
5		TANJUNG BINGA	3.413	3.236	6.649
6		AIR SELUMAR	1.742	1.681	3.423
7		SUNGAI PADANG	1.280	1.194	2.474
8		KECIPUT	1.360	1.296	2.656
9		PELEPAK PUTE	1.043	983	1.976
10		TANJONG TINGGI	583	571	1.154
Jumlah			17.072	16.293	33.365



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BADAU	BADAU	1.854	1.748	3.602
2		AIR BATU BUDING	768	734	1.502
3		SUNGAI SAMAK	1.262	1.206	2.468
4		KACANG BUTOR	1.425	1.309	2.734
5		CERUCUK	1.088	975	2.057
6		PEGANTUNGAN	1.054	1.019	2.037
7		IBUL	715	663	1.378
Jumlah			8.160	7.654	15.814
TOTAL			97.923	94.482	192.405

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2024



Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Belitung
Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	1.065	395	1.460
2		PARIT	1.459	561	2.020
3		LESUNG BATANG	1.866	536	2.402
4		PANGKALLALANG	3.522	989	4.511
5		TANJUNGPENDAM	1.391	472	1.863
6		PAAL SATU	2.295	695	2.990
7		KAMPONG DAMAI	1.034	372	1.406
8		BULUH TUMBANG	1.216	217	1.433
9		PERAWAS	1.445	303	1.748
10		DUKONG	1.781	446	2.227
11		JURU SEBERANG	771	157	928
12		AIR SAGA	3.322	826	4.148
13		AIR MERBAU	2.237	520	2.757
14		AIK PELEMPANG JAYA	1.907	459	2.366
15		AIK KETEKOK	1.504	370	1.874
16		AIK RAYAK	2.817	641	3.458
Jumlah			29.632	7.959	37.591
1	MEMBALONG	MEMBALONG	1.587	287	1.874
2		PERPAT	601	96	697
3		LASSAR	1.062	160	1.222
4		SIMPANG RUSA	921	137	1.058
5		KEMBIRI	930	131	1.061
6		BANTAN	856	142	998
7		TANJUNGRUSA	643	174	817
8		MENTIGI	449	87	536
9		PULAU SELIU	314	95	409
10		PULAU SUMEDANG	141	26	167
11		GUNUNG RITING	406	115	521
12		PADANG KANDIS	401	103	504
Jumlah			8.311	1.553	9.864
1	SELAT NASIK	SELAT NASIK	688	144	832
2		PETALING	200	38	238
3		SUAK GUAL	280	54	334
4		PULAU GERSIK	521	144	665
Jumlah			1.689	380	2.069
1	SIJUK	SIJUK	954	216	1.170
2		BATU ITAM	748	139	887
3		TERONG	792	154	946
4		AIR SERUK	1.830	286	2.116
5		TANJUNG BINGA	1.782	370	2.152
6		AIR SELUMAR	1.038	185	1.223
7		SUNGAI PADANG	728	132	860
8		KECIPUT	757	148	905
9		PELEPAK PUTE	578	68	646
10		TANJONG TINGGI	324	57	381



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2024

Jumlah			9.531	1.755	11.286
1	BADAU	BADAU	1.077	163	1.240
2		AIR BATU BUDING	460	57	517
3		SUNGAI SAMAK	740	137	877
4		KACANG BUTOR	816	150	966
5		CERUCUK	609	99	708
6		PEGANTUNGAN	587	103	690
7		IBUL	409	59	468
Jumlah			4.698	768	5.466
TOTAL			53.861	12.415	66.276

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2024



**CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024**

Pada Tahun 2024 , Kabupaten Belitung memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional, sebanyak 8 (delapan) penghargaan. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain sebagai berikut.

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
1.	Penghargaan Proklamasi kategori utama dalam upaya Pengendalian Perubahan Iklim Tingkat Nasional sebagai Proklamasi Kategori Utama Tahun 2024	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Badau
2.	Penghargaan Proklamasi kategori Madya dalam upaya Pengendalian Perubahan Iklim Tingkat Nasional Tahun 2024	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	1. Desa Air Seruk 2. Desa Perpat 3. Desa Keciput 4. Desa Tanjung Binga 5. Desa Simpang Rusa
3.	Penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024 Kategori UPTK Layanan Primer Tenaga Medis	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	dr. Jubel Tawar Herwington Gultom
4.	Piagam Penghargaan sebagai Pelaksana Pilot Project Gerakan Keluarga SEHAT Tanggal dan Tangguh Bencana Kategori Menuju PHBS	Ketua Umum Tim Penggerak PKK	Kelurahan Tanjung Pendam Kabupaten Belitung
5.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	1. SD Negeri 17 Tanjungpandan 2. SMKN 1 Tanjungpandan
6.	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	1. SMP Negeri 7 Tanjungpandan 2. SD Negeri 8 Badau 3. SD Keluarga Universal
7.	Piagam Penghargaan Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public (Opini Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024) Kualitas Tertinggi	Pengawas penyelenggaraan pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Belitung
8.	TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dengan Inovasi Penjaga Di Hati (Penjaringan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi) Tahun 2024	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	UPT Puskesmas Badau Kabupaten Belitung